



DR. H. SUPARDIN, M.H.I.

FIKIH PERADILAN

AGAMA DI INDONESIA

Rekonstruksi Materi Perkara Tertentu

FIKIH PERADILAN AGAMA DI INDONESIA

(Rekonstruksi Materi Perkara Tertentu)



DR. H. SUPARDIN, M.H.I.

Alauddin University Press

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruhnya isi buku ini ke dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

Judul Buku

**Fikih Peradilan Agama di Indonesia
(Rekonstruksi Materi Perkara Tertentu)**

Penulis

Dr. H. Supardin, M.H.I.

Cet. ke-1 : 2014

Cet. ke-2 : 2016

Cet. ke-3 : 2017

Cet. ke-4 : 2018

Cet. ke-5 : 2019

Cet. ke-6 : 2020

(Edisi Revisi)

viii + 238 halaman, 14 cm x 21 cm

ISBN : 978-602-237-930-0

Penerbit:

Alauddin University Press

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus I: Jalan Sultas Alauddin No. 63 Makassar

Kampus II: Jalan H.M. Yasin Limpo No. 36 Gowa

Percetakan: CV Berkah Utami

Jalan Sultan Alauddin No. 121 Permatasari Makassar

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين .

Puji dan syukur hanya kepada Allah swt. yang senantiasa melimpahkan nikmat-Nya berupa kesehatan dan kesempatan kepada penulis dan keluarga, sehingga dapat menyelesaikan buku ini dengan baik. Demikian pula *ṣalawat* dan taslim disampaikan kepada junjungan Baginda Rasulullah Muhammad saw. yang merupakan *uswah al-ḥasanah* sekaligus figur pemimpin yang meletakkan konstitusi pertama di dunia Islam yang bernama “Piagam Madinah.”

Penyelesaian buku ini, tentunya penulis menyadari bahwa untuk memperoleh hasil yang memuaskan bagi segenap pihak adalah tidaklah mudah, dan pasti mengalami kekeliruan yang tentunya tidak disengaja. Namun dengan dukungan moril dan materil dari berbagai pihak, buku yang berjudul FIKIH PERADILAN AGAMA DI INDONESIA (Rekonstruksi Materi Perkara Tertentu) dapat diterbitkan dengan baik.

Buku ini secara umum membahas tentang hukum Islam berisi pemahaman dan perbedaan antara syari’ah, fikih, dan hukum Islam itu sendiri, serta hubungan hukum Islam terhadap pengembangan rekonstruksi lembaga Peradilan Agama di Indonesia. Eksistensi Peradilan Agama di Indonesia lahir dengan melalui fase kesultanan, penjajahan, hingga fase kemerdekaan Indonesia yang disertai dengan sejarah pengembangannya. Dengan demikian perspektif dan prospektif rekonstruksi lembaga Peradilan Agama dalam pengembangan perkara tertentu melalui politik hukum nasional, pengaruh teori pemberlakuan hukum Islam, termasuk dalam melahirkan KHI. Pengembangan kompetensi Peradilan Agama terutama dalam pengembangan materi perkara tertentu yang dianalisis secara yuridis formal. Dalam buku ditemukan rekonstruksinya pada materi perkara tertentu, yakni pidana khusus dan Pengadilan Khusus

yang tentunya dengan undang-undang baru yang bertalian dengan objek tersebut.

Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan kepada segenap pihak yang mendukung terbitnya buku ini, permohonan maaf jika terdapat kekeliruan baik dari teknik pengutipan, penulisan, isi, dan sebagainya. Semoga Allah swt. memberikan manfaat dan pahala kepada kita semua, terutama yang membaca dan mengamalkannya atas rida Allah swt.

Makassar, 17 Juni 2020 M
25 Syawal 1441 H

Wa al-salām.
Penulis,

Dr. H. Supardin, M.H.I.

DAFTAR TRANSLITERASI

Adapun pedoman transliterasi yang dipakai oleh penulis adalah sebagai berikut:

A. *Huruf /Abjad*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	ka	k	ka
ل	lam	l	el

م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

B. *Vocal Rangkap/Diftong*

Huruf Arab	Huruf Latin	Nama/Baca = Contoh
اي	ai	اين aina
او	au	اون auna
-	oi	amboi

DAFTAR ISI

KATAPENGANTAR	iii
DAFTAR TRANS LITERASI	v
DFATAR ISI	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Sejarah Sosial Peradilan Islam	1
B. Sistem Hukum Peradilan	5
C. Gambaran Rekonstruksi Perkara Tertentu	9
D. Kajian Pakar Hukum Islam tentang Peradilan	13
E. Teori-teori Pemberlakuan Hukum Islam	19
BAB II. HUKUM ISLAM DI INDONESIA	27
A. Syari'ah dan Fikih	27
B. Produk Pemikiran Hukum Islam	30
C. Hubungan Hukum Islam dan Peradilan Agama ..	35
BAB III. EKSISTENSI PERADILAN AGAMA	
DI INDONESIA	39
A. Fase Kesultanan	43
B. Fase Penjajahan	51
C. Fase Kemerdekaan	57
D. Pengaruh dan Perkembangan Peradilan Agama ..	79
BAB IV. PERSPEKTIF DAN PROSPEKTIF PERADILAN	
AGAMA DI INDONESIA	83
A. Politik Hukum Nasional	83
B. Pengaruh Teori Pemberlakuan Hukum Islam	85
C. KHI sebagai Produk Hukum Nasional	95
D. Pengembangan Kompetensi Peradilan Agama	105
BAB V. PENGEMBANGAN MATERI PERKARA TERTENTU	
PERADILAN AGAMA DI INDONESIA	117
A. Menelusuri Materi Perkara Tertentu	118
B. Analisis Pengembangan Perkara Tertentu	127
C. Pengembangan Materi Perkara Tertentu pada	
Pendekatan Yuridis Formal	135
1. Yuridis Formal Prapenyatuan Atap	136

2. Yuridis Formal Penyatuan Atap	172
3. Yuridis Formal Pascapenyatuan Atap	196
BAB VI. PENUTUP	223
A. Kesimpulan	223
B. Implikasi	224
DAFTAR PUSTAKA	227
BIODATA PENULIS	237



BAB I

PENDAHULUAN

A. Sejarah Sosial Peradilan Islam

Bumi dan langit merupakan alam raya yang diciptakan untuk kepentingan manusia, dan manusialah yang mengaturnya melalui petunjuk al-Qur'an, hadis, dan/atau kitab suci. Allah menurunkan al-Qur'an kepada makhluk-Nya untuk dijadikan sebagai sumber pokok ajaran Islam. Manusia sebagai khalifah di muka bumi diberikan amanah untuk mengelola, memelihara, dan mengatur hubungan pada perikehidupan, baik hubungan vertikal maupun horizontal.

Hubungan vertikal adalah mengatur tata cara mengabdikan diri kepada Sang Pencipta, dan hubungan horizontal adalah mengatur bagaimana mengadakan komunikasi dan menata berbagai aspek kehidupan di dunia dengan baik antar sesama makhluk. Allah menciptakan manusia dengan jenis kelamin yang berbeda, ada laki-laki dan ada perempuan. Demikian pula dengan bahasa dan budaya yang bermacam-macam, termasuk di antaranya perbedaan syari'at dan hukum atau peraturan yang berlaku pada suatu negara, daerah, dan masyarakat.

Mengatur berbagai perikehidupan, diperlukan suatu peraturan yang dibuat, disepakati, dan ditaati oleh manusia atau sekelompok orang. Peraturan-peraturan yang dibuat itu, umumnya dipahami dan diartikan sebagai hukum atau undang-undang. Undang-undang pada suatu negara atau tempat selalu berubah dari generasi ke generasi lainnya, baik secara teoretis maupun secara empiris yang terjadi pada kehidupan masyarakat.

Perubahan terjadi karena para ahli hukum yang saling berbeda pendapat, baik di Indonesia maupun di dunia internasional. Pengetahuan hukum tidak dapat diabaikan, karena sering terjadi kasus perbuatan atau pelanggaran hukum. Hal yang tidak dapat dipungkiri, bahwa manusia lahir dijempit oleh hukum, manusia hidup diatur oleh hukum, dan manusia mati diantar oleh hukum. Oleh karena itu,

manusia perlu mempelajari sejarah sosial hukum, baik hukum publik maupun hukum privat terutama sejarah sosial hukum Islam.

Mempelajari sejarah sosial hukum Islam berarti mempelajari hukum itu sendiri yang dijadikan dasar dalam berperkara di lembaga Peradilan Agama. Hukum Islam telah berkembang secara kompleks sehingga melahirkan ulama dan cendekiawan muslim dengan karya tulisnya yang dijadikan sebagai khazanah yang tidak bisa dinilai dengan material. Oleh karena itu, buku ini hanya sebagian kecil dari khazanah sejarah sosial hukum Islam di tanah air, khususnya pelaksanaannya yang merupakan ciri khas keindonesiaan dan mengandung muatan lokal yang dirancang dalam bentuk pembangunan hukum secara nasional. Pembangunan hukum nasional di negara yang berpenduduk mayoritas Islam seperti Indonesia, maka unsur agama yang menjadi urgen untuk diperhatikan,¹ dan dianalisis secara sistematis, sehingga tidak menyebabkan kesenjangan dalam berbagai bidang kehidupan manusia.

Maksud istilah hukum Islam dalam lembaga Peradilan Agama adalah hukum yang diyakini memiliki keterkaitan dengan sumber dan ajaran Islam, yaitu hukum amali berupa interaksi sesama manusia, selain jinayat (pidana Islam).² Segala ketentuan yang berhubungan dengan ibadah murni (*maḥḍah*) tidak termasuk dalam pengertian hukum Islam, tetapi dalam wilayah syari'ah (diuraikan pada pembahasan berikut). Tetapi yang dimaksudkan adalah hukum perdata Islam tertentu (kini menjadi perkara tertentu) yang menjadi hukum positif bagi umat Islam, sekaligus merupakan hukum terapan bagi lembaga Peradilan Agama. Jika rancangan undang-undang hukum pidana yang sedang digodok di DPR disahkan menjadi undang-undang, maka hukum pidana Islam itu merupakan bagian dari kewenangan lembaga Peradilan Agama di Indonesia.

Negara Republik Indonesia, sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

¹Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam & Pluralitas Sosial* (Cet. I; Jakarta: Penamadani, 2004), h. 5.

²Amrullah Ahmad, dkk., *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 53.

Indonesia Tahun 1945, bertujuan mengimplementasikan dan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, damai, dan tertib. Untuk mewujudkan tata kehidupan tersebut dan menjamin persamaan kedudukan warga negara dalam hukum, maka diperlukan upaya untuk menegakan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat.

Untuk mendapatkan keadilan, diperlukan suatu peraturan atau perundang-undangan untuk mengatur susunan, kekuasaan, dan hukum acara dalam lingkungan peradilan di Indonesia. Salah satu di antaranya adalah Peradilan Agama yang merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di negara kesatuan Republik Indonesia yang mempunyai undang-undang tersendiri, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama memberikan pengertian, bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam, mengenai perkara perdata tertentu.³ Namun dalam revisi pertama yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa pengertian Peradilan Agama berubah menjadi: Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.⁴ Revisi pertama undang-undang tersebut memberikan peluang bagi Peradilan Agama untuk memperluas wilayah absolutnya, karena dari kalimat “mengenai perkara perdata

³Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, pasal 2. Lihat pula H. Zain Badjeber dan Abdul Rahman Saleh, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Komentar* (Jakarta: Pustaka Amani, 1990), h. 3.

⁴Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, pasal 2.

tertentu” menjadi “perkara tertentu”, satu kata dihilangkan yakni “perdata”.

Dihilangkannya kata “perdata” berarti kewenangan Peradilan Agama dapat diperluas ke perkara pidana, misalnya perkara tentang kekerasan dalam rumah tangga (KdRT). Tidak menutup kemungkinan hal tersebut dapat terwujud, tergantung konstalasi politik, baik dalam wilayah lembaga kekuasaan pemerintahan (lembaga eksekutif) maupun dalam lembaga legislatif dan yudikatif. Peran wakil-wakil rakyat umat Islam yang sangat menentukan termasuk umat Islam yang masuk dalam kabinet pemerintahan.

Secara umum para penulis sejarah hukum Islam memasukan hukum Islam sebagai materi lembaga Peradilan Agama yang telah mengadakan pembagian tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangannya ke dalam lima masa:

- 1) masa Nabi Muhammad saw. (610 M-632 M);
- 2) masa khulafā al-rāsyidūn (632 M-662 M);
- 3) masa pembinaan, pengembangan, dan pembukuan (abad ke-7 sampai abad ke-10 M);
- 4) masa kelesuan pemikiran (abad ke-10 sampai abad ke-19 M);
- 5) masa kebangkitan kembali (abad ke-19 M sampai sekarang).⁵

Pada sumber lain, dijelaskan bahwa sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam sebagai wilayah lembaga Peradilan Agama, melalui enam periode, yakni:

- 1) periode Rasūlullāh saw.;
- 2) periode khulafā al-rāsyidūn;
- 3) periode setelah khulafā al-rāsyidūn sampai awal abad ke-2 H;
- 4) periode awal abad ke-2 H sampai pertengahan abad ke-4 H;
- 5) periode pertengahan abad ke-4 H sampai jatuhnya kota Bagdad; dan
- 6) periode jatuhnya kota Bagdad sampai sekarang.⁶

⁵Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Edisi Keenam (Cet. IX; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), h. 139.

⁶Syekh Muhammad Ali As-Sayis, *Tārikh al-Fiqh al-Islāmi* diterjemahkan oleh Dedi Junaedi dan Hamidah dengan judul *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan*

Kedua pembagian waktu tersebut, secara substansial adalah sama, karena sejarah pembentukan dan perkembangan hukum Islam diawali dari masa Nabi Muhammad saw. sampai sekarang, termasuk di Indonesia.

B. Sistem Hukum Peradilan

Selain sejarah sosial Peradilan Islam yang perlu diketahui untuk perkembangan hukum Islam, juga sistem hukum itu sendiri. Perkembangan sistem dunia hukum internasional, ada lima sistem hukum yang masih hidup (*living law*) . Kelima sistem hukum tersebut adalah:

- (a) sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law*) yakni pemberlakuan undang-undang secara konsisten, umumnya diberlakukan di negara-negara seperti Perancis, Jerman, Belanda, termasuk Indonesia;
- (b) sistem hukum Anglo Saxon (*common law*) yakni pemberlakuan putusan-putusan pengadilan (juriprudensi) seperti negara Amerika, Inggris;
- (c) sistem hukum Sosialis Komunis diberlakukan untuk kepentingan penguasa seperti negara Rusia, Cina;
- (d) sistem hukum Adat (*adattrecht*) yakni kebiasaan-kebiasaan yang telah berakar dalam masyarakat seperti negara Jepang, Indonesia;
- (e) sistem hukum Islam seperti negara Arab, Indonesia, dan beberapa negara Islam di benua Asia.

Kelima sistem hukum tersebut menggambarkan bahwa sistem hukum dalam dunia peradilan adalah pluralis. Sistem hukum yang pluralis ini tidak hanya di belahan dunia Barat dan Eropa, tetapi juga terjadi di dalam negara-negara Asia termasuk negara Republik Indonesia. Dengan sistem hukum yang pluralis inilah melahirkan rekonstruksi hukum, sehingga masyarakat Indonesia khususnya ilmuwan diharuskan untuk dapat memacu diri dalam perkembangan hukum di Indonesia, khususnya dalam dunia peradilan.

Indonesia sebagai negara hukum, perkembangan sistem hukum peradilan nasional bersumber dari sistem hukum adat, sistem hukum Barat, dan sistem hukum Islam. Kalau dilihat dan diteliti dengan cermat, sistem hukum Islamlah yang banyak mengalami perkembangan dengan pesat, karena itu lembaga Peradilan Agama kedudukannya telah setara dengan lembaga-lembaga peradilan lainnya.

Akibat dari perkembangan sejarah hukum, maka sistem hukum dalam peradilan di Indonesia bersifat majemuk. Kemajemukan itu merupakan corak dari sistem hukum yaitu sistem hukum Adat, sistem hukum Barat, dan sistem hukum Islam. Ketiga sistem hukum tersebut diakui di dalam lembaran Negara Republik Indonesia, karena masih dipatuhi masyarakat Indonesia menurut sistem hukum yang berlaku pada suatu daerah atau penganut agama. Sistem-sistem hukum tersebut diakui oleh konstitusi dan diatur dalam tata peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai perwujudan lembaga peradilan di Indonesia, tak terkecuali lembaga Peradilan Agama.

Khusus pengembangan hukum Islam dalam lembaga Peradilan Agama di Indonesia sangat konstitusional karena dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana yang termaktub dalam pasal 29:

- (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa;
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.⁷

Konstitusi dari ayat (1) tersebut merupakan hal yang sangat penting bagi lembaga Peradilan Agama di Indonesia karena itu, pasal tersebut merupakan Kepala Putusan Pengadilan, yakni “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Kalimat tersebut mendapat perhatian pada pasal 29, yakni rumusannya tidak pernah diubah walaupun Undang-Undang Dasar

⁷Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (pasal 29 tidak diamandemen).

RI Tahun 1945 sudah empat kali diamandemen yakni tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002. Tafsiran ilmiahnya yang terkandung dalam pasal tersebut antara lain:⁸

- 1) Wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, tidak boleh terjadi atau berlaku sesuatu yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam atau kaidah-kaidah agama lain yang diakui di negara republik ini;
- 2) Negara Republik Indonesia wajib menjalankan syari'at Islam bagi pemeluknya, demikian halnya dengan pemeluk agama lain wajib menjalankan menurut ajaran agamanya.
- 3) Syari'at yang tidak memerlukan bantuan kekuasaan negara dijalankan oleh setiap pemeluk agama yang bersangkutan, menjadi kewajiban pribadi terhadap Tuhan menurut keyakinan agamanya.

Kedua ayat dari pasal 29 UUD Negara RI Tahun 1945 tersebut dapat dipahami bahwa pemberlakuan dan pengembangan Peradilan Agama yang menganut hukum Islam di Indonesia adalah berdasarkan konstitusi. Atas dasar konstitusi tersebut, rekonstruksi lembaga Peradilan Agama di Indonesia dapat dianalisis berdasarkan teori-teori hukum yang diberlakukan di Indonesia.

Selain atas dasar konstitusi tersebut, lembaga Peradilan Agama dalam pemberlakuan dan pengembangannya juga didasari atas formal yuridis, alasan sejarah, dan tuntutan masyarakat dari berbagai daerah di tanah air. Dengan adanya lembaga Peradilan Agama di Indonesia, maka hukum Islam merupakan istilah yang dikembangkan dan telah dibakukan di Indonesia, ia merupakan peraturan-peraturan yang diambil dari wahyu dan diformulasikan ke dalam produk-produk pemikiran hukum. Produk pemikiran hukum tersebut adalah fikih, fatwa ulama, yurisprudensi, dan undang-undang, serta dapat juga dikembangkan melalui produk teori sosiologi hukum. Sosiologi hukum dapat mengantar manusia untuk lebih memahami

⁸Muhammad Amin Summa, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia* (Cet. I; Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 3.

pertumbuhan dan perkembangan lembaga Peradilan Agama di Indonesia yang tidak bertentangan dengan kehidupan masyarakat.

Atas dasar konstitusi/formal yuridis, sejarah, dan konvensi masyarakat Indonesia, maka rekonstruksi pengembangan, khususnya materi hukum Islam dalam Peradilan Agama di Indonesia dapat diterapkan secara berkesinambungan. Hal ini dapat diterapkan dan dilaksanakan di Indonesia karena pengembangannya ke depan yang lebih mengarah kepada pelaksanaan syari'at Islam. Terbukti dengan penerapan syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam serta munculnya gagasan pemberlakuan syari'at Islam dari provinsi dan kabupaten/kota lainnya.

Hukum Islam dalam Peradilan Agama di tanah air telah dikembangkan setelah melalui lintas sejarah yang panjang, terutama pada fase kesultanan, zaman penjajahan Belanda, dan penjajahan Jepang, kemudian pada masa kemerdekaan yang diisi ke dalam tiga orde yang disebut dengan orde lama, orde baru dan orde reformasi.

Peradilan Agama dalam pengembangannya lebih meluas dan mengikat di era reformasi ini yang didasari oleh penyatuan atap lembaga-lembaga peradilan pada lembaga Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dengan demikian pengembangan materi hukum Islam itu tidak hanya pada perkawinan, kewarisan, dan wakaf, tetapi kini sedang memasuki materi yang lebih luas, termasuk ekonomi syari'ah yang meliputi banyak aspek bisnis yang diatur berdasarkan prinsip syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Materi lembaga Peradilan Agama yang merupakan amanat Undang-Undang Peradilan Agama adalah menyangkut perkara tertentu. Perkara tertentu ini memerlukan analisis yang serius, sehingga perkara tertentu itu jelas dan dapat dipahami secara menyeluruh, baik para pelaku lembaga Peradilan Agama maupun kepada masyarakat luas. Lembaga Peradilan Agama merupakan sebuah institusi yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan perkara-perkara bagi umat Islam dalam bidang perkara tertentu. Perkara tertentu yang dimaksudkan di atas, dapat dikembangkan lebih

luas seperti penyelesaian sengketa pidana tertentu oleh Pengadilan Khusus di bawah kekuasaan lembaga Peradilan Agama.

C. Gambaran Rekonstruksi Perkara Tertentu

Buku ini adalah membahas tentang Peradilan Agama di Indonesia terkhusus pada pengembangan perkara tertentu, perlu dipahami pengertian dari materi tersebut, baik secara etimologi maupun secara terminologi.

Secara umum dijelaskan bahwa materi tersebut memberi pengertian tentang gambaran lembaga Peradilan Agama dan pengembangan perkara tertentu, terutama materi hukum bagi umat Islam yang diberlakukan di Indonesia. Materi hukum Islam tersebut diwujudkan dalam suatu hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya lembaga Peradilan Agama, sejak fase kesultanan, zaman penjajahan, masa kemerdekaan, hingga era reformasi saat ini. Definisi operasional ini memberikan gambaran singkat tentang substansi buku ini.

1. Rekonstruksi

Secara etimologis, rekonstruksi berarti proses, cara, perbuatan membarui: sudah banyak dibahas mengenai cara berpikir masyarakat.⁹ Kata rekonstruksi berasal dari bahasa Inggris (*reconstruction*) yang berarti pembangunan kembali.¹⁰ Dapat juga diartikan sebagai pengembalian sesuatu, perumusan dan/atau penyusunan kembali kepada sumbernya. Mengenai pengertian rekonstruksi secara terminologi dalam arti fisik, adalah:

pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya

⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi Ketiga, Cei. I; Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 108.

¹⁰John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Cet. XX; Jakarta: PT. Gramedia, 1992), h. 471.

peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.¹¹

Rekonstruksi yang dimaksudkan adalah kecenderungan untuk mengelompokkan hukum yang sama ke dalam hukum Islam menjadi hukum nasional atau menjadi hukum perundangan-undangan negara. Hal ini dimaksudkan bahwa hukum Islam dalam Peradilan Agama diakui sebagai suatu sistem hukum nasional yang melekat pada masyarakat Indonesia, terkhusus masyarakat Islam. Karenanya yang dimaksudkan rekonstruksi dalam buku ini adalah menyangkut kewenangan hakim termasuk materi hukum Peradilan Agama pascaperubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Materi hukum yang dimaksudkan adalah dari perkara perdata tertentu direkonstruksi menjadi perkara tertentu, yang kemudian perkara tertentu diharapkan selain materi hukum Islam dan ekonomi syari'ah tersebut dapat dikembangkan menjadi perkara pidana tertentu, termasuk penanganan pada kasus terorisme yang pemahamannya ingin menegakan dan menjalankan syari'at Islam dengan cara melakukan pembunuhan, pemboman dengan cara mengatasnamakan syari'at Islam.

2. Lembaga Peradilan Agama

Lembaga Peradilan Agama merupakan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan adanya penyatuan atap dalam lembaga Mahkamah Agung, maka kedudukan lembaga Peradilan Agama telah sejajar dengan lembaga-lembaga peradilan lainnya.

Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dijelaskan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan

¹¹Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), h. 16.

kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.¹² Undang-undang revisi pertama ini menjelaskan bahwa perkara perdata tertentu menjadi perkara tertentu. Kalimat ini memberikan isyarat penafsiran, dan salah satu di antaranya bahwa lembaga Peradilan Agama berpeluang untuk menangani kasus selain keperdataan, karena tidak dicantumkan lagi kata perdata. Hilangnya kata perdata pada teks revisi undang-undang tersebut, berarti pengembangan materi perkara pada lembaga Peradilan Agama di Indonesia semakin meluas perkaranya, termasuk ekonomi syari'ah dan perkara-perkara lainnya. Materi perkara pada lembaga Peradilan Agama yang diamanahkan oleh undang-undang, memerlukan tenaga yang andal dan berkualitas, terutama pada pengembangan perkara tertentu pada Peradilan Agama.

3. Pengembangan perkara tertentu

Pengembangan materi yang dimaksudkan adalah materi hukum Islam yang tidak saja menyangkut perkawinan, kewarisan, dan perwakafan, tetapi dikembangkan pada materi hukum lain seperti ekonomi syari'ah. Materi ekonomi syari'ah tersebut meliputi bank syari'ah; lembaga keuangan mikro syari'ah; asuransi syari'ah; reasuransi syari'ah; reksa dana syari'ah; obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah; sekuritas syari'ah; pembiayaan syari'ah; pegadaian syari'ah; dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan bisnis syari'ah. Materi ini menjadi kewenangan lembaga Peradilan Agama.

Kewenangan Peradilan Agama dalam perkara tertentu akan semakin luas dengan adanya amandemen kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pada amandemen pertama, kewenangan Peradilan Agama dalam undang-undang tersebut salah satu yang mendasar adalah dari perkara perdata tertentu menjadi perkara tertentu. Kata “perdata”

¹²Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, pasal 2. Bunyi pasal 2 ini hasil amandemen pertama.

dihilangkan, berarti memungkinkan untuk menangani selain perkara perdata.

Negara Indonesia sebagai negara hukum, dikenal istilah hukum Islam yang diyakini memiliki keterkaitan dengan sumber dan ajaran Islam, yaitu hukum amali berupa interaksi sesama manusia, selain jinayat (pidana Islam).¹³ Karena itu pengembangan materi hukum dalam perkara Peradilan Agama adalah menyangkut hukum Islam yang merupakan peraturan-peraturan yang bersumber dari wahyu dan diformulasikan ke dalam produk pemikiran hukum terutama undang-undang, khususnya yang menyangkut: (1) hukum perkawinan; (2) hukum kewarisan, wasiat, dan hibah; (3) hukum perwakafan dan *shadaqah*; (4) zakat; (5) infak; dan (6) ekonomi syari'ah. Poin (1), (2), dan (3) merupakan materi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Sedangkan poin (4), (5), dan (6) merupakan materi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai hasil rekonstruksi materi undang-undang tersebut.

Keenam materi perkara tertentu tersebut, ekonomi syari'ah yang mendapat peluang dalam pengembangan hukum Islam di Indonesia sebagai materi hukum baru pada Peradilan Agama. Selanjutnya dapat dikembangkan ke ranah perkara pidana tertentu, sehingga dapat membentuk Pengadilan Khusus untuk menyelesaikan perkara pidana khusus. Bahkan lebih dari itu, dapat dikembangkan pada penanganan kasus pidana terorisme yang nota bene pelakunya ingin memperjuangkan dan menegakan syari'at Islam di Indonesia.

Materi hukum Islam itu adalah menyangkut hukum keluarga, baik yang menyangkut hukum perkawinan, hukum kewarisan, hukum perwakafan, maupun hukum keluarga lainnya terutama ekonomi syari'ah. Akan tetapi materi pengembangan perkara tertentu selain

¹³Amrullah Ahmad dkk., *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 53. Namun dalam pembahasan tulisan ini hukum pidana Islam merupakan bagian dari konsep untuk menjadi materi perkara tertentu pada lembaga Peradilan Agama ke depan.

istilah buku I, buku II, dan buku III tersebut, juga diistilahkan dengan buku I membahas tentang perkawinan, buku II membahas tentang hukum kewarisan, dan buku III membahas tentang perwakafan.

Ketiga buku tersebut merupakan kewenangan lembaga Peradilan Agama dan masuk pada materi hukum Islam. Materi tersebut direkonstruksi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (revisi pertama). Materi hukumnya dari perkawinan; kewarisan, wasiat, dan hibah; serta wakaf dan sedekah berubah dan bertambah menjadi: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syari'ah. Tambahannya sebagai materi pada pengembangan perkara tertentu dalam hukum Islam adalah zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syari'ah.

D. Kajian Pakar Hukum Islam tentang Peradilan

Setelah penulis menelusuri dan membaca berbagai tulisan pustaka, berkonsultasi dengan pihak akademisi dan beberapa praktisi, penulis tidak menjumpai pembahasan tentang judul tulisan “Fikih Peradilan di Indonesia: Rekonstruksi Perkara Tertentu”. Kebanyakan tulisan memuat tentang hukum Islam di Indonesia dan tulisan tentang Peradilan Agama secara umum.

Hukum Islam di Indonesia sebagai bagian dari materi pengembangan pada lembaga Peradilan Agama merupakan bagian dari kajian perkembangan sejarah sosial hukum Islam. Kajian tentang sejarah sosial hukum Islam mulai dirintis di Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 1992. Namun sebelumnya telah ditulis oleh T.M. Hasbi ash-Shiddieqy berjudul *Pengantar Ilmu Fikih*. T.M. Hasbi ash-Shiddieqy dikenal sebagai tokoh ahli dalam hukum Islam, menguraikan tentang sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia hingga mencapai puncak kejayaannya. Hukum Islam dalam bidang muamalah, kekeluargaan, jinayat, siyasah, bahkan hukum internasional, dan semacamnya selalu mengalami perubahan, tergantung adat-istiadat dari keadaan sosial kemasyarakatan. Masalah yang tidak mengalami perubahan adalah

menyangkut ibadah. Buku Hasbi dengan judul *Peradilan dan Hukum Acara Islam* membahas tentang sejarah peradilan Islam, ketentuan hukum sekitar hakim dan peradilan, kekuasaan yang berwenang dalam bidang hukum selain hakim, hukum acara Islam, dan juga dimuat tentang biografi para hakim Islam terkenal.

Abdul Wahhab Khallaf, *Perkembangan Sejarah Hukum Islam* yang dialihbahasakan oleh Ahyar Aminuddin menyatakan, bahwa pada tahun 1936 Masehi, pemerintah membentuk lembaga yang beranggotakan ulama dan ahli hukum positif untuk membuat undang-undang yang mengatur berbagai hukum keluarga. Pendapat dirangkum dari berbagai mazhab dengan isyarat supaya tidak terikat dengan satu pendapat mazhab yang disesuaikan dengan kemaslahatan dan perkembangan kehidupan sosial.

Muhammad Daud Ali, *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia* (2000) berkesimpulan bahwa kini di Indonesia hukum Islam dapat berlaku langsung tanpa harus melalui hukum adat. Republik Indonesia wajib mengatur sesuatu masalah sesuai dengan hukum Islam, sepanjang diberlakukan bagi umat Islam. Kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional adalah sama dan sederajat dengan hukum adat dan hukum Barat. Oleh karenanya, hukum Islam menjadi sumber bagi pembentukan hukum nasional di samping hukum lainnya yang tumbuh dan berkembang di Indonesia.

Amir Mu'alim dan Yusdani dalam buku *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* (2001) menguraikan kecenderungan hukum di dunia muslim dewasa ini terbagi tiga sistem. *Pertama*, mempertahankan berlakunya hukum Islam secara utuh; *kedua*, mengganti hukum Islam dengan hukum sekuler; dan *ketiga*, mengkompromikan kedua sistem hukum tersebut. Lebih lanjut dijelaskan bahwa hukum Islam juga dipahami sebagai refleksi tata nilai yang diyakini masyarakat sebagai pranata sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Juhaya S. Praja dalam bukunya *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek* (1991) menyimpulkan bahwa makna hukum Islam itu bukan sebagai kode melainkan sebagai mode. Artinya umat

Islam senantiasa berpedoman kepada sumber hukum, yaitu Al-Qur'an dan hadis. Untuk menjalankan hukum Islam tidak perlu diperintahkan secara formal berdasarkan undang-undang, tetapi melaksanakan dengan kesadaran yang ikhlas dan bertanggung jawab. Hukum yang akan ditegakkan itu bukan berdasarkan hukum tertulis walaupun tidak diabaikan, melainkan hukum berdasarkan nilai moral dan akhlak yang mulia.

K.N. Sofyan Hasan dan Warkum Sumitro, *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia* (1994), bahwa membicarakan hukum Islam di Indonesia tidak boleh diabaikan dengan lembaga Peradilan Agama. Telah disadari bahwa hukum Islam dan Pengadilan Agama dalam masyarakat Indonesia telah mengakar dan kuat, sehingga pengembangan ke depan akan lebih terbuka.

Kemudian Ahmad Rofiq dalam buku *Hukum Islam di Indonesia* (1995) membahas tentang hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum perwakafan. Demikian halnya dengan sumber lain umumnya membahas tentang ketiga hukum tersebut, yaitu perkawinan, kewarisan, dan perwakafan yang merupakan bagian dari materi hukum Islam di Indonesia sebagai kewenangan lembaga Peradilan Agama.

Taufik Adnan Amal dalam buku *Rekonstruksi Sejarah al-Qur'an* (2001) membahas tentang asal-usul dan pewahyuan al-Qur'an, pengumpulan al-Qur'an, stabilisasi teks dan bacaan al-Qur'an. Hubungan buku dengan buku ini terdapat pada teks judul tentang rekonstruksi. Buku tersebut membahas tentang rekonstruksi sejarah al-Qur'an dan buku ini membahas rekonstruksi lembaga Peradilan Agama di Indonesia.

Ahmad Mujahidin, seorang doktor dalam bidang hukum Islam sebagai praktisi (hakim) pada lembaga Peradilan Agama dalam bukunya *Peradilan Satu Atap di Indonesia* (2007) membahas berbagai masalah dalam lembaga Peradilan Agama. Pembahasan yang mempunyai hubungan dengan tulisan ini adalah pembaruan lembaga peradilan, independensi dan akuntabilitas penerapan sistem peradilan

satu atap, sejarah lembaga peradilan, reformasi hukum, penerapan dan pembenahannya pada lembaga peradilan di Indonesia.

Roihan A. Rasyid dalam buku *Hukum Acara Peradilan Agama* (1995) membahas masalah sumber hukum acara, kekuasaan, permohonan dan gugatan, pemeriksaan dan pembuktian, dan produk Peradilan Agama. Bagian awalnya membahas tentang Peradilan Agama dan Peradilan Islam, hukum acara perdata pada Peradilan Umum dan Peradilan Agama, susunan badan peradilan di Indonesia. Bagian kedua membahas tentang sumber hukum acara Peradilan Agama. Bagian ketiga membahas tentang kekuasaan relatif dan absolut Peradilan Agama. Bagian keempat dan kelima membahas tentang gugatan dan permohonan, bagian keenam dan ketujuh membahas tentang perkara dan pemeriksaan. Bagian kedelapan membahas tentang pembuktian, bagian kesembilan tentang produk Pengadilan Agama yang berisi putusan dan penetapan. Bagian kesepuluh membahas tentang penyitaan, pengukuhan, dan eksekusi. Bagian kesebelas membahas tentang verzet (perlawanan terhadap putusan verstek), banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia: dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut* (2008) memuat tentang kekuasaan kehakiman dan undang-undang peradilan, sejarah, susunan hirarki, wewenang, tata cara berperkara, produk hukum, dan upaya hukum putusan lembaga Peradilan Agama.

Cik Hasan Bisri dalam *Peradilan Agama di Indonesia* (1998) menguraikan tentang kelembagaan peradilan, Peradilan Agama sebagai objek kajian, kelembagaan, susunan, kekuasaan, hukum acara, produk, dan prospek Peradilan Agama. Muhammad Salam Madkur dalam buku *Peradilan dalam Islam* menguraikan tentang pembinaan, syarat pengangkatan dan pemberhentian menjadi hakim, mengenai materi sidang dan putusannya, dan hukum-hukum peradilan untuk golongan non muslim. Daniel S. Lev dalam buku *Peradilan Agama Islam di Indonesia* membahas tentang politik kolonial dan pengaruhnya terhadap evolusi Pengadilan Agama Islam, kelangsungan perluasan dan sentralisasi, pembinaan tenaga organisasi dan prosedurnya, fungsi dan perubahan Peradilan Agama.

Imam Syaukani membahas tentang *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya bagi Pembangunan Hukum Nasional* (2006) menguraikan masalah: reformasi hukum Islam di Indonesia dari Arabisme ke Indonesianisme, *uṣūl al-fiqh* sebagai epistemologi hukum Islam, epistemologi hukum Islam Indonesia dari dekonstruksi ke rekonstruksi, dan epistemologi hukum Islam Indonesia relevansi dan aplikasi dalam kasus pencatatan perkawinan dan kasus hukum pidana Islam.

Ahmad Mujahidin dalam buku *Peradilan Satu Atap di Indonesia* (2007) membahas tentang pembaruan lembaga peradilan yang mendeskripsikan peradilan satu atap di Indonesia. Buku ini juga membahas independensi dan akuntabilitas penerapan sistem peradilan satu atap, solusi dan pembenahannya.

Kajian atau tinjauan pustaka di atas belum ada yang membahas tentang rekonstruksi lembaga Peradilan Agama di Indonesia terkhusus pada studi analisis pengembangan perkara tertentu. Oleh karena itu diperlukan suatu tulisan yang membahas hal tersebut di atas, terkhusus materi pengembangan perkara tertentu termasuk pidana khusus.

Landasan yuridis formal dalam kerangka teoretis, merupakan rumusan-rumusan yang dibuat berdasarkan proses berpikir deduktif. Proses berpikir ini adalah untuk menghasilkan konsep atau proposisi (rancangan usulan) baru dalam tulisan dan penulisan buku ini yang disertai dengan ilmu pengetahuan. Orang yang beriman dan berilmu pengetahuan mempunyai kedudukan tempat dan derajat yang tinggi, sebagaimana firman Allah dalam QS al- Mujādilah/58: 11

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ
اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ آنشُرُوا فَآنشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا
الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: "berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu, dan apabila dikatakan: "berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antarmu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹⁴

Demikian pula Allah membedakan antara orang-orang yang mengetahui dan yang tidak mengetahui. Orang yang mengetahui pastilah ia berakal, dan orang yang berakal akan menerima suatu pelajaran, sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. al- Zumar/39: 9

... قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولَٰئِكَ

الْأَلْبَابِ

Terjemahnya:

... Katakanlah: "adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.¹⁵

Kaitannya dengan rekonstruksi Peradilan Agama, diperlukan sebuah teori untuk mendapatkan kajian teori ilmiah yang dilandasi dengan nilai-nilai Islam agar dapat menerangkan kepada umat manusia dengan baik. Allah berfirman dalam QS al-Nahl/16: 44

... وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٤﴾

Terjemahnya:

¹⁴Khadim al-Haramain asy-Syarifain al-Sa'ud, (Pelayan kedua Tanah Suci) Raja Fahd ibn 'Abd. al-'Aziz. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Madinah al-Munawwarah: Kementerian Agama Islam, Wakaf, Da'wah, dan Irsyad Kerajaan Saudi Arabia, yang menaungi Mujamma' Malik Fahd li Thiba'at al-Mush haf Asyysarif Komplek Percetakan al-Qur'anul Karim Kepunyaan Raja Fahd, 1418 H) h. 910-911.

¹⁵*Ibid.*, h. 747.

... Dan Kami turunkan kepadamu al- Qur'an, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan.¹⁶

Menerangkan kepada umat manusia yang dimaksudkan adalah: perintah-perintah, larangan-larangan, aturan dan lain-lain yang terdapat dalam al-Qur'an, termasuk dalam hukum dan perundang-undangan. Perundang-undangan sebagai bagian dari hukum Islam yang merupakan bagian materi pada lembaga Peradilan Agama, mengalami rekonstruksi dalam pengembannya, materi perkara tertentu.

F. Teori-teori Pemberlakuan Hukum

Sebuah konstruksi teoretis, teori hukum telah mengoperasikan dan menghadirkan sebuah substruktur yang secara keseluruhan terkait oleh proposisi perintah suci yang bersumber dari wahyu. Proposisi ini tidak dapat diubah dan tidak ada interpretasi atau manipulasi intelektual yang dapat mengubah pokok-pokok yang mendasari atau dugaan yang dapat mempengaruhi substansinya. Teori ini disebut sebagai kesinambungan teoretis atau teori kesinambungan.¹⁷

Teori kesinambungan ini tidak akan berubah, sekalipun situasi dan kondisi menginginkan untuk berubah, teori ini tetap konstan, karena ia merupakan proposisi perintah wahyu. Berdasar dari teori kesinambungan ini, maka kerangka teoretis dalam tulisan ini dikembangkan ke dalam tiga teori, yakni: teori pemberlakuan hukum; teori eklektisitas (*eclecticism*); dan teori unifikasi (*unification*) hukum.

Teori pemberlakuan hukum sebagai hukum nasional, telah melalui beberapa teori yang berkenaan dengan pemberlakuan hukum Islam di Indonesia. Teori-teori yang dimaksudkan antara lain adalah: teori *syahadat/kredo*, teori *receptio in complexu*, teori *receptie*, teori *receptie exit*, teori *receptio a contrario*, dan teori *eksistensi*.

¹⁶*Ibid.*, h. 16.

¹⁷Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam* (Cet. II; Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000), h. 185.

Teori *syahadat/kredo* dalam pemberlakuan hukum Islam di Indonesia merupakan penyaksian dalam memeluk agama Islam yang harus dijalankan dan dipatuhi. Teori tersebut sesuai dengan teori penerimaan otoritas hukum Islam yang dijelaskan oleh AR. Gibb dalam bukunya *The Modern Trends in Islam* yang dikutip A. Rahmat Rosyadi dan M. Rais Ahmad. Teori ini menegaskan bahwa orang-orang Islam menaati hukum Islam karena diperintahkan oleh Allah dan rasul-Nya.¹⁸

Oleh karena itu, apabila masyarakat telah menerima Islam sebagai agamanya, maka secara otomatis akan menerima otoritas hukum Islam terhadap dirinya. Bagi orang Islam, hukum Islam adalah kehendak dan perintah Allah melalui wahyu sebagai risalah rasul-Nya. Teori *krido* atau teori *syahadat* yaitu teori yang mengharuskan pelaksanaan hukum Islam oleh orang yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai konsekuensi logis dari pengucapan kridonya. Pengucapan syahadat atau membaca dua kalimat syahadat merupakan ikrar seseorang untuk mengaku dan bersumpah dalam memeluk agama Islam sebagai agama yang diyakini kebenarannya.

Seseorang umat muslim dalam menjalankan syari'at Islam merupakan suatu kewajiban baginya dilaksanakan dengan penuh kesadaran kendatipun berawal dari perintah raja/sultan. Namun demikian, lambat laun masyarakat muslim dengan penuh kesadaran, hukum-hukum agama Islam dilaksanakan dengan baik, selanjutnya turun-temurun kepada keluarga masyarakat muslim lainnya.

Teori *receptio in complexu*, teori *receptie*, dan teori *receptie exit* merupakan teori yang berlaku pada zaman VOC, penjajah Belanda mengakui hukum Islam di Indonesia sejak tahun 1855. Penjajah Belanda mempertegas pengakuan terhadap pemberlakuan hukum Islam di Indonesia, yang diperkuat oleh Londewijk Willem Christian

¹⁸A. Rahmat Rosyadi dan M. Rais Ahmad, *Formalisasi Syari'at Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Ghaliah Indonesia, 2006), h. 74.

van den Berg dengan teori *receptio in complexu*, yang memberi kebebasan bagi pemeluk agama di Indonesia.¹⁹

Pemberlakuan teori *receptio in complexu* adalah teori yang mempertegas bahwa setiap penduduk berlaku hukum agamanya masing-masing. Bagi penduduk yang beragama Islam tentu diberlakukan padanya hukum Islam. Bagi penduduk yang beragama non muslim diberikan kepadanya untuk memberlakukan hukum agamanya. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29: (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Adanya teori *receptio in complexu* ini disebabkan kesadaran masyarakat akan taat kepada ajaran agamanya. Dengan adanya teori *receptio in complexu*, maka para penganut agama dalam menjalankan ajarannya merasa bebas dan merdeka.

Di balik keberadaan teori *receptio in complexu* ini, ada upaya untuk menentang pemberlakuannya, yakni teori *receptie*. Teori *receptie* ini menegaskan bahwa hukum Islam itu tidak mesti otomatis berlaku bagi pemeluknya. Hukum Islam berlaku bagi pemeluknya apabila sudah diakui dan diterima oleh masyarakat adat serta sudah legal menjadi hukum adat bagi masyarakatnya setempat. Ajaran teori *receptie* ini, memberikan kelonggaran dan tidak menunjukan kepastian hukum. Hukum pun diberlakukan tergantung pada pembuat kebijakan dan aturan.

Karena teori *receptie* dianggap meremehkan hukum Islam, maka para pemimpin Islam bangkit dan menantang teori *receptie*, sehingga muncul teori *receptie exit* (teori yang menantang teori *receptie*-nya Snouck). Perlawanan umat Islam semakin gencar menentang yang mengisyaratkan bahwa berlakunya hukum Islam dengan mengikuti hukum adat, artinya hukum Islam berlaku setelah mendapat legitimasi

¹⁹H. Muchsin, *Masa Depan Hukum Islam di Indonesia* (Surabaya: STIH Iblam, 2004), h. 23.

dari hukum adat. Maka pada tanggal 22 Juni 1945 lahirlah Piagam Jakarta (*the Jakarta Charter*).

Piagam Jakarta lahir setelah panitia kecil yang disebut panitia sembilan mencapai kesepakatan untuk mengkompromikan antara nasionalis Islam dan nasionalis sekuler. Panitia sembilan itu terdiri atas delapan orang di antaranya beragama Islam dan satu orang beragama Kristen. Mereka adalah: Soekarno, Muhammad Hatta, A. A. Maramis, Abikoesno Tjokrosoedjoso, Abdul Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, Achmad Soebardjo, Abdul Wahid Hasjim, dan Muhammad Yamin.²⁰

Komitmen dalam Piagam Jakarta tersebut menguatkan posisi hukum Islam dalam hukum nasional dengan kalimat yang bernuansa Islami yaitu “Ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya.” Namun demikian teori *receptie exit* pun digantikan dengan teori *receptio a contrario* dan teori *eksistensi*.

Pemberlakuan teori *receptio a contrario* ini, semakin meyakinkan umat Islam dalam menjalankan hukum agamanya. Teori ini tetap menghargai dan tidak melarang memberlakukan hukum adat, dengan syarat hukum adat tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Kemudian muncul teori *eksistensi* yang menegaskan bahwa ada hukum Islam dalam hukum nasional.²¹

Menurut Friederich Julius dan Hazairin Tahir Azhary dalam teorinya yang bernama “teori lingkaran konsentris” mengemukakan bahwa betapa eratnya hubungan antara agama, hukum, dan negara.²² Teori ini menghendaki agama, hukum, dan negara tidak dapat

²⁰H. Endang Syaifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945: “Dan Sejarah Konsensus Nasional antara Nasionalis Islami dan Nasionalis Sekuler tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1945-1959”* (Cet. I; Bandung: Pustaka Perpustakaan Salman ITB Kerjasama dengan Lembaga Studi Islam Bandung, 1401 H – 1981 M), h. 26.

²¹Lihat, H. Muchsin, *op. cit.*, h. 25.

²²Ichtiyanto SA, *Prospek Peradilan Agama sebagai Peradilan Negara dalam Sistem Politik Hukum di Indonesia*, dalam Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Cet. I; Jakarta: PP-IKAHA, 1994), h. 258.

dipisahkan dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia yang mempunyai dasar negara yakni Pancasila.

Hukum nasional yang berdasar Pancasila berlaku hukum agama dan toleransi antar umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yakni menyangkut keyakinan agama, ibadah agama, dan hukum agama.²³

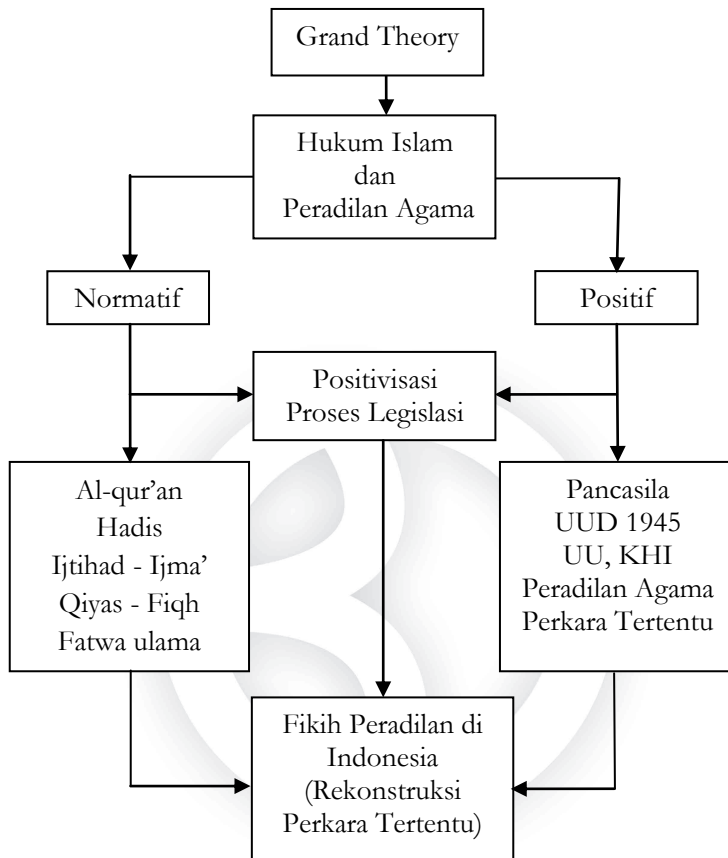
Hukum agama adalah sumber ajaran pokok yang merupakan bagian integral terhadap hukum nasional. Hukum agama (hukum Islam) dan hukum nasional mempunyai hubungan timbal balik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tetapi yang paling tampak adalah bahwa hukum Islam telah lama ada dalam hukum nasional (masuk dalam teori *eksistensi*).

Teori *eksistensi*, Mempunyai arti bahwa eksistensi hukum Islam dalam hukum nasional meliputi, adanya dalam arti:

- 1) hukum Islam berada dalam hukum nasional sebagai bagian yang integral darinya;
- 2) adanya kemandiriannya yang diakui berkekuatan hukum nasional dan sebagai hukum nasional;
- 3) norma hukum Islam berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia;
- 4) sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional Indonesia.

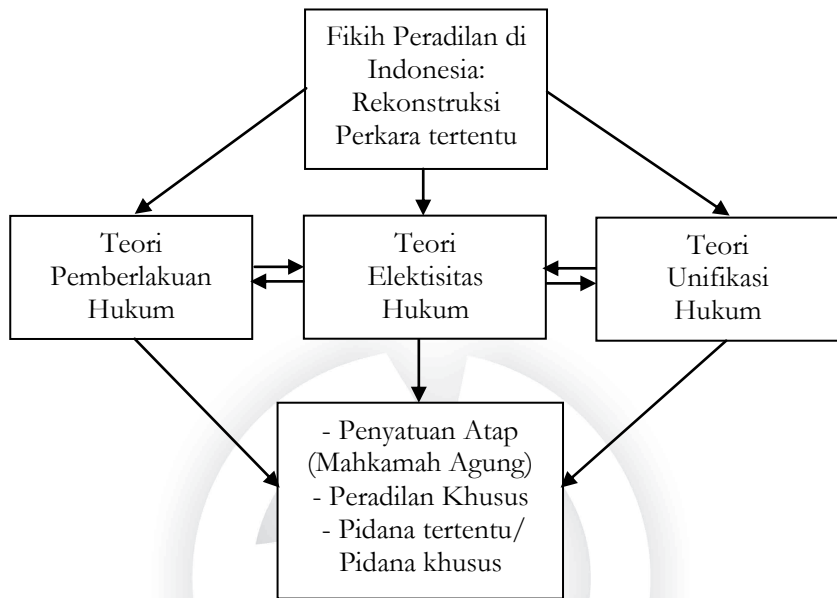
Setelah teori-teori pemberlakuan hukum tersebut, maka teori selanjutnya diteruskan dengan teori eklektisitas hukum dan teori unifikasi hukum. Teori eklektisitas hukum merupakan teori yang menjadikan pencari keadilan untuk menentukan pilihan hukumnya. Sedangkan teori unifikasi hukum merupakan teori penyatuan/ penggabungan pemberlakuan hukum. Dengan demikian dapat dilihat diagram berikut ini sebagai kerangka teoretis dalam “Fikih Peradilan di Indonesia: Rekonstruksi Perkara Tertentu”.

²³Lihat *ibid*.



Berdasarkan *grand theory* tersebut,²⁴ pengembangan perkara tertentu dapat dianalisis berdasarkan teori pemberlakuan hukum pada lembaga Peradilan Agama seperti diagram berikut ini:

²⁴Lihat pula, H.M. Arfin Hamid, Pemateri pada: *Orientasi Islam untuk Disiplin Ilmu (IDI)*, di Kampus 2 UIN Alauddin Makassar, Rabu 23 Oktober 2013.





BAB II

HUKUM ISLAM DI INDONESIA

A. Syari'ah dan Fikih

Menyangkut hukum Islam sebagai materi hukum dalam lembaga Peradilan Agama di Indonesia, selalu terkait dengan istilah syari'ah dan fikih, serta hukum Islam itu sendiri. Oleh karena itu diperlukan pengertian berdasarkan pendekatan istilah Indonesia.

Syari'ah dalam pengertian bahasa mempunyai arti yang banyak. Penulisan syari'ah dalam bahasa Indonesia ada tiga bentuk yakni: sariat menunjuk syariat, dan syariah menunjuk syariat. Tetapi dalam penulisan sub bab buku ini penulis menggunakan kata syari'ah, walaupun kata lain masih dicantumkan sebagai bahan bahwa kesemuanya adalah sama artinya (sinonim). Kata syari'ah (sariat, syariah, syariat), semuanya telah baku dalam bahasa Indonesia. Syari'ah secara leksikal berasal dari lafal verba Arab: شَرَعَ – يَشْرَعُ – شَرْعًا – yang ditransliterasikan ke dalam bahasa Indonesia, penulisannya menjadi *syari'ah* adalah *ṣiḡat mubālagah* dari lafal *masyrū'an* yang berarti “*al-ṭarīqah al-mustaqīmah*” atau “*maurid al-māi li al-syārib*” artinya jalan yang lurus atau sumber mata air bagi yang minum.¹ Syari'ah secara terminologi adalah:

وَالشَّرِيعَةُ هِيَ التَّطَبُّعُ الَّذِي شَرَعَهَا اللَّهُ أَوْ شَرَعَ
أَصُولُهَا لِیَأْخُذَ الْإِنْسَانُ بِهَا نَفْسُهُ فِي عِلَاقَتِهِ بِرَبِّهِ وَعِلَاقَتِهِ بِالْمُسْلِمِ وَعِلَاقَتِهِ بِأَجْنِهِ
الْإِنْسَانِ وَعِلَاقَتِهِ بِالْقَوْنِ وَعِلَاقَتِهِ بِالْحَيَاةِ².

Artinya:

¹Minhajuddin, *Syari'ah dan Fikih* (Makassar: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, disampaikan pada Rapat Eduksi Fakultas dirangkaikan dengan Pidato Rekognisi menjelang purnabakti Prof. Dr. H. Minhajuddin, M.A., tanggal 27 Februari 2013), h. 1.

²Maḥmūd Syaltūt, *Al-Islām 'Aqīdah wa Syari'ah*, (Cet. III; Al-Qāri'ah: Dār al-Qalam, 1996), h. 12.

Syari'ah ialah aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah atau ditetapkan pokok-pokoknya agar manusia menggunakannya dengan saudaranya sesama muslim, sesama manusia, dan hubungannya dengan alam serta hubungannya dengan hidup.³

Menurut Al-Munawwir dalam Kamus Arab-Indonesia, syari'ah berarti syari'at, sunnah, hukum, peraturan.⁴

Oleh karena itu, induk dari fikih adalah syari'ah. Pengertian syari'ah dalam bahasa Indonesia, syari'ah disamakan dengan syariat yang artinya isi hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitar berdasarkan al-Qur'an dan hadis.⁵

Pendapat Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin tentang pengertian syari'ah secara leksikal, berarti jalan ke tempat pengairan atau jalan yang harus diikuti, atau tempat lalu air di sungai.⁶ Selanjutnya ia mendefinisikan bahwa syari'ah adalah segala titah Allah yang berhubungan dengan tingkah laku manusia di luar yang mengenai akhlak.⁷

Karena syari'ah merupakan penyebab kehidupan manusia, maka syari'ah itu adalah nama bagi hukum-hukum yang bersifat amaliah manusia dan alam lainnya, dan sumber syari'ah adalah al-Qur'an dan hadis.

Mulanya syari'ah diartikan sebagai agama, namun kemudian syari'ah diartikan dan berfungsi sebagai hukum untuk mengatur hukum amaliah. Perbedaan antara agama dan syari'ah itu hampir tidak dapat dipisahkan. Tetapi kalau dilihat dari segi penggunaannya, maka

³Lihat, *loc. cit.*

⁴Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Ditelaah dan Dikoreksi oleh K.H. Ali Ma'shum dan K.H. Zainal Abidin Munawwir (Cet. XIV; Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 711.

⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III (Cet. I; Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 1115.

⁶Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Cet. I; Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 2. (Pengertian inilah yang banyak digunakan oleh mahasiswa dalam pemahaman tentang syari'ah).

⁷*Ibid.*, h. 3.

perbedaannya cukup jelas. Kalau agama dapat diberlakukan secara universal atau umum, sedangkan syari'ah hanya berlaku secara khusus yakni bagi umat tertentu yang kemungkinannya berbeda dengan umat sebelumnya. Karenanya pengertian syari'ah lebih khusus daripada agama.

Syari'ah merupakan hukum amaliah yang dibawa oleh para rasul dan tentunya setiap rasul berbeda ajaran yang disampaikan kepada umatnya. Syari'ah senantiasa dipengaruhi oleh waktu dan tempat tergantung rasul yang membawanya. Sehingga syari'ah yang dibawa oleh rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad saw. berbeda tetapi melanjutkan dan menyempurnakan syari'ah sebelumnya.

Sedangkan agama dapat diartikan secara universal yang inti dasarnya adalah tauhid yang tidak terpengaruh oleh waktu dan tempat serta situasi dan kondisi apapun. Oleh karena itu, yang namanya tauhid adalah meng-Esa-kan Allah, dan inti dari ajaran agama Islam adalah tauhid, kemudian dalam pelaksanaan ibadah perlu pemahaman secara mendalam yakni melalui fikih.

Istilah fikih dalam penulisan karya tulis mempunyai aneka ragam dalam penulisannya seperti fiqhi, fiqih, fiqh, dan fikih itu sendiri. Namun dalam buku ini yang digunakan adalah “fikih” atau “*fiqh*” sesuai dengan penulisan bahasa Arab dan bahasa Indonesia baku (lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia).

Kata fikih/*fiqh* (فقه) adalah berasal dari verba: فَقَّهَ - يَفْقَهُ - فِقْهًا yang berarti أَلْفَهُمُ الْعَمِيقُ (paham yang dalam).⁸ Sedangkan fikih/*fiqh* (فقه) menurut istilah ulama ialah:

هُوَ الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ مِنْ أَدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

Artinya:

Fikih ialah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang praktis dikeluarkan dari dalil-dalilnya secara terperinci.⁹

⁸Minhajuddin, *Pengembangan Metode Ijtihad dalam Perspektif Fikih Islam* (Makassar: UIN Alauddin Makassar, “Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Fikih/Usul Fikih pada Fakultas Syari'ah dan Hukum”, disampaikan pada Rapat Senat Terbuka Luar Biasa UIN Alauddin Makassar, tanggal 31 Mei 2004), h. 1. Lihat pula, Ahmad bin Muhammad al-Makrī al-Fayūmī, *Al-Miṣḥab al-Munir*, Juz. II (Beirut: Maktabah 'Ilmiyah, t.th.), h. 402.

Demikian pula kata fikih/*fiqh* (فقه) dalam *Kamus Al-Munawwir, fiqh* (فقه) berarti mengerti, memahami,¹⁰ dan secara sederhana menurut bahasa, fikih bermakna tahu dan paham. Menurut istilah, fikih diartikan sama dengan agama yang disyari'atkan Allah untuk para hamba yang melengkapi hukum-hukum agama yang berpautan dengan perkataan, perbuatan, perikatan, dan lain-lain. Sedangkan menurut jumhur fuqaha, fikih diartikan sebagai ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara' yang diperoleh dari dalil-dalil yang *tafşili* yakni dalil-dalil tentang hukum-hukum yang khusus yang diambil daripadanya dengan jalan ijtihad.¹¹ Pada sumber lain, fikih menurut pengertian istilah kebanyakan fuqaha ialah “segala hukum syara' yang diambil dari Kitab Allah swt. dan Sunnah Rasulullah saw. dengan jalan mendalami faham dan penilikan, yakni dengan jalan ijtihad dan istinbat.¹² Fikih merupakan ilmu dasar untuk memahami ajaran Islam termasuk hukum Islam yang dipahami dan diberlakukan di Indonesia. Dengan mengetahui fikih, berarti mengurangi perdebatan tentang masalah khilafiah, artinya toleransi dalam khilafiah dijunjung tinggi.

Menurut Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin, kata fikih (فقه) berarti paham yang mendalam. Bila paham dapat digunakan untuk hal-hal yang bersifat lahiriah, maka fikih berarti paham yang menyampaikan ilmu zhahir kepada ilmu batin.¹³ Fikih tentang sesuatu berarti mengetahui batinnya sampai kedalamannya sesuatu itu.

B. Produk Pemikiran Hukum Islam

Hukum Islam dalam istilah di Indonesia yang merupakan hasil produk pemikiran hukum yang meliputi sebagai berikut:

1. Produk pemikiran fikih.
2. Produk pemikiran fatwa ulama.

⁹Lihat, *ibid*. Lihat pula, Manna' al-Qaţţan, *al-Tasyrî' wa al-Fiqh fî al-Islâmî Tarîkhâ wa Manhajâ* (Beirut: Muassasah al-Risâlah, 1982), h. 121.

¹⁰Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, *op. cit.* h. 1067.

¹¹T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqhi* (Cet. VII; Jakarta: Bulan Bintang, 1991), h. 17.

¹²T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-bukum Fiqhi Islam* (Cet. V; Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h. 19.

¹³Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, *op. cit.*, h. 5.

3. Produk pemikiran yurisprudensi.
4. Produk pemikiran perundang-undangan.
5. Pemikiran teori sosiologi hukum.

Maksud dari istilah hukum Islam adalah hukum yang diyakini memiliki keterkaitan dengan sumber dan ajaran Islam, yaitu hukum amali berupa interaksi sesama manusia, selain jinayat (pidana Islam).¹⁴ Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* dijelaskan bahwa hukum Islam ialah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur'an dan hadis.¹⁵ Artinya, hukum Islam yang dimaksudkan merupakan produk fikih Indonesia.

Pengertian hukum Islam atau hukum *syara'* menurut istilah ulama uşul, adalah:

خَطَابُ الشَّارِعِ الْمُنْعَلَقُ بِأَفْعَالِ الْمُكَلِّفِينَ طَلَبًا أَوْ تَحْذِيرًا أَوْ وَضْعًا.¹⁶

Artinya:

Doktrin (*kehitab*) *Syari'* yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf secara perintah atau diperintah memilih atau berupa ketetapan (*taqrir*).¹⁷

Sedangkan istilah ulama fikih, bahwa hukum Islam adalah:

أَلَا تَرَى الَّذِي يَقْتَضِيهِ خَطَابُ الشَّارِعِ فِي فِعْلِ الْمُكَلَّفِ كَالْوُجُوبِ وَالْحُزْمَةِ وَالْإِبَاحَةِ.¹⁸

Artinya:

Pengaruh yang ditimbulkan oleh firman Allah atau sabda Rasul yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan mukallaf, seperti wajib, haram, dan mubah.¹⁹

¹⁴Amrullah Ahmad dkk., *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 53.

¹⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga (Cet I; Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 411.

¹⁶Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Uşul al-Fiqh*, (Kuwait: Maṭba'ah al-Nasyr, 1977), h. 100.

¹⁷Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Uşul al-Fiqh*, yang dialihbahasakan oleh Noer Iskandar al-Barsany dan Moh. Tolchah Mansoer dengan Judul, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Cet. III; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), h. 153.

¹⁸Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Uşul al-Fiqh*, loc. cit.

¹⁹Minhajuddin, *Ilkhtilaf Ulama Suni dan Pengaruhnya terhadap Perkembangan Fikih Islam (Abad Dua dan Tiga Hijriah)*, (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 9.

Menurut Prof. Dr. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, hukum Islam adalah bagian dari ilmu fikih. Karena ilmu fikih merupakan suatu kumpulan ilmu yang sangat luas pembahasannya, yang mengumpulkan berbagai ragam jenis hukum Islam dalam mengatur kehidupan untuk keperluan seseorang, golongan, dan masyarakat secara umum.²⁰

Kemudian dalam Ensiklopedi Hukum Islam, ulama usul fikih mendefenisikannya dengan tuntutan Allah swt. yang berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf, baik berupa tuntutan, pemilihan, atau menjadikan sesuatu menjadi sebab, syarat, penghalang, sah, batal, *rukhsah* (keringanan) atau '*azimah* (perbuatan).²¹

Perihal berbagai pengertian tentang hukum Islam di atas, dapat dipahami bahwa hukum Islam merupakan istilah yang dikembangkan dan dibakukan di Indonesia. Dengan demikian hukum Islam di Indonesia adalah peraturan-peraturan yang diambil dari wahyu dan diformulasikan ke dalam empat produk pemikiran hukum yaitu, fikih, fatwa ulama, keputusan pengadilan, dan perundang-undangan, serta penulis menambah sebuah teori sosiologi hukum yang dipedomani dan diberlakukan bagi umat Islam di Indonesia.

1. Produk pemikiran fikih

Produk pemikiran fikih adalah bersumber dari kitab fikih itu sendiri. Kitab fikih yang dimaksudkan ialah buku atau kitab yang membahas berbagai persoalan hukum Islam seperti ibadah, muamalah, pidana, peradilan, jihad, perang, dan damai berdasarkan hasil ijtihad ulama fikih dalam memahami al-Qur'an dan hadis yang dikaitkan dengan realitas yang ada dengan menggunakan berbagai metode ijtihad.²²

Penyusunan kitab fikih mulanya mengalami permasalahan karena persoalan dalam masyarakat belum banyak dipertanyakan

²⁰Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Edisi Kedua (Cet. I; Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 9.

²¹Abdul Aziz Dahlan, et al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 2 (Cet. V; Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), h. 572.

²²*Ibid.*, h. 345.

sehingga tidak sistematis. Pembukuan kitab fikih dimulai sekitar awal abad ke-2 Hijriah yang disebut zaman klasik. Penulisan kitab fikih terus berkembang, mulai dari zaman klasik sampai sekarang zaman modern.

2. Produk pemikiran fatwa ulama

Fatwa menurut bahasa berarti jawaban, keputusan, pendapat yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah; nasihat orang alim, pelajaran baik.²³ Menurut ulama *uṣul fiqh*, fatwa berarti pendapat yang dikemukakan oleh seorang mujtahid atau faqih sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat.²⁴ Fatwa ini bersifat sanksi moral yang tidak mengikat seseorang untuk berfatwa atau meminta fatwa. Fatwa ulama ini biasanya hanya didengar dan diikuti oleh orang-orang yang taat kepada ulama yang memberi fatwa tersebut.

3. Produk pemikiran yurisprudensi

Produk pemikiran yurisprudensi merupakan hasil pemikiran hukum dari keputusan Pengadilan Agama sehingga dijadikan sebagai hasil dari rekonstruksi formulasi hukum Islam yang kemudian melahirkan sebuah kompilasi hukum, termasuk Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia.

Gagasan untuk mengadakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, mulanya dikemukakan oleh Menteri Agama Republik Indonesia, Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, M.A. pada bulan Februari 1985 di IAIN Sunan Ampel Surabaya. Mulai saat itu para akademisi dan praktisi hukum Islam mulai menggelinding dan mendapat respons yang positif. Malahan Presiden Republik Indonesia (Soeharto) mengambil prakarsa untuk melahirkan gagasan mengadakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. Pada tanggal 25 Maret 1985, Mahkamah Agung dan Menteri Agama

²³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, *op. cit.*, h. 314.

²⁴Abdul Aziz Dahlan, et al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, *op. cit.*, h. 326.

mengeluarkan keputusan dan menandatangani bersama di Yogyakarta berdasarkan Nomor 07/KMA/1985 dan Nomor 25 Tahun 1985.²⁵

4. Produk pemikiran perundang-undangan

Undang-undang diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah:

Ketentuan dan peraturan negara yang dibuat oleh pemerintah (menteri, badan eksekutif, dan sebagainya), disahkan oleh parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat, badan legislatif, dan sebagainya), ditandatangani oleh kepala negara (presiden, kepala pemerintah, raja, dan sebagainya), dan mempunyai kekuatan mengikat; aturan yang dibuat oleh orang atau badan yang berkuasa; hukum dalam arti patokan yang bersifat alamiah atau sesuai dengan sifat-sifat alam.²⁶

Undang-undang yang dimaksudkan adalah peraturan negara yang dibuat oleh pemerintah dalam hal ini menteri, disahkan oleh DPR, dan ditandatangani oleh presiden, kemudian dibuatkan peraturan pemerintah dan peraturan menteri (permen).

Produk perundang-undangan di Indonesia pada prinsipnya mengandung unsur pemaksaan terhadap masyarakat secara umum, namun ada juga hasil produk undang-undang yang tidak mesti diikuti dan dilaksanakan oleh masyarakat, seperti undang-undang perkawinan di Indonesia.

5. Pemikiran teori sosiologi hukum

Istilah sosiologi hukum pertama kali diperkenalkan oleh Anzilotti bangsa Itali tahun 1882. Sosiologi hukum lahir dari hasil refleksi pemikiran para ahli di bidang filsafat hukum, ilmu hukum, dan sosiologi.

Sosiologi hukum dapat juga dikatakan sebagai ilmu tentang kenyataan dalam masyarakat, karena muncul dari anggapan dasar bahwa hukum timbul dan tumbuh dari proses gejala sosial dalam

²⁵Lihat *ibid.*, h. 970.

²⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, *op. cit.*, h. 1245.

masyarakat. Tanpa gejala sosial dari masyarakat, maka hukum pun tidak berkembang.

Perkembangan sosiologi hukum di Indonesia sejak tahun 1976 ketika Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran memasukan sosiologi hukum sebagai salah satu mata kuliah wajib. Demikian pula tahun 1980 di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, mahasiswa diberikan kesempatan untuk meneliti dan menulis skripsi berdasarkan pendekatan ilmu sosiologi hukum.²⁷ Sosiologi hukum orientasinya pada hukum, dan pada dasarnya dipengaruhi oleh filsafat hukum, ilmu hukum, dan sosiologi. Hasil dari pemikiran ketiga disiplin ilmu tersebut menyatu dan melahirkan disiplin baru yaitu sosiologi hukum.

Salah satu sumber untuk mendapatkan rekonstruksi pengembangan materi hukum adalah melalui sosiologi hukum, sehingga muncul paradigma sosiologi hukum, yaitu hukum diartikan dalam berbagai aspek yang meliputi: (1) hukum sebagai ilmu pengetahuan; (2) hukum sebagai suatu disiplin ilmu; (3) hukum sebagai peraturan perundang-undangan atau kaidah; (4) hukum sebagai tatanan hukum; (5) hukum sebagai lembaga sosial; (6) hukum sebagai alat dan petugas; (7) hukum sebagai keputusan penguasa; (8) hukum sebagai nilai; (9) hukum sebagai tindak-tanduk perbuatan; (10) hukum sebagai seni; dan lain-lain.

C. Hubungan Hukum Islam dan Peradilan Agama

Untuk memenuhi tuntutan masyarakat Islam pencari keadilan dalam perkara perdata tertentu menjadi perkara tertentu, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRI) telah mengeluarkan dan mengesahkan 3 (tiga) kali undang-undang Peradilan Agama. Pertama, tanggal 29 Desember 1989 Presiden bersama DPR mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-undang ini lahir untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa Indonesia, khususnya umat Islam yang sejahtera, aman, tenteram, dan tertib. Juga menjamin persamaan kedudukan sebagai warga negara dalam hukum sehingga diperlukan upaya untuk menegakan keadilan, kebenaran, ketertiban,

²⁷Otje Salmah, *Sosiologi Hukum Suatu Pengantar* (Bandung: CV Armico, 1984), h. 22.

dan kepastian hukum. Salah satu kepastian hukum itu adalah dengan lahirnya undang-undang ini yang meliputi materi hukumnya di bidang: perkawinan; kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; serta wakaf dan sedekah.²⁸ Mengenai materi hukum ini jika menjadi objek sengketa harus diputuskan lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Tanggal 20 Maret 2006 Presiden Republik Indonesia sebagai lembaga eksekutif bersama DPR RI lembaga legislatif mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-undang pertama tersebut direkonstruksi, khususnya pasal 49 sehingga menjadi kewenangannya dalam bidang: perkawinan; waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah, dan ekonomi syari'ah.²⁹ Pengadilan Agama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang Islam. Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana pasal 49, dan khusus mengenai objek sengketa tersebut harus terlebih dahulu diputus oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Tetapi bila terjadi sengketa hak milik pada pasal 49 tersebut yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam maka objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara tertentu tersebut.

Tanggal 29 Oktober 2009 Presiden Republik Indonesia sebagai lembaga eksekutif bersama DPR RI lembaga legislatif mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Materi hukum undang-undang revisi kedua ini sama dengan undang-undang revisi pertama (khususnya pasal 49).

²⁸Lihat Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, pasal 49.

²⁹Lihat Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama* (revisi/amandemen pertama), pasal 49.

Dengan demikian, hubungan hukum Islam dan Peradilan Agama adalah keduanya mengandung dan membahas masalah perkara-perkara umat Islam di Indonesia, baik perkara perdata maupun perkara tertentu. Perkara perdata telah diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Adapun perkara tertentu adalah amanat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.





BAB III

EKSISTENSI PERADILAN AGAMA DI INDONESIA

Lembaga Peradilan Agama di Indonesia berkedudukan secara yuridis formal setelah ada undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai Peradilan Agama, terutama perkara-perkara perdata umat Islam di nusantara. Namun demikian, lembaga ini masuk dan berkedudukan di Indonesia sejak masuknya pula hukum Islam di Indonesia. Akan tetapi secara global dalam sejarah Islam, peradilan dan hukum Islam dalam hukum tertulis pertama kali diterapkan pada abad pertama Hijriah di Madinah oleh Nabi Muhammad saw. dengan dasar konstitusi Piagam Madinah. Dalam mukadimah piagam tersebut dijelaskan, bahwa Piagam Madinah tertulis dari Nabi Muhammad saw. berlaku di kalangan orang-orang yang beriman dan memeluk agama Islam yang berasal dari suku Quraisy dan Yasrib. Juga berlaku bagi orang-orang yang mengikuti mereka, mempersatukan diri, dan berjuang bersama mereka.¹

Inti dari piagam tersebut adalah perjanjian/kesepakatan antara kaum muslim dengan kaum nasrani dan yahudi (masyarakat non muslim). Nabi Muhammad saw. memberi jaminan hidup terhadap mereka, hak milik, dan agama, serta mempunyai kebebasan penuh untuk mengamalkan ajaran agama masing-masing.

Bangsa Indonesia, dalam sejarah sosial hukum Islam telah dijadikan sebagai tatanan hidup yang tumbuh dan berkembang sejak masuknya Islam di Indonesia pada abad VII Masehi di belahan bumi serambi Mekkah (Aceh),² yang kini dikenal dengan nama Nanggroe Aceh Darussalam dan diberlakukan syari'at Islam di provinsi tersebut. Islam merupakan bagian terpenting dalam proses pertumbuhan dan

¹Zainal Abidin Ahmad, *Piagam Nabi Muhammad saw.: Konstitusi Negara Tertulis yang Pertama di Dunia* (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1973), h. 21.

²Endang Syaifuddin Anshari, *Wawasan Islam: Pokok Pikiran tentang Islam dan Umatnya* (Cet.IV; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), h. 239.

perkembangan bangsa Indonesia, mulai masuknya atau kedatangannya Islam, fase kesultanan, zaman penjajahan, masa kemerdekaan hingga sekarang era reformasi.

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang berpenduduk mayoritas beragama Islam, sehingga dalam kancah politik di Indonesia cukup mewarnai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Misalnya dalam perumusan dasar negara Republik Indonesia yang dikenal dengan istilah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang terdiri dari sembilan orang, delapan orang di antaranya adalah beragama Islam dan satu orang beragama Kristen.

Kancah perkembangan politik di Indonesia, terjadi rekonstruksi politik muncul dan dapat dibagi dalam tiga dekade: (1) rekonstruksi pada masa berlakunya sistem demokrasi liberal parlementer yang dimulai setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 sampai dikeluarkannya Dekrit Presiden Republik Indonesia tanggal 5 Juli 1959; (2) rekonstruksi politik pada masa demokrasi terpimpin yang dimulai tahun 1959 sampai tahun 1966; (3) rekonstruksi politik pada masa demokrasi Pancasila sejak 1966 sampai sekarang.³ Sistem demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional dengan menonjolkan sistem presidensial.⁴ Pergolakan politik semakin gencar termasuk materinya adalah pengembangan hukum Islam di Indonesia.

Para politisi berjuang di parlemen untuk menggolkan ide-ide dari partainya. Kalau partainya bernuansa nasionalis, maka paham dan wawasan kebangsaan yang menonjol. Kalau partainya bernuansa

³Benny K. Harman, *Rekonstruksi Politik & Kekuasaan Kehakiman di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), 1997), h. 60. Lihat pula, Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Cet. XIII; Jakarta: PT Gramedia, 1991), h. 69.

⁴Sistem presindensial tersebut dimaksudkan adalah pemerintahan republik yang kepala negaranya atau presidennya langsung memimpin kabinet. Kabinet tersebut adalah badan atau dewan pemerintahan yang terdiri atas para menteri. Liberal adalah sistem politik dengan banyak partai, kekuasaan politik berada di tangan politisi sipil yang berpusat di Parlemen Terpimpin (10 November 1956) adalah corak pemerintahan yang mengenal satu pemimpin menuju tujuan suatu masyarakat yang berkeadilan sosial.

Islami, maka pengembangan hukum Islam yang ditonjolkan. Pergolakan pun semakin gencar, persaingan politik antara wawasan nasionalisasi dan wawasan Islamisasi diperebutkan. Para politisi tersebut, mereka adalah mayoritas beragama Islam, tetapi yang menonjol wawasan nasionalisasi. Pada hal, umat Islamlah yang paling banyak mengambil bagian untuk berjuang demi meraih kemerdekaan hingga mempertahankan dan mengisi kemerdekaannya dengan baik.

Umat Islam di Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan hukum Islam yang merupakan produk pemikiran hukum umat Islam di tanah air. Dalam proses perjalanan sejarah keberadaan hukum Islam di Indonesia, membawa dampak bagi bangsa Indonesia, baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positifnya antara lain memperkaya produk hukum di Indonesia. Sedangkan dampak negatifnya adalah menjadikan umat Islam berkotak-kotak dalam menjalankan syari'at Islam dan juga menjadikan umat lain merasa tidak simpatik terhadap umat Islam yang selalu melakukan kerusakan. Hal ini diakibatkan kurangnya sosialisasi dalam penerapan hukum Islam, baik terhadap umat Islam sendiri maupun terhadap umat lain. Pro dan kontra selalu terjadi pada masyarakat dalam penerapan hukum Islam di Indonesia.

Hukum Islam pada masa prakemerdekaan, pelaksanaan dan kebijakan ditentukan oleh bangsa penjajah. Tetapi pada masa kemerdekaan dan pascakemerdekaan (orde lama), kebijakan dan pelaksanaannya ditentukan pemerintah Indonesia di bawah kendali Presiden Soekarno, walaupun belum banyak yang bisa dilakukan. Hal ini disebabkan oleh faktor internal dan eksternal.

Faktor internal berasal dari bangsa Indonesia sendiri yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), misalnya DI/TII. Sedangkan faktor eksternal berasal dari bangsa penjajah yang ingin kembali menjajah bangsa Indonesia, bangsa Belanda yang dikenal dalam sejarah dengan istilah "mereka kembali". Kendala lain adalah pemerintah Indonesia belum memaksimalkan bangsanya untuk mengetahui dan mempelajari sejarah sosial hukum Islam, baik di bangku sekolah maupun di luar sekolah (sekolah formal, informal, dan non formal).

Negara Republik Indonesia, sebagai negara kesatuan ingin mewujudkan suatu negara yang damai dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, semua unsur bangsa harus ikut terlibat dalam mengambil bagian demi kejayaan bangsa Indonesia.

Oleh karena itu diperlukan persatuan dan kesatuan bangsa, tidak terkotak-kotak dan tidak saling menyalahkan antara satu dengan lainnya. Sejarah telah mencatat bahwa dengan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, bangsa penjajah dapat diusir dari bumi pertiwi yang tercinta. Tidak hanya persatuan dan kesatuan, juga peraturan perundang-undangan harus jelas dan tidak merugikan pihak tertentu serta peraturan perundang-undangan tersebut harus dipatuhi.

Dengan pengalaman tersebut diperlukan suatu peraturan atau perundang-undangan untuk mengatur susunan, kekuasaan, dan hukum acara dalam lingkungan peradilan di Indonesia, termasuk Peradilan Agama. Salah satu di antaranya adalah Peradilan Agama yang merupakan pelaksana (sekarang pelaku) kekuasaan kehakiman dalam perkara perdata tertentu (sekarang perkara tertentu). Tetapi dalam pengembangannya tidak menutup kemungkinan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pada perkara-perkara ekonomi syaria'ah lainnya termasuk perkara pidana tertentu. Sejarah hukum Islam telah membuktikan bahwa betapa berkembangnya materi hukum Islam dalam perkara-perkara di Peradilan Agama.

Secara global penulis sejarah hukum Islam telah mengadakan pembagian tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam ke dalam lima masa seperti yang disebutkan sebelumnya yaitu meliputi : (1) masa Nabi Muhammad saw. (610 M sampai 632 M); (2) masa Khulafaurrasyidun (632 M sampai 662 M); (3) masa pembinaan, pengembangan, dan pembukuan (abad VII sampai X M); (4) masa kelesuan pemikiran (abad X M sampai XIX M); dan (5) masa kebangkitan kembali (abad XIX M sampai sekarang).⁵ Masa

⁵Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Edisi Keenam (Cet. IX; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), h. 139.

kebangkitan inilah yang menjadi pusat perhatian bangsa-bangsa di dunia, terutama bangsa Barat yang tidak senang dengan kebangkitan umat Islam, baik ekonomi, politik, sosial budaya, maupun hukum terutama pengembangan hukum Islam.

Proses pembentukan, pertumbuhan, dan perkembangan hukum Islam, sumber lain menyebutkan bahwa ada enam periode yang dilalui yaitu: (1) periode Rasulullah saw.; (2) periode Khalifah atau Khulafaurrasyidun; (3) periode setelah Khulafaurrasyidun sampai awal abad II H; (4) periode awal abad II H sampai pertengahan abad IV H; (5) periode pertengahan abad IV H sampai jatuhnya kota Bagdad; dan (6) Periode jatuhnya kota Bagdad sampai sekarang.⁶ Sekarang dikenal sebagai periode kebangkitan umat Islam terutama pada pengembangan materi hukum Islam di Indonesia.

Kedua pembagian waktu tersebut, pada dasarnya sama, karena sejarah pembentukan dan perkembangan hukum Islam semua dimulai dari Nabi Muhammad saw. sampai sekarang. Untuk bangsa Indonesia, hukum Islam masuk bersamaan dengan masuknya Islam ke wilayah Nusantara melalui kesultanan atau kerajaan.

Kerajaan-kerajaan Islam yang sudah mengenal Islam, telah melaksanakan hukum Islam dalam menyelesaikan berbagai kasus di wilayah kerajaan masing-masing. Adanya hukum Islam di Indonesia dimulai dari kesultanan yang memeluk agama Islam. Hukum Islam masuk ke Indonesia melalui beberapa jalur, terutama ditentukan oleh penguasa, antara lain melalui fase kerajaan atau kesultanan.

A. Fase Kesultanan

Sejarah tentang proses masuknya Islam dan sekaligus peradilan ke Indonesia, paling tidak ada dua pendapat. *Pertama*, masuknya Islam ke Indonesia berlangsung sejak abad I H (abad VII M) sekitar tahun 674 M. *Kedua*, Islam masuk ke Indonesia terjadi pada

⁶Syekh Muhammad Ali As-Sayis, *Tarikh al-Fiqh al-Islami* dialihbahasakan oleh Dedi Junaedi dan Hamidah dengan judul *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*, Edisi Pertama (Cet. I; Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1996), h. 11-12.

abad XIII M sekitar (1258 M).⁷ Tetapi menurut sumber dari hasil seminar nasional yang ditulis oleh Endang Syaifuddin Anshari bahwa masuknya Islam di Indonesia pertama kali pada abad I H (abad VII M/VIII M) yang dibawa oleh orang-orang Arab. Daerah yang didatangi ialah daerah pesisir Sumatera khususnya kerajaan Islam pertama di Aceh.⁸ Daerah-daerah lain yang didatangi oleh Islam sesudah Aceh adalah Minangkabau, Jawa, Maluku, Sulawesi, Bali, Lombok, Sumbawa, dan Kalimantan.

Masuknya Islam di Indonesia merupakan proses pelaksanaan hukum Islam itu sendiri, karena Islam dan hukum Islam berkaitan langsung dengan kehidupan umat Islam di Indonesia. Adanya keterkaitan langsung antara hukum Islam dengan kehidupan masyarakat Islam, maka terjadi reaksi, baik dari luar maupun dari dalam umat Islam sendiri, terutama dari kerajaan.

Kerajaan-kerajaan Islam yang melaksanakan hukum Islam antara lain: Samudra Pasai (berdiri pertengahan abad ke-13 sampai tahun 1524), Aceh Darussalam (berdiri tahun 1514), Kerajaan Demak (berdiri tahun 1500-1550), Cirebon (berdiri abad ke-16), Banten (berdiri tahun 1568-1813), dan lain-lain.⁹ Pada fase kesultanan tersebut banyak kerajaan-kerajaan Islam yang berdiri dan melawan kaum penjajah, termasuk Kerajaan Mataram.

Tahun 1619 ketika Mataram berada di bawah pemerintahan Sultan Agung, praktis seluruh Jawa Timur berada di bawah pemerintahan Islam. Ketika itu terjadi konflik bersenjata antara pemerintahan kerajaan dengan VOC dan gugurlah Sultan Agung. Dengan gugurnya Sultan Agung, maka pemerintahan dikendalikan oleh Amangkurat I, konflik pun semakin menjadi-jadi. Malahan konflik terjadi antara pemerintah dengan kelompok ulama oleh karena keprihatinan terhadap agama yang diterapkan oleh pemerintah. Amangkurat I marah dan tidak butuh gelar sultan, bahkan tahun 1647 ia membunuh 5000 sampai 6000 orang ulama karena dianggap

⁷Dudung Abdurrahman, dkk., *Sejarah Peradaban Islam: dari Masa Klasik Hingga Modern* (Cet. I; Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga-Lesfi, 2003), h. 377.

⁸Lihat Endang Syaifuddin Anshari, *op. cit.*, h. 240.

⁹Abdul Aziz Dahlan, et al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 2 (Cet. V; Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), h. 968.

membahayakan tahtanya.¹⁰ Inilah reaksi internal umat Islam sebagai konflik yang terjadi dalam pelaksanaan hukum Islam.

Bangsa Indonesia mewarisi hukum Islam dari berbagai sumber, disamping hukum lokal (hukum adat) terdapat berbagai sumber hukum eksternal yang datang dari luar dan dari Islam itu sendiri, termasuk hukum Eropa (di antaranya Belanda). Hukum Belanda mendominasi hukum atau peradilan di Indonesia dengan tradisi *civil law system*-nya yakni menempatkan negara sebagai sumber hukum, dalam arti bahwa perundang-undangan dan penerapan hukum dan keadilan oleh negara memiliki kedudukan tinggi yang menentukan dalam penyelenggaraan hukum dan keadilan dalam masyarakat.¹¹ Konsep pada *civil law system* menempatkan negara sebagai satu-satunya pemegang hak monopoli dalam memberlakukan hukum dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Sehingga tidak mengherankan, bahwa hukum-hukum Belanda yang diberlakukan semasa pemerintahan kolonial di Indonesia mempunyai watak dan pengaruh politik yang nyata dan mendalam/berakar sampai sekarang khususnya hukum acara peradilan. Kenyataan tersebut diberlakukan sampai zaman kemerdekaan Indonesia, bahkan menjadi sumber utama hukum nasional Indonesia,¹² termasuk pemberlakuan hukum acara pasca kemerdekaan.

Hukum Islam sebagai hukum yang berlaku pada masyarakat Islam di Indonesia adalah memasuki bangsa Indonesia dengan penuh kedamaian dan kasih sayang sebagai agama rahmat bagi seluruh alam raya ini yang diberikan Allah swt. dan Allah-lah yang menganugrahkan agama Islam untuk bangsa Indonesia termasuk hukum-hukum yang bernuansa Islami termasuk Lembaga Peradilan Agama, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Fāṭir/35: 2

¹⁰Dudung Abdurrahman, dkk., *op. cit.*, h. 388.

¹¹Dadan Muttaqien, dkk., *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 1999), h. 28.

¹²Lihat, *ibid.*, h. 29.

مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٣﴾

Terjemahnya:

Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya; dan apa saja yang ditahan oleh Allah maka tidak seorang pun yang sanggup melepaskannya sesudah itu, dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.¹³

Bangsa Indonesia termasuk pihak kerajaan/kesultanan yang memeluk agama Islam merupakan sebuah rahmat besar bagi masyarakat Islam di Indonesia, karena kaum bangsawan di kala itu mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam perkembangan dan pertumbuhan agama Islam di Indonesia, termasuk dalam penerapan hukum Islam dalam wadah Peradilan Islam, kini sebutannya sebagai Peradilan Agama.

Membahas mengenai perjalanan Peradilan Agama yang telah dilalui dalam rentang waktu yang demikian panjang berarti pada dasarnya harus berbicara tentang masa lalu yakni sejarah Peradilan Agama di Indonesia. Pembahasan tersebut dianggap perlu untuk merencanakan dan melangkah ke arah masa yang akan datang, sekaligus menghindari pengulangan sejarah yang pahit pada masa lalu dan seyogyanya menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat mencelakakan bangsa Indonesia sendiri, terutama kaum muslim Indonesia.

Sebuah perjuangan yang panjang dan melelahkan bagi kaum muslim Indonesia dalam meraih dan memperoleh sebuah lembaga Peradilan Agama di Indonesia. Perjuangan ini mendapat rintangan dan hambatan yang cukup rumit, baik dari dalam umat Islam sendiri, terlebih dari pengaruh luar umat Islam. Demikian halnya pandangan yang negatif terhadap Lembaga Peradilan Agama, yang memandang sebelah mata Peradilan Agama walaupun di kala itu bernama

¹³Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h. 695.

Peradilan Islam. Peradilan bagi umat Islam belum mempunyai kekuatan hukum tetap termasuk lembaga dan instansinya sebagai Pengadilan Agama.

Proses masuknya agama Islam ke Indonesia yang untuk pertama kali pada abad pertama hijriah/abad ketujuh masehi yang berasal dari bangsa-bangsa Arab oleh saudagar-saudagar atau kaum gujarat dari Mekkah dan Madinah yang masyarakatnya mulai melaksanakan ajaran dan aturan agama Islam sebagai kewajiban rutinitasnya dalam kehidupan kaum muslim Indonesia adalah bersumber dari buku-buku/kitab-kitab klasik yang bernuasa fikih, sumber rujukan masih sangat terbatas.¹⁴

Sejarah perkembangan kehidupan dan perjalanan Pengadilan Agama mengalami pasang surut. Ada kalanya wewenang dan kekuasaan Pengadilan Agama yang dimilikinya sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam dan ada kalanya tergantung pada pengambilan keputusan terutama kepentingan pada kekuasaan. Oleh karena itu dalam waktu-waktu lainnya, kekuasaan lembaga peradilan dan wewenangnya dibatasi dengan berbagai kebijakan dan peraturan penguasa, bahkan sering kali mengalami berbagai rekayasa dari penguasa dan golongan masyarakat tertentu agar posisi Pengadilan Agama melemah dan diremehkan.

Materi hukum Islam sebagai tujuan mencari keadilan dalam melancarkan politik hukumnya di Indonesia, hukum Islam sebagai hukum yang berdiri sendiri telah mempunyai kedudukan yang kuat, baik di masyarakat maupun dalam peraturan dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat muslim. Bagi umat Islam pada kerajaan-kerajaan Islam yang pernah berdiri di Indonesia melakukan hukum Islam dalam wilayah hukum dan kekuasaannya masing-masing. Umat Islam pada kerajaan Islam yang berdiri di Aceh Utara sebagai sebutan Serambi Mekkah pada akhir abad ke-13 M, merupakan kerajaan Islam pertama yang kemudian diikuti dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam lainnya, misalnya: Demak, Jepara, Tuban, Gresik, Ngampel dan Banten.

¹⁴Lihat, Dedi Junaedi dan Hamidah, *loc. cit.*

Wilayah bagian Timur Indonesia berdiri pula kerajaan Islam, seperti: Tidore dan Makasar. Pada pertengahan abad ke-16, suatu dinasti baru, yaitu kerajaan Mataram memerintah Jawa Tengah, dan akhirnya berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil di pesisir utara, sangat besar perannya dalam penyebaran Islam di wilayah Nusantara ini. Proses masuknya penguasa kerajaan Mataram ke dalam agama Islam, maka pada permulaan abad ke-17 M penyebaran agama Islam hampir meliputi sebagian besar wilayah Indonesia.

Agama Islam masuk ke wilayah Indonesia sekaligus proses pelaksanaan Peradilan Islam/Peradilan Agama melalui jalan perdagangan pada daerah-daerah pesisir secara damai tanpa melalui gejolak, sehingga norma-norma agama Islam diterima oleh masyarakat Indonesia bersamaan dengan penyebaran dan penganut agama Islam oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Akhirnya dengan timbulnya komunitas-komunitas atau golongan-golongan masyarakat Islam atau (kini organisasi kemasyarakatan), maka kebutuhan akan lembaga peradilan dalam memutus perkara berdasarkan hukum Islam semakin diperlukan oleh masyarakat muslim. Lembaga Peradilan Agama di Indonesia mempunyai proses sejarah yang cukup panjang dan melelahkan bahkan penuh dengan pengorbanan. Karena itu, jauh sebelum kemerdekaan, sistem peradilan agama sudah lahir di Indonesia. Sebelum Islam datang ke Indonesia telah ada dua macam peradilan, yaitu Peradilan Pradata dan Peradilan Padu. Materi hukum Peradilan Pradata bersumber dari ajaran Hindu dan ditulis dalam Papakem. Sedangkan Peradilan Padu menggunakan hukum materiil tidak tertulis yang berasal dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Pada pratiknya, Peradilan Pradata menangani perkara-perkara yang berhubungan dengan wewenang raja, sedangkan Peradilan Padu menangani perkara-perkara yang tidak berhubungan dengan wewenang raja.¹⁵

Kedudukan dan keberadaan dua sistem peradilan tersebut berakhir setelah raja Mataram menggantikannya dengan sistem Peradilan Serambi yang berasaskan Islam. Penggantian ini bertujuan untuk menjaga integrasi wilayah kerajaan wilayah Mataram. Peradilan

¹⁵Lihat, *ibid.*, h. 15.

Agama sebagai bagian dari mekanisme penyelenggaraan kenegaraan pernah mengalami pasang surut ketika Sultan Agung meninggal dan digantikan oleh Amangkurat I. Amangkurat I pernah menutup Peradilan Agama dan menghidupkan kembali Peradilan Pradata, dan di masa modern ini Peradilan Agama eksis kembali. Eksisnya peradilan tersebut dikarenakan masyarakat semakin banyak memeluk agama Islam dan sekaligus banyak yang mempelajarinya sehingga mereka menemukan pula banyak hikmahnya.

Kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara seperti Kerajaan Pasai, Demak, Cirebon, Buton dan Ternate telah memberlakukan hukum Islam dalam wilayah kekuasaannya. Paham yang dianut (*legal system*) pada umumnya bermazhab Syafi'i. Kerajaan tersebut telah menerapkan norma-norma hukum Islam dan masyarakat memberlakukannya. Pemberlakuan hukum Islam oleh kerajaan Islam tersebut tidak parsial. Sesuai dengan teori penerima otoritas hukum Islam yang dijelaskan oleh AR. Gibb dalam bukunya *The Modern Trends in Islam* yang dikutip A. Rahmat Rosyadi dan M. Rais Ahmad,¹⁶ teori tersebut menegaskan bahwa orang-orang Islam menaati hukum Islam karena diperintahkan oleh Allah dan rasul-Nya. Oleh karena itu, apabila masyarakat kerajaan tersebut telah menerima Islam sebagai agamanya, maka secara otomatis akan menerima otoritas hukum Islam terhadap dirinya. Bagi orang Islam, hukum Islam adalah kehendak dan perintah Allah dan tradisi rasul-Nya.¹⁷ Demikian pula teori *kerido* atau teori *syahadat* yaitu teori yang mengharuskan pelaksanaan hukum Islam oleh mereka yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai konsekuensi logis dari pengucapan kredonya.¹⁸ Pengucapan syahadat atau membaca dua kalimat syahadat merupakan pengikraran seseorang untuk mengaku dan bersumpah dalam memeluk agama Islam sebagai agama yang diyakini kebenarannya, selanjutnya untuk dipatuhi dan dilaksanakan segala perintah dan larangan-Nya, biasanya disebut dengan istilah hukum Islam.

¹⁶A. Rahmat Rosyadi dan M. Rais Ahmad, *Formalisasi Syari'at Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Ghaliyah Indonesia, 2006), h. 74.

¹⁷Lihat, *ibid*.

¹⁸Imam Syaukani, *loc.cit*.

Hukum Islam sebagai hukum yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, melaksanakan syari'at Islam yang dilengkapi dan ditata dengan institusi-institusi kelembagaan keagamaan, seperti Pengadilan Agama merupakan fardu kifayah (kewajiban sosial/kewajiban secara menyeluruh bagi masyarakat muslim). Demikian halnya pada kerajaan-kerajaan dan kesultanan-kesultanan sebelumnya selalu membentuk badan-badan peradilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara berdasarkan hukum acara peradilan Islam (*mukhasamat*). Kewajiban ini merupakan salah satu pendekatan syari'at Islam. Kerajaan dan kesultanan berdasar dari pendekatan syari'at itu untuk menerapkan hukum Islam yang dipandang sebagai hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat sekaligus menjadi budaya hukum Indonesia pada masanya.¹⁹ Pada penerapan hukum tersebut dipandang bahwa Lembaga Peradilan/Pengadilan Agama pada masa kerajaan dan kesultanan di era tersebut sudah menunjukkan keberhasilannya dalam menyelesaikan perkara kewarisan bagi orang-orang Islam.²⁰

Pendapat Imam Syaukani tentang hukum,²¹ biasanya pemberlakuan hukum Islam pada kerajaan-kerajaan Islam itu sangat bergantung pada mazhab yang dianut oleh para Sultan yang berkuasa. Selanjutnya dikatakan walaupun pemberlakuan hukum Islam berdasarkan pada mazhab yang dianut oleh para Sultan, tetapi hukum Islam telah mengubah pola pemikiran dan cara pandang kesadaran masyarakat Indonesia sehingga menjadikannya sebagai adat dan perilaku keseharian bagi masyarakat.

Sebagai perumpamaan pada masyarakat Aceh menyatakan, hukum Islam adalah adatnya, adatnya adalah hukum Islam. Masyarakat Minangkabau berlaku kaidah, adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah. Demikian juga di Pulau Jawa, pengaruhnya sangat kuat sehingga *al-Qur'an*, *al-Sunnah*, *ijma'*, dan *qiyas* telah dijadikan ukuran kebenaran ilmiah dan pedoman perilaku masyarakat, sehingga kerajaan dan kesultanan Islam saat itu telah berhasil mempengaruhi dalam keberagamaan masyarakat Indonesia

¹⁹A. Rahmat Rosyadi dan M. Rais Ahmad, *op.cit.*, h. 74.

²⁰*Ibid.*

²¹Imam Syaukani, *op.cit.*, h. 68.

untuk menjalankan syari'at Islam.²² Menjalankan syari'at Islam merupakan suatu kewajiban bagi masyarakat muslim dan dilaksanakan dengan penuh kesadaran kendatipun berawal dari perintah raja/sultan. Lambat laun masyarakat muslim dengan penuh kesadaran, hukum-hukum agama Islam dilaksanakan dengan baik, selanjutnya turun-temurun kepada keluarga masyarakat muslim lainnya.

B. Fase Penjajahan

Bangsa Indonesia pada masa penjajahan mengalami kendala eksternal yang dihadapi oleh umat Islam adalah berasal dari penjajah. Tahun 1511 bangsa Portugis datang dan memunculkan persaingan penyebaran agama Islam dengan Kristen, tetapi digagalkan oleh kekuatan umat Islam. Kekuatan Islam juga didukung oleh kerajaan Gowa dan Tallo yang mengadakan hubungan baik dengan kerajaan lain. Kemudian konflik-konflik internal mulai terjadi seiring dengan campur tangan penjajah yaitu Portugis dan Belanda.

Masa penjajahan di Indonesia yang paling berpengaruh terhadap hukum di Indonesia adalah masa penjajahan Belanda selama 350 tahun (tiga setengah abad), kemudian disusul oleh masa penjajahan Jepang selama 3,5 tahun (tiga setengah tahun). Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, Peradilan Agama mendapat pengakuan secara resmi. Pada tahun 1882 pemerintah kolonial mengeluarkan Staatsblad No.152 yang merupakan pengakuan resmi terhadap eksistensi Peradilan Agama dan hukum Islam di Indonesia.

Karena Staatsblad ini tidak berjalan efektif dan karena pengaruh teori *reseptie*, maka pada tahun 1937 keluarlah Staatsblad 1937 No. 116. Staatsblad ini mencabut wewenang yang dimiliki oleh Peradilan Agama dalam persoalan waris dan persoalan-persoalan lain yang berhubungan dengan harta benda, terutama tanah. Sejak itulah kompetensi Peradilan Agama hanya pada masalah perkawinan dan perceraian. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwa Peradilan Agama pada masa tersebut tidak dapat melaksanakan

²²A. Rahmat Rosyadi dan M. Rais Ahmad, *loc.cit*.

keputusannya sendiri, melainkan harus dimintakan pegukuhan dari Peradilan/Pengadilan Negeri, terutama perkara kewarisan.

Pengurangan terhadap kompetensi Peradilan Agama tersebut tentunya sangat mengecewakan masyarakat muslim Indonesia karena Peradilan Agama pada waktu itu dipandang sebagai sebuah lembaga peradilan sebagaimana layaknya lembaga peradilan, bukan sebagai lembaga agama semata. Belum lagi pada masa ini Peradilan Agama hanya dapat menghidupi dirinya sendiri melalui ongkos perkara yang diterimanya. Tindakan tersebut dilakukan karena pemerintah kolonial tidak pernah menyubsidi Peradilan Agama untuk pengelola administrasinya, termasuk tidak menggaji hakim dan pegawainya. Kenyataan bahwa hakim dan pegawai Peradilan Agama menerima uang dari mereka yang menggunakan jasa peradilan inilah yang belakangan dipakai sebagai alat oleh Belanda untuk mengatakan bahwa Peradilan Agama adalah sarang korupsi yang secara damai memasuki Indonesia, dengan sifat asimilatif dan akomodatif dalam menghadapi unsur-unsur hukum lokal, mengalami perubahan baik secara prosudural maupun substansial dihadapan hukum kolonial.

Hukum Islam sebagai materi Peradilan Agama pada masa penjajahan (prakemerdekaan) khususnya penjajahan Belanda, dijumpai beberapa macam instruksi Gubernur Jenderal yang ditujukan kepada bupati untuk memberi kesempatan bagi ulama menyelesaikan perselisihan perdata di kalangan penduduk menurut ajaran Islam. Keputusan Raja Belanda (*Koninkelijke Besluit*) Nomor 19 tanggal 24 Januari 1882, dirumuskan dalam *Staatblad* tahun 1882 Nomor 152 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama, berarti bahwa hukum berlaku bagi pribumi adalah hukum agama yang dipeluknya (*receptio in complexu*) merupakan teori Van Den Berg. Teori ini dibantah oleh Snouck Hurgronje yang menganut paham *teori receptie* tahun 1874 sampai 1936 (hukum Islam dipandang sebagai hukum apabila diterima oleh hukum adat).²³

²³Lihat Amrullah Ahmad dkk., *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 55.

Tahun 1882 hukum perkawinan diberlakukan dengan sistem hukum yang sesuai dengan syari'at dan sistem hukum positif.²⁴ Hal ini merupakan masalah politik hukum Belanda. Semua doktrin hukum hanya dapat berlaku apabila ditopang oleh tiga pilar penyangga, yaitu aparat hukum yang andal, peraturan hukum yang jelas, dan kesadaran hukum masyarakat yang tinggi.

Politik hukum tersebut bermuatan *divide et impera*, bertujuan untuk menghambat dan menghentikan meluasnya hukum Islam dan bentuk konsep hukum tandingan yang mendukung politik pecah belah pemerintah kolonial. Menurut kolonial, musuh mereka bukanlah Islam sebagai agama, melainkan Islam sebagai doktrin politik. Mereka melihat kenyataan bahwa seringkali menimbulkan bahaya terhadap kekuasaan Belanda. Walaupun masyarakat Islam Indonesia agak terseok-seok, maka dengan tingginya kesadaran hukum sehingga berhasil memancarkan tonggak sejarah.

Hukum Islam yang berlaku pada masa kerajaan/kesultanan dan penjajahan Belanda ialah dengan menggunakan teori *receptie*. Menurut Prof. H. Mohammad Daud Ali, S.H., teori ini mengajarkan bahwa hukum Islam baru boleh dijalankan bilamana telah menjadi hukum yang hidup di dalam masyarakat adat.²⁵ Teori ini merupakan kebiasaan bagi masyarakat, sehingga dipatuhi dan dilaksanakan.

Keadaan demikian, juga berlangsung pada masa penjajahan Jepang selama tiga setengah tahun. Tanggal 15 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat. Keadaan yang genting itu berlangsung sampai tiba saatnya bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan pada saat itulah bangsa Indonesia mulai menghirup udara segar bagai seseorang mengalami kemerdekaan yang bebas dari tekanan kaum penjajah.

Hukum Islam yang diterima secara damai dengan sifat asimilatif dan akomodatif menghadapi unsur-unsur hukum lokal diterima dan berlaku di kalangan bangsa Indonesia ditundukan oleh

²⁴Lihat Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries (History, Text and Comparative Analysis)*, (New Delhi: Academy of Law Religion, 1987), h. 205.

²⁵Mohammad Daud Ali, *op. cit.*, h. 233.

kekuasaan kolonial Belanda. Salah satu kebijakan pemerintah Hindia Belanda dalam menyahuti pemikiran dan implimentasi hukum Islam adalah merumuskan dan menformulasikan teori-teori yang berkenaan dengan cita-cita hukum dan adat masyarakat Indonesia. Di antara teori yang dikenal luas adalah: pertama, teori *receptie in complexu* oleh Lodewijke Willwm Christian van den Berg pada tahun 1884 menulis buku dengan nama *Muhammadagch recht* (Asas-Asas Hukum Islam) menyatakan hukum Islam berlaku bagi orang-orang Islam Indonesia walaupun dengan sedikit penyimpangan-penyimpangan.²⁶ Pendapat van den Berg ini dikenal dengan teori *recetio in complexu*.

Teori *recetio in complexu* merupakan rumusan hasil pergulatan pemikirannya, setelah memperhatikan dan mencermati fakta-fakta hukum yang terjadi pada masyarakat pribumi. Kemudian, van den Berg mengeluarkan konsep Staatsblad 1882 Nomor 152 yang berisi ketentuan bagi rakyat pribumi atau rakyat jajahan berlaku hukum agama di lingkungan hidupnya. Ketentuan ini diberlakukan berdasarkan Koninklijk Besluit Nomor 24 (dalam staatsblad Nomor 152 Tahun 1882) dan berlaku sejak tanggal 1 Agustus 1882) dibentuk pengadilan agama di Jawa dan Madura dengan sebutan *Bepaling betreffende de Priesterraden op Java en Madoera*.²⁷ Keputusan tersebut lebih bersifat administratif dan prosudural, walaupun dalam pelaksanaannya mengalami berbagai kendala finansial dan administratif. Walaupun demikian, kebijakan tersebut masih menguntungkan karena hukum Islam diterapkan bagi pemeluk agama Islam, sehingga bagi rakyat jajahan yang beragama Islam di Indonesia berlaku hukum Islam. Bagi badan-badan peradilan agama, ketika pemerintah Hindia Belanda datang ke Indonesia sudah melaksanakan hukum agama Islam, tetap dilanjutkan dan diakui kewenangan hukumnya.²⁸

Era pemeritahan Gubernur Daendels, muncul anggapan umum bahwa hukum asli terdiri atas hukum Islam, sedangkan Reffles mengira hukum adat itu tidak lain hukum Islam.²⁹ karena pandangan

²⁶Sayuti Thalib, *loc.cit*.

²⁷Editor, Dadan Muttaqien, Sidik Tono dan Amir Mu'allim, *op.cit.*, h. 26.

²⁸A. Rahmat Rosyadi dan M. Rais Ahmad, *op.cit.*, h. 76.

²⁹Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h.11.

pemerintah Belanda bahwa hukum Islam adalah hukum asli Indonesia, maka ditetapkan *Regering Reglemen* (Staatsblad 1884 Nomor 129 di Negeri Belanda jo Staatsblad 1885 Nomor 2 di Indonesia) terutama diatur dalam Pasal 75, pasal 78 jo pasal 109 *Reglemen* tersebut, waktu dikenal dengan *Receptie in Complexu*.

Substansi ketiga pasal tersebut adalah setiap sengketa antara orang-orang Indonesia yang beragama Islam diberlakukan hukum Islam. Hukum agama, adat dan kebiasaan itu juga dipakai oleh hakim Eropa pada pengadilan yang lebih tinggi. Sengketa antara orang Indonesia atau dipersamakan dengan itu dipakai harus tunduk pada keputusan hakim agama menurut hukum agama. Demikian bagi orang Arab dan orang Cina yang dipersamakan dengan orang Indonesia baik yang beragama Islam maupun bukan beragama Islam diberlakukan dengan hukum yang sama.³⁰

Berdasarkan ketentuan peraturan dan undang-undang tersebut, menurut Muhammad Daud Ali,³¹ bahwa tampak di masa pertama pemerintahan Hindia Belanda, hukum Islam itu diakui eksistensinya sebagai hukum positif yang berlaku bagi orang Indonesia terutama mereka yang beragama Islam, dan perumusan-perumusan, ketentuan-ketentuan itu dalam perundang-undangan ditulis satu nafas dan sejajar dengan hukum adat, bahkan sejak zaman VOC pun keadaan ini telah berlangsung demikian juga seperti terkenal *compendium freijer*,³² dapat juga dikatakan hukum adat dan dapat diberlakukan jika diresapi atau diterima oleh hukum Islam.

Cornelis van Vollenhoven yang dikenal ahli hukum adat Indonesia, dia membagi hukum adat atas 19 persekutuan hukum adat, mengeritik dan menyerang pasal 75, 78 dan 109 RR Staatsblad 1855 Nomor 2 itu, dan van den Berg juga turut dikritik dan diserang atas teori *receptie in complexu* itu. Kemudian teori *receptie* oleh Chritian Snouck Hoergronje, penasehat Pemerintah Hindia Belanda tentang masalah-masalah Islam dan anak negeri. Memperkuat kritikan van

³⁰Sayuti Thalib, *loc.cit*.

³¹Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1982), h. 101.

³²Imam Syaukani, *op.cit.*, h. 71.

Vollenhomen terhadap teori *receptie in complexu* Menurut Snouck Horgronje, hukum yang berlaku bagi orang-orang Islam adalah hukum adat mereka masing-masing. Hukum Islam dapat berlaku apabila telah diresepsi oleh hukum adat. Pendapat Snouck Horgronje ini disebut dengan teori *receptie*. Jadi adatlah menentukan ada tidaknya hukum Islam itu.³³

Pendapat Snouck Horgronje tersebut mengubah pandangan politik hukum Hindia Belanda, perubahan atas Staatsblad 1855 Nomor 2 diganti dengan *Indische Staats Regeling* (Staatsblad 1925 Nomor 416) disusul dengan Staatsblad Nomor 1929 No. 221 dimana dinyatakan bahwa hukum Islam tidak lagi mempunyai kedudukan yang tersendiri. Hukum Islam baru dianggap berlaku sebagai hukum apabila telah memenuhi dua syarat.

Syarat *pertama*: norma hukum Islam itu harus diterima terlebih dahulu oleh hukum kebiasaan (adat masyarakat setempat). *Kedua*: Kalaupun sudah diterima oleh hukum adat, norma dan kaidah hukum Islam itu juga tidak boleh bertentangan ataupun tidak boleh bertentangan dengan apa yang telah ditentukan lain oleh ketentuan perundang-undangan Hindia Belanda.

Demikian pula staatsblad 1882 Nomor 152 di mana Pengadilan Agama mempunyai kewenangan memeriksa perkara perkawinan dan kewarisan diganti dengan Staatsblad 1937 Nomor 116, hukum waris dihapus dari kewenangan Pengadilan Agama. Kompensasinya dibentuk pengadilan tingkat banding di Pulau Jawa dan Madura dengan Staatsblad 1937 Nomor 610. dan Pengadilan Agama Kalimantan Selatan dikeluarkan Staatsblad 1937 Nomor 638 dan Staatsblad 1937 Nomor 639 tentang Kerapatan Kadi dan Kerapatan Kadi Besar.

Menurut Alfian sebagai editor,³⁴ teori *receptie* berpijak pada asumsi dan pemikiran bahwa jika orang-orang pribumi mempunyai kebudayaan yang sama atau dekat dengan kebudayaan Eropa, maka

³³A. Rahmat Rosyadi dan M. Rais Ahmad, *op.cit.*, h. 74.

³⁴Alfian, Editor, *Segi-segi Sosial Masyarakat Aceh* (Jakarta: LP3S, 1977), h. 207-209.

penjajahan atas Indonesia akan berjalan dengan baik dan tidak akan timbul guncangan-guncangan terhadap kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Oleh karena itu, Pemerintah Hindia Belanda harus mendekati golongan-golongan yang akan menghidupkan hukum adat dan memberikan dorongan kepada mereka, untuk mendekatkan golongan hukum adat kepada pemerintah.

C. Fase Kemerdekaan

Fase atau masa kemerdekaan merupakan keadaan yang kondusif terhadap segala perkembangan, terutama pelaksanaan hukum Islam. Segala aspek kehidupan serba terbuka, kesempatan mengecap dunia pendidikan dengan segala konsekuensinya dan menyerap berbagai informasi dunia. Suasana merdeka membawa dampak yang luas bagi setiap orang.

Untuk melaksanakan hukum Islam secara utuh, maka ketiga pilar hukum tersebut harus berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum itu. Pilar yang telah disebutkan di atas yakni aparat hukum yang handal, peraturan hukum yang jelas, dan kesadaran hukum masyarakat yang tinggi, hendaknya dilakukan secara konsekuen. Ketiga pilar hukum itu mulai dibenahi, peraturan hukum keluar satu demi satu, dan kesadaran hukum masyarakat terus dipacu, walaupun belum mencapai titik secara optimal.

Satu hari sesudah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, tanggal 18 Agustus 1945, konstitusi negara Republik Indonesia bernama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang diketuai oleh Ir. Soekarno (Presiden Republik Indonesia yang pertama). Masa kemerdekaan ini dibagi ke dalam tiga orde, yakni orde lama, orde baru dan orde reformasi. Ketiga orde ini memiliki karakteristiknya masing-masing dalam bidang peradilan, karena dipengaruhi oleh kancah politik di eranya masing-masing. Oleh karena itu Lembaga Peradilan Agama dapat dilihat dari tahun ke tahun pada masa atau orde masing-masing.

1. Peradilan di Orde Lama (Tahun 1945-1966)

Orde lama ini sesungguhnya dalam perkembangan Lembaga Peradilan Agama bila dilihat dari produktifitas perundang-undangan adalah dari tahun 1945-1957, meskipun periode orde lama adalah mulai tahun 1945 sampai tahun 1966. Pada orde lama ini, diupayakan kembali untuk memasukkan syari'at Islam ke dalam Dasar Negara Republik Indonesia, yakni Pancasila pada sila pertama melalui Piagam Jakarta "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya" diganti dengan kata "Ketuhanan Yang Maha Esa", dari sembilan kata menjadi empat kata.

Hari kemerdekaan Negara Republik Indonesia, pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia menyatakan diri merdeka dan bebas dari penjajahan. Tanggal 18 Agustus 1945 hasil rumusan rancangan Undang-Undang Dasar oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Panitia sembilan) disahkan menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan Indonesia merdeka, berpengaruh terhadap tatanan sistem hukum nasional di Indonesia.

Dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang. Sedangkan pada ayat (2) pasal 24 UUD 1945 disebutkan bahwa susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang.

Penjelasan pasal 24 ayat (2) UUD Tahun 1945 disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman itu dilakukan dengan suatu kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari pengaruh dan turut campurnya kekuasaan pemerintah. Untuk Peradilan Agama berdasarkan pasal 24 tersebut belum pernah diatur dengan undang-undang tersendiri.³⁵

Tahun 1948 pernah dikeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-badan Kehakiman dimaksudkan untuk menyusun peradilan secara integral, akan tetapi undang-undang tersebut tidak pernah

³⁵Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain dan Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2005), h. 31.

dinyatakan berlaku. Tahun 1951 dikeluarkan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan Sipil. Peradilan Agama ditetapkan sebagai bagian dari Peradilan Swapraja, terutama bagi daerah selain Jawa dan Madura serta Kalimantan Selatan.

Sesuai pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditekankan bahwa hukum warisan kolonial Belanda masih tetap berlaku selama jiwanya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hazairin memahami pasal tersebut bahwa hukum kolonial Belanda yang hasil produk teori *receptie* dianggap tidak berlaku lagi harus *exit* karena bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah Rasul (*teori receptie exit*).³⁶

Perkembangan selanjutnya, ahli hukum Islam Indonesia berusaha agar bagaimana hukum Islam itu menjadi hukum nasional, upaya yang dilakukan melalui seminar nasional dalam pembentukan hukum, hukum Islam dijadikan sebagai salah satu sumber di samping hukum Eropa dan hukum Adat. Dengan populasi warga Negara Indonesia mayoritas beragama Islam, dan dalam memahami ajaran agamanya bersifat totalitas. Karena itu, tidak boleh dipisahkan nilai-nilai hukum Islam dari doktrin agama Islam. Dalam memahami keyakinan tersebut menurut Sayuti Thalib,³⁷ bahwa pertama, bagi orang Islam berlaku hukum Islam; kedua, hal tersebut sesuai dengan keyakinan dan cita-cita hukum, cita-cita moral; ketiga, hukum adat berlaku bagi orang Islam jika tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam. Pendapat Sayuti Thalib ini kontradiksi dengan teori *receptie*, sehingga pendapatnya dikenal dengan teori *receptie a contrario*.

Hukum waris berdasarkan Staatsblad 1936 Nomor 116 jo Staatsblad 1936 Nomor 610 yang menghapus hukum waris dari kewenangan Pengadilan Agama di Pulau Jawa dan Madura, serta Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan. Kedua Staatsblad tersebut

³⁶A. Rahmat Rosyadi dan M. Rais Ahmad, *op.cit.*, h. 82. Lihat pula, *Islamic Law Societ* di: http://www.scribd.com/doc/38116797/tentang_Sejarah-Peradilan-Agama.

³⁷Sayuti Thalib, *op.cit.*, h. 15-17.

dipandang tidak sesuai dengan cita-cita hukum dan cita-cita batin umat Islam sebagai mayoritas penduduk bangsa Indonesia, maka pada tahun 1957, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari'ah di luar Jawa dan Madura serta Kalimantan Selatan, dengan kewenangan dalam Bidang Perkawinan dan Kewarisan.

Secara politis, umat Islam gagal dalam menjalankan syari'at Islam sebagai eksistensinya dalam perjalanan dan perkembangan hukum Islam di Indonesia. Hal ini dikhawatirkan oleh legislatif, jangan sampai sejarah terulang untuk mendirikan negara di atas negara yang telah berdaulat.

Masa Orde lama ini pun bangsa Indonesia mengalami guncangan, baik pengaruh dari luar maupun dari dalam negeri. Pengaruh dari luar adalah dari bangsa penjajah khususnya Belanda, mereka ingin kembali menjajah bangsa Indonesia. Umat Islam memusatkan perhatiannya pada guncangan dari luar itu yang ingin menjajah kembali bangsa Indonesia. Umat Islam tidak lagi terfokus pada pelaksanaan hukum Islam, tetapi bagaimana bisa mengusir kolonial penjajah tersebut.

Orde ini, selain mengalami gangguan dari eksternal, juga mengalami gangguan dari internal bangsa Indonesia sendiri. Seperti yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI), dikenal dengan peristiwa Madiun tahun 1948 dan G 30 S/PKI tahun 1965.

Belum lama kemudian, bangsa Indonesia diguncang dan dikacaulakukan oleh bangsa Indonesia sendiri yang berasal dari DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia). Usaha untuk mendirikan negara Islam (DI/TII) yang dilakukan oleh Kartosuwiryo di Jawa Barat, Daud Beureuh di Aceh, Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan, semua gagal, karena wawasan kebangsaan yang lebih mewakili perdamaian negara Indonesia pada waktu itu.

Kemudian pada tahun 1965 PKI kembali membantai tokoh-tokoh umat Islam termasuk para jenderal, mulai dari jenderal berbintang empat hingga perwira menengah. Bukan hanya tokoh umat Islam yang dibantai, tetapi para Pahlawan Revolusi pun diculik,

disiksa, dan dibunuh oleh PKI. Kedua pemberontakan tersebut tujuannya ingin mengganti dasar negara Indonesia dengan dasar negara lain menurut kehendak pemberontak. PKI ingin mengganti menjadi negara komunis, sedangkan DI/TII ingin mengganti menjadi negara Islam.

Faktor-faktor tersebut merupakan faktor penghambat dalam pelaksanaan hukum Islam di masa orde lama. Sedangkan faktor pendukung dalam pelaksanaan hukum Islam, adalah dengan hadirnya beberapa tokoh Islam, baik dalam struktur pemerintahan maupun dalam legislatif termasuk lembaga-lembaga pendidikan.

Pelaksanaan hukum Islam khususnya di bidang perkawinan mengalami perdebatan yang alot tentang proses pemberlakuan dan atau rancangan undang-undang perkawinan. Tahun 1946-1955 legislasi hukum perkawinan diberlakukan sesuai dengan hukum peninggalan kolonial Belanda.³⁸ Pelaksanaan hukum Islam pada orde baru belum terlalu tampak, karena masih berkiprah pada hukum warisan kolonial Belanda.

Sebagai saksi sejarah terhadap umat Islam dalam masa orde lama ini di bawah pimpinan Bung Karno adalah berdirinya bangunan Masjid Istiqlal di Jakarta. Demikian juga bangunan pendidikan seperti pondok-pondok pesantren, terutama di pulau Jawa, baik pondok pesantren klasik maupun pondok pesantren modern (seperti Pondok Modern Darussalam Gontor Indonesia).

2. Peradilan di Orde Baru (1966-1998)

Pada orde baru, dikenal dengan penggantian pucuk pimpinan negara, dari Presiden Soekarno (selama 21 tahun dari tahun 1945-1966) ke Presiden Soeharto (selama 32 tahun dari tahun 1966-1998). Orde baru dan orde reformasi bila ditinjau dari yuridis formal Lembaga Peradilan Agama, melalui periodisasi tahun 1974-1989, 1989-2006, 2006-2009, dan 2009-sekarang. Orde lama tumbang kemudian muncul orde baru. Orde baru ini dalam proses sosialisasi hukum Islam mulai tampak dengan hadirnya berbagai perundang-

³⁸Lihat Tahir Mahmood, *op. cit.* h. 206.

undangan, dan pelaksanaan kegiatan keagamaan. Misalnya pelaksanaan MTQ pertama tingkat nasional tahun 1969 di Makassar. Kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya masih juga terbatas, karena pemerintah masih mencari pola yang cocok untuk kondisi masyarakat Indonesia yang heterogen. Hal yang menyulitkan bagi pemerintah orde baru adalah usaha kodifikasi dan unifikasi bidang hukum tertentu. Kesulitan ini disebabkan adanya semangat dan kemajemukan tatanan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang meliputi hukum Barat, hukum adat, dan hukum Islam.³⁹ Ketiga hukum tersebut merupakan sumber produk hukum nasional.

Demikian halnya pengembangan hukum Islam diarahkan pada upaya pembaruan secara terarah dan terpadu. Antara lain kodifikasi dan unifikasi dalam bidang hukum tertentu serta penyusunan perundang-undangan yang baru dibutuhkan untuk dapat mendukung pembangunan di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan.⁴⁰ Pembangunan di bidang hukum mulai diarahkan, termasuk hukum perkawinan yang bernuansa Islami.

Tahun 1967-1968 ada dua konsep tentang prinsip hukum perkawinan, yakni prinsip matrilineal dan prinsip patrilineal.⁴¹ Sedangkan Islam menganut prinsip patrilineal terutama dalam hukum kewarisan Islam. Pada bulan Juli 1972 diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk dijadikan sebagai undang-undang, dan pada bulan Januari 1974 rancangan tersebut disahkan sebagai undang-undang, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,⁴² dan tahun 1975 undang-undang tersebut telah terimplementasi ke masyarakat luas,⁴³ sehingga harus ditaati dan dilaksanakan sebagai suatu produk hukum Islam di Indonesia. Demikian halnya produk-produk hukum lainnya diundangkan untuk

³⁹M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), h. 17.

⁴⁰Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia* (Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), h. 18.

⁴¹Lihat Tahir Mahmood, *op. cit.*, h. 207.

⁴²Lihat *ibid.*

⁴³Lihat pula *ibid.*, h. 208.

kepentingan dan pengembangan materi hukum terutama materi hukum Islam.

Diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pelaksanaan hukum Islam mulai tampak di dalam masyarakat, terutama dalam lingkungan badan Peradilan Agama. Oleh karena itu, maka tugas-tugas badan Peradilan Agama menjadi meningkat dari 35.000 perkara menjadi 300.000 perkara dalam setiap tahun di seluruh Indonesia.⁴⁴ Dengan demikian hal itu mendorong usaha peningkatan sumber daya aparatur hukum, terutama dalam lingkungan Peradilan Agama.

Kemudian, berlaku pula Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan disusul dengan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Semua produk hukum Islam ini pada Lembaga Peradilan mengalami proses yang cukup alot, baik tingkat eksekutif, legislatif maupun yudikatif, bahkan reaksi masyarakat yang pro kontra, baik dari masyarakat non-muslim maupun dari internal umat Islam itu sendiri, lahirlah konsep perumusan KHI.

Perumusan KHI tersebut didasarkan atas landasan historis, yuridis, dan fungsional. Landasan historis adalah terkait dengan pelestarian hukum Islam di Indonesia, sekaligus merupakan perwujudan nilai-nilai yang bersifat abstrak dan sakral.

Landasan yuridis adalah terkait dengan tuntutan normatif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Selanjutnya, landasan fungsional adalah terkait dengan kebutuhan nyata dalam kehidupan masyarakat yang mengalami perubahan-perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

⁴⁴Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia* (Cet. 2; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), h. 117.

Sebelum lahir Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, terdapat *rechtsvacuum* mengenai wewenang tingkat kasasi Peradilan Agama (Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain dan Gemala Dewi, 2005: 33). Dengan dasar kevakuman hukum itu, Menteri Agama RI mengeluarkan Surat Keputusan No. 10 Tahun 1963 yang memberi wewenang dan kewajiban kepada Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama yang pada waktu itu dikenal Jawatan Peradilan Agama untuk melaksanakan tugas peradilan agama tingkat kasasi. Keputusan Menteri Agama tersebut dinyatakan tidak berlaku dan dicabut dengan Keputusan Menteri Agama RI No. 28 Tahun 1972 , setelah berlaku Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 10 ayat (1) disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan, Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal 10 ayat (2) (3) dan (4) disebutkan bahwa Kasasi berada di tangan Mahkamah Agung untuk semua lingkungan Peradilan Negara. Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan susunan kekuasaan dan acara dari badan-badan peradilan tersebut berada diatur dalam undang-undang tersendiri.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman tersebut Peradilan Agama disederajatkan dengan ketiga sistem peradilan lainnya, walaupun undang-undang tentang Peradilan Agama dikeluarkan pada Tahun 1989. Namun demikian, pada tahun 1974 dikeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memberikan kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa perkara-perkara yang berhubungan persoalan perkawinan bagi warga Negara yang beragama Islam. Sebagaimana dalam pasal 63 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan peradilan Agama dalam undang-undang ini ialah Peradilan

Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Peradilan Umum bagi yang lainnya.

Baik undang-undang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman maupun undang-undang Perkawinan menempatkan Peradilan Agama sama dengan ketiga peradilan lainnya. Namun demikian, pada pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa setiap keputusan Pengadilan Agama dibutuhkan pengukuhan oleh Pengadilan Negeri, walaupun pengukuhan tersebut sebatas persoalan administratif. Hal ini menunjukkan bahwa Peradilan Agama tidak setara dengan ketiga peradilan lainnya. Keadaan ini menurut Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain dan Gemala Dewi,⁴⁵ memperlihatkan masih adanya pengaruh teori *receptie*. Lembaga Peradilan Agama di era orde baru dalam perkembangannya mengalami kemajuan dengan periode tahun 1974-1989, dan 1989-2006 (memasuki orde reformasi).

a. Tahun 1974-1989 (orde baru)

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menunjukkan keberadaan lembaga Peradilan Agama semakin kuat. Tetapi dalam periode ini Peradilan Agama masih belum sempurna karena tidak diberikan kewenangan sepenuhnya untuk mengeksekusi putusannya, masih membutuhkan adanya pengukuhan Putusan Pengadilan Agama oleh Pengadilan Negeri.

Keadaan ini berlaku sampai diundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menegaskan bahwa tidak ada perbedaan kewenangan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura serta Kalimantan Selatan dengan Pengadilan Agama di luar kedua wilayah itu.

b. Tahun 1989-2006 (orde baru dan orde reformasi)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama memberikan landasan yuridis yang kuat,

⁴⁵Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain dan Gemala Dewi, *op.cit.*, h. 33.

walaupun dalam proses penetapannya memakan waktu satu tahun dari tanggal 28 Januari 1989 sampai tanggal 14 Desember 1989.

Penetapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tersebut menempatkan Peradilan Agama sama dengan lembaga peradilan lainnya. Tetapi dalam hal kompetensi untuk menyelesaikan perkara waris tidak sepenuhnya diberikan kewenangan itu, masih ada pilihan hukum bagi pencari keadilan.

Setelah berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah dikeluarkan tiga peraturan yaitu:

- 1) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990 tanggal 12 Maret 1990 tentang Petunjuk Pembuatan Penetapan sesuai pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- 2) Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; dan
- 3) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebar-luasan Kompilasi Hukum Islam.⁴⁶

Tuntutan reformasi di bidang hukum memberikan dampak yang besar terhadap perubahan lembaga peradilan di Indonesia. Kekuasaan kehakiman yang sebelumnya pembinaan justisial di bawah Mahkamah Agung dan pembinaan organisasi dan administrasi di bawah Departemen Kehakiman, Departemen Agama, Departemen Pertahanan dan Keamanan.

Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, dan diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka kewenangan Peradilan Agama semakin

⁴⁶Lihat, *Ibdi.*, h. 36.

eksis. Dalam pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, disebutkan:

- (1) Badan-badan peradilan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 ayat (1) secara organisatoris, administratif, dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung;
- (2) Ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur lebih lanjut dengan undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing.

Pada pasal 11 tersebut ditambah satu pasal yaitu pasal 11 A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa:

- (1) Pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 11 dilaksanakan secara bertahap, paling lama lima tahun sejak undang-undang ini mulai berlaku;
- (2) Pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial bagi Peradilan Agama waktunya tidak ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengalihan secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Presiden RI.

Pasal 11 dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman tersebut diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Perubahan pasal 11 tersebut adalah:

- (1) Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari keempat lingkungan peradilan;
- (2) Mahkamah Agung mempunyai kewenangan:
 - (a) mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua

- lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung;
- (b) menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;
 - (c) kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang;
 - (3) pernyataan tidak berlaku peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b), dapat diambil baik dalam pemeriksaan tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung kepada Mahkamah Agung;
 - (4) Mahkamah Agung melaksanakan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan dalam lingkungan peradilan yang berada di bawahnya berdasarkan ketentuan undang-undang.⁴⁷

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman inilah yang merupakan dasar lembaga Peradilan Agama dalam penyatuan atap dengan lembaga peradilan lainnya di bawah Mahkamah Agung, termasuk pengaturan organisasi, administrasi, dan finansial Peradilan Agama.

Tidak ada limit waktu pengalihan Peradilan Agama organisasi, administrasi, dan finansial selain karena terjadi tarik ulur kepentingan politik, juga karena masih terjadi polarisasi dalam menerima hukum Islam menjadi bagian dari integral sistem hukum nasional. Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam pasal 10 ayat (1) disebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Ayat (2) disebutkan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Pengalihan badan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 yang menetapkan bahwa organisasi, administrasi dan

⁴⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 11, ayat (1), (2), (3), (4).

finansial pada Badan Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama, Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syari'ah Provinsi dan Pengadilan Agama berada di bawah Mahkamah Agung.

Adanya perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 diubah lagi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Demikian juga disusul dengan perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 telah diletakkan kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan baik yang menyangkut bidang teknis yudisial maupun bidang non teknis yudisial telah berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia.⁴⁸

Perubahan kedua Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut membawa konsekuensi terhadap peraturan perundang-undangan yang menyangkut dengan badan-badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Bagi Peradilan Agama pada tahun 2006 diadakan perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Hasil dari perubahan di antaranya, pasal 3 disisipkan pasal 3A disebutkan di lingkungan Peradilan Agama dapat diadakan pengkhususan peradilan yang di atur dengan undang-undang. Pengalihan fungsi pengawasan dan pembinaan organisasi, administrasi dan finansial ke Mahkamah Agung, dan perubahan sekaligus penambahan kompetensi Peradilan Agama pasal 49 bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syari'ah.

⁴⁸Ahmad Mujahidin, *Peradilan Satu Atap di Indonesia* (Bandung: Rafika Aditama, 2007), h. 3.

Penjelasan pasal 49 (UU kedua PA tersebut) bahwa penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syariah, melainkan juga di bidang ekonomi syariah lainnya. Selanjutnya berdasarkan penjelasan pasal ini yang dimaksudkan dengan antara orang-orang yang beragama Islam adalah termasuk orang atau badan hukum dengan sendirinya menundukkan diri dengan suka rela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan pasal ini. Menjelang berakhirnya orde baru ini, keadaan Indonesia sangat mencekam terutama di Ibukota yakni Jakarta. Kaum mahasiswa bersatu padu dalam melawan rezim orde baru sehingga dituntut agar Presiden Soeharto mundur dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia yang sudah berkuasa lebih kurang 32 tahun lamanya.

3. Peradilan di Orde Reformasi

Perkembangan peradilan di fase/era reformasi ini ada dua periode dalam melahirkan undang-undang Peradilan Agama yakni periode 2006-2009 dan periode 2009-sekarang. Orde reformasi ini juga dikenal sebagai masa kebebasan dalam mengeluarkan pikiran dan pendapat. Demonstrasi terjadi dan bergulir di berbagai penjurur kota di Indonesia. Dalam era ini tumbanglah orde baru tahun 1998, lahirlah partai-partai Islam untuk dijadikan sebagai wadah aspirasi umat Islam. Namun, di balik kebebasan itu, lahir produk hukum Islam seperti undang-undang zakat, haji, perwakafan, hingga terakhir adalah undang-undang sisdiknas serta rancangan undang-undang pornoaksi dan pornografi. Sebelum diundangkan undang-undang tersebut oleh DPR, terjadi gelombang massa, baik yang mendukung maupun yang menolak terutama rancangan undang-undang tentang pornografi dan pornoaksi. Terakhir dalam Peradilan Agama sebagai produk pemikiran hukum Islam adalah undang-undang tentang hukum pidana Islam, yang kini sedang digodok di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Semoga dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat diundangkan, sehingga hukum Islam dalam lembaga Peradilan Agama di Indonesia semakin mencapai titik klimaks.

Orde reformasi ini pula, pemerintahan telah dilaksanakan oleh tiga orang presiden, masing-masing Presiden B.J. Habibie

dengan nuansa keilmuan dan keislaman. Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dengan nuansa keulamaan dan kekiyaian (pembaru). Presiden Megawati Soekarnoputri yang akrab dipanggil Mbak Mega dengan nuansa nasionalisme yang tinggi yang diwariskan oleh ayahandanya, yakni Presiden Soekarno. Kemudian Negara Republik Indonesia di bawah kendali Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan sapaan SBY Sang Demokrat yang didampingi oleh Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kalla dengan sapaan Bang Ucu Sang Pengusaha Sukses, dan selanjutnya Wakil Presiden RI adalah Prof. Dr. Boediyono seorang akdemisi sekaligus birokrasi.

Negara Republik Indonesia telah dipimpin oleh enam orang presiden, kesemuanya adalah beragama Islam. Tetapi juga belum melahirkan syari'at Islam secara menyeluruh, kecuali pemerintah memberikan otonomi khusus, yaitu pelaksanaan syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang telah dilanda peperangan yang dikenal dengan nama "operasi terpadu". Dalam hal ini masyarakat menginginkan agar pertikaian tersebut berakhir dengan damai, karena kedamaian dan ketenteraman adalah idaman bagi setiap warga negara. Terbukti dengan pemerintahan SBY – Kalla dapat mengakhiri konflik antara TNI – GAM dengan damai dan aman. Hal lain yang bernuansa positif yang dilakukan oleh SBY adalah pemberantasan korupsi di tubuh para penegak hukum dan pejabat tinggi di Republik Indonesia.

Begitu banyaknya ide dan gagasan SBY dalam memberikan kontribusi pemikiran bagi perjalanan bangsa Indonesia, ia juga tidak meninggalkan hal-hal yang bersifat spiritual. Sebagai orang Islam yang taat, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai ajaran Islam menjadi sangat fundamental dalam konteks kebangsaan dan kenegaraan.⁴⁹ Demikian halnya materi hukum Islam lainnya sangat diperhatikan untuk dikembangkan, tergantung para praktisi muslim yang ada di lembaga legislatif.

Perkembangan Peradilan Agama di Indonesia dari waktu ke waktu telah banyak dilalui, cukup banyak pengalaman yang dilewati

⁴⁹Usamah Hisyam, dkk., *SBY Sang Demokrat* (Jakarta: Dharmapena, 2004), h. 812.

bangsa Indonesia, khususnya umat Islam. Pelaksanaan hukum Islam di Indonesia, melalui beberapa tahapan, mulai dari fase prakemerdekaan (fase kerajaan atau kesultanan, zaman penjajahan) sampai masa pasca kemerdekaan dalam tiga masanya (orde lama, orde baru, dan era reformasi).

Hukum Islam sebagai materi hukum di lembaga Peradilan Agama pada masa prakemerdekaan (fase kerajaan atau kesultanan dan zaman penjajahan) ialah umumnya dengan memakai teori *receptie* yakni hukum Islam baru boleh dijalankan bilamana telah menjadi hukum yang hidup di dalam masyarakat adat. Namun menjelang detik-detik kemerdekaan tepatnya 22 Juni 1945 sampai 18 Agustus 1945 Piagam Jakarta diberlakukan. Pemberlakuan hukum Islam semakin kuat, apalagi termuat dalam sila pertama *Ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya*. Adanya kalimat syari'at Islam berarti hukum Islam diterapkan tetapi khusus bagi orang-orang Islam.

Pelaksanaan hukum Islam pada masa pascakemerdekaan, ditandai dengan orde lama dan mulai tanggal 18 Agustus 1945, dengan merujuk pada pasal 29 ayat (1) UUD 1945, dan tujuh kata pada Piagam Jakarta (*Ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya*) diganti menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pada orde baru, pelaksanaan hukum Islam mulai tampak dan berdasarkan pada undang-undang terutama dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan amandemennya, serta undang-undang lainnya termasuk kepres/inpres dan kepmen/permen.

Kemudian pada era reformasi, pelaksanaan hukum Islam semakin luas dengan lahirnya undang-undang yang khusus berlaku bagi umat Islam, lahirnya otonomi khusus pelaksanaan syari'at Islam (Aceh) dan partai-partai yang berasaskan Islam. Proses sosialisasi hukum Islam di Indonesia telah mengalami kemajuan yang mendekati titik klimaks, walaupun dengan melalui perjuangan dan pengorbanan, baik dalam menangkal serangan dari luar maupun dari dalam negeri.

Era reformasi ini, pengembangan materi hukum Islam selalu diperbincangkan, baik dalam lingkungan akademisi, praktisi maupun politisi. Hal yang paling hangat sekarang adalah menyangkut undang-undang tentang anti pornoaksi dan pornografi.

Aksi demonstrasi dari berbagai lapisan masyarakat silih berganti antara masyarakat yang pro dan kontra terhadap rancangan undang-undang tersebut. Para politisi di lembaga legislatif pun terjadi perdebatan yang hangat, akibat dari desakan masyarakat untuk segera diundangkannya dan demikian pula sebaliknya.

Peradilan Agama dalam lintas sejarah di Indonesia pada dasarnya hanya dua masa yakni masa prakemerdekaan dan pascakemerdekaan. Pada masa prakemerdekaan itu meliputi dua kurun waktu, yakni fase kesultanan/kerajaan dan zaman penjajahan. Pada zaman penjajahan inilah yang banyak dihasilkan hukum Islam ketimbang pada fase kesultanan/kerajaan. Pada masa pascakemerdekaan meliputi tiga kurun waktu, yakni orde lama, orde baru, dan era reformasi. Melihat perkembangan hukum Islam dari ketiga kurun waktu ini, maka pengembangan hukum Islam di luar hukum kekeluargaan cenderung dan terjadi dalam era reformasi ini. Pengembangan materi hukum Islam di Indonesia yakni meliputi kekhususan dalam ekonomi syari'ah.

Ekonomi syari'ah ini merupakan hasil dan bukti dari produk pengembangan materi hukum Islam pada lembaga Peradilan Agama di Indonesia, yang sebelumnya hanya meliputi bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Kini telah menjadi kewenangan lembaga Peradilan Agama di Indonesia untuk menyelesaikan perkara ekonomi syari'ah dalam masyarakat muslim di Indonesia.

Hal lain yang merupakan pengembangan materi hukum Islam ke depan adalah bidang selain keperdataan yakni menyangkut pidana Islam. Kini penerapan pidana Islam di Indonesia merupakan kebutuhan umat Islam di Indonesia, yakni dibuktikan dengan gerakan umat Islam terhadap penegakan dan penerapan syari'at Islam di Indonesia. Meskipun tidak dilaksanakan secara nasional, kini masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam telah menerapkannya dan

dilaksanakan berdasarkan pengakuan secara konstitusi nasional Indonesia.

Kalau penerapan syari'at Islam secara nasional, berarti materi hukum Islam semakin kompleks. Oleh karenanya, lembaga maupun sumber daya manusianya dipersiapkan sedini mungkin, sehingga dalam penerapan materi hukum Islam tersebut tidak salah sasaran. Kalau salah sasaran, akan menimbulkan persoalan dalam tubuh umat Islam sendiri. Akan tetapi jika telah dipersiapkan perangkat-perangkat pengembangan materi hukum Islam sedini mungkin, maka penegakan syari'at Islam tidak menimbulkan masalah yang konprehensif. Penegakan syari'at inilah yang tidak diatur dalam perubahan kedua undang-undang Peradilan Agama.

Perubahan kedua undang-undang tersebut membawa konsekuensi terhadap peraturan perundang-undangan yang menyangkut dengan badan-badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Bagi Peradilan Agama pada tahun 2006 diadakan perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, hasil dari perubahan di antaranya, pasal 3 disisipkan pasal 3A disebutkan di lingkungan Peradilan Agama dapat diadakan pengkhususan peradilan yang di atur dengan undang-undang. Pengalihan fungsi pengawasan dan pembinaan organisasi, administrasi dan *finansial* ke Mahkamah Agung, dan perubahan sekaligus penambahan kompetensi Peradilan Agama pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (revisi pertama) bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syari'ah.

Penjelasan pasal 49 (UU kedua PA), undang-undang tersebut menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syari'ah, melainkan juga di bidang ekonomi syari'ah lainnya. Selanjutnya berdasarkan penjelasan pasal ini yang dimaksudkan dengan antara orang-orang yang beragama Islam adalah

termasuk orang atau badan hukum dengan sendirinya menundukkan diri dengan suka rela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan pasal ini sebagai hasil dari orde reformasi.

Orde reformasi melahirkan dua kurun waktu atau periode dalam melahirkan peraturan perundang-undangan, yaitu periode tahun 2006-2009 dan 2009-sekarang sebagai buah dari era reformasi. Kedua kurun waktu ini melahirkan undang-undang Peradilan Agama menuju pada penyatuan atap lembaga peradilan dalam wadah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Lembaga-lembaga peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara) menyatu dalam naungan Mahkamah Agung RI.

a. Peradilan Agama di tahun 2006-2009

Pengaturan Lembaga Peradilan Agama yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kemudian dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (perubahan pertama), dan kemudian lahir Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (revisi/amandemen kedua).

Telah dipahami bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat yang tertib, bersih, adil, dan makmur, adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan.

Terkhusus lembaga Peradilan Agama merupakan lingkungan lembaga peradilan yang berada dalam naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana dan pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan dalam menegakan hukum dan keadilan.

Oleh karena itu, ketentuan lembaga Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan hukum masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta dalam kehidupan ketatanegaraan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara RI. Dengan demikian diperlukan undang-undang baru sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang sesuai dengan perkembangan zaman, lahirilah perubahan undang-undang (amandemen) tersebut.

Amandemen pertama Undang-Undang Peradilan Agama adalah dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (perubahan pertama), dan kemudian lahir amandemen kedua yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan bersumber pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni pada pasal 20 (amandemen pertama dan kedua), pasal 20A (amandemen kedua), pasal 21 (amandemen pertama), pasal 22A dan 22B (amandemen kedua), pasal 25, dan pasal 25A (amandemen kedua). Pasal-pasal tersebut bertalian dengan pelaksanaan undang-undang termasuk Peradilan Agama. Pasal-pasal tersebut memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun *Hijriyah*, yaitu kewenangan baru Peradilan Agama. Dengan bersumber pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) serta Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4338).

Hasil dari reformasi tentang Peradilan Agama adalah dengan mengamandemen pertama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (perubahan pertama). Perubahan pertama undang-undang Peradilan Agama ini, belum secara menyeluruh mengatur penyatuan atap lembaga Peradilan Agama pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Oleh karenanya diperlukan undang-undang yang lebih memadai menampung aspirasi masyarakat Islam yang berkembang, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

b. Peradilan Agama di tahun 2009-sekarang

Perjalanan sejarah perundang-undangan Peradilan Agama terus berlanjut sesuai dengan perkembangan zaman dan hukum di Indonesia. Oleh karena itu kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan sehingga perlu diwujudkan adanya lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa dalam memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, dimana keberadaam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan bersumber kepada pasal 20 (amandemen pertama dan kedua), pasal 20A (amandemen kedua), pasal 21 (amandemen pertama), pasal 22A dan 22B (amandemen kedua), pasal 25, dan pasal 25A (amandemen

kedua) Undang-Undang Dasar Negara RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3316) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara RI Nomor 4958).

Orde reformasi melahirkan amandemen kedua Undang-Undang Peradilan Agama yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (amandemen kedua). Undang-undang tersebut menjelaskan: pertama, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan sehingga perlu diwujudkan adanya lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa dalam memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat; kedua, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ketiga, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk undang-undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Hasil amandemen kedua ini berdasar pada: pertama, pasal 20, pasal 21, pasal 24, dan pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958); ketiga, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611); keempat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); Dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia.⁵⁰ Harapan selanjutnya adalah lahirnya undang-undang materiil tentang Kompilasi Hukum Islam yang dapat menyertai undang-undang amandemen kedua Peradilan Agama tersebut.

D. Pengaruh dan Perkembangan Peradilan Agama

Sejarah pertumbuhan dan perkembangan Peradilan Agama di Indonesia dipengaruhi oleh dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal.

1. Pengaruh faktor internal

Lembaga Peradilan Agama bila dianalisis dengan hukum internal, bahwa keberadaan Peradilan Agama pada jaman kerajaan dan penjajahan Belanda membawa dampak positif bagi fondasi peradilan Islam/syari'ah di Indonesia, karena dari jaman tersebutlah keberadaan peradilan agama dapat dimungkinkan menjadi peradilan yang moden dan mandiri untuk menciptakan kepastian hukum

⁵⁰Lihat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (revisi kedua).

berdasarkan syari'at Islam. Atas dasar pemikiran hukum internal tersebut, maka sangat diperlukan upaya maksimal perubahan dan penyempurnaan perundang-undangan Peradilan Agama, yang secara internal untuk kepentingan para pencari keadilan yang beragama Islam dan sedapat mungkin menggunakan dan melaksanakan syari'at Islam dan al-Qur'an.

Analisis hukum internal serta khususnya Peradilan Agama sangat dipengaruhi oleh perubahan perundang-undangan kekuasaan kehakiman yang merupakan peradilan satu atap dan sebagai peradilan yang mandiri serta modernisasi peradilan yang berdasarkan syari'at Islam yakni al-Qur'an, yang selama ini bersandar pada undang-undang kekuasaan kehakiman untuk peradilan umum, dengan adanya undang-undang penyatuan atap maka keberadaan dan kedudukan Peradilan Agama sama dengan peradilan-peradilan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bawah Mahkamah Agung RI.

Proses upaya perubahan undang-undang Peradilan Agama membawa dampak positif, yang secara hukum internal menguntungkan para pencari keadilan, khususnya yang beragama Islam. Jika terjadi sengketa atau perkara maka dapat diajukan kepada Peradilan Agama, dimana upaya pilihan hukum (hak opsi) menjadi lebih diperkecil/dipersempit dan sangat dibatasi serta selalu diintimidasi. Segala keputusan selalu berjalan dengan kebijakan para penguasa.

2. Pengaruh faktor eksternal

Analisis secara faktor eksternal terhadap keberadaan Lembaga Peradilan Agama pada zaman kerajaan dan Penjajahan Belanda, saat itu kolonial Belanda yang berupaya memecah belah umat muslim pada masa itu, tidak berhasil, karena dengan keberadaan Peradilan Agama sudah mawadahi kaum muslim yang bersengketa tidak dipengaruhi oleh kekuasaan kolonial Belanda, yaitu dengan sistim hukum yang berlaku di kerajaan Belanda. Pemikiran faktor eksternal yang membawa para ulama dan santri untuk

mengembangkan syari'at Islam yang berasal dari Negara Arab agar diterapkan di Indonesia, yang disesuaikan dengan hukum adat yang berkembang di dalam masyarakat pluralisme di Indonesia.

Perkembangan Peradilan Agama yang secara faktor eksternal mengalami perubahan dalam perundang-undangan kekuasaan kehakiman yang telah disempurnakan menjadi peradilan yang modern yaitu sebagai peradilan satu atap, untuk menunjukan pada dunia internasional dalam era globalisasi dan pasar bebas, diharapkan dapat menyelesaikan sengketa kesyari'ahan pada dunia internasional terhadap bisnis syari'ah dengan prinsip-prinsip kesyari'ahan yang telah berkembang sangat pesat pada dunia internasional. Perubahan secara faktor eksternal dampak Positif bagi Peradilan Agama, dengan adanya kewenangan baru tentang ekonomi syari'ah dan isbat kesaksian rukyatul hilal, agar jika terjadi sengketa maka sudah terdapat Peradilan Agama yang bersifat internasional didalam penyelesaian sengketa kesyari'ahan bagi kaum muslim yang berada di Indonesia maupun yang bertempat tinggal di luar wilayah hukum Negara Indonesia/luar negeri. Semua warga negara Indonesia yang beragama Islam seyogyanya memberlakukan penerapan syari'at Islam sebagai sistem hukum Islam di Indonesia. Tujuan dari pelaksanaan sistem hukum Islam tersebut adalah untuk memberikan kemaslahatan bagi umatnya baik di dalam maupun di luar lingkungan umat Islam itu sendiri.

Sebagai pertimbangan hukum jika terjadi persengketaan yang terjadi antara keluarga yang di dalamnya terdiri atas orang-orang muslim dan non muslim. Apabila akan terjadi sengketa antara subjek hukum yang berlainan agama dan difasilitasi dengan lembaga penundukan diri.⁵¹ Artinya hukum yang badan hukumnya didirikan bersifat umum, atau persesorangan yang beragama selain Islam dapat menundukan diri kepada hukum Islam dalam hal terjadinya sengketa

⁵¹Ahmad Kamil, M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), h. 2.

di bidang bisnis atau ekonomi syari'ah.⁵² Demikianlah penegasan hukum Islam dalam lembaga Peradilan Agama dengan kemandirian dan kewenangan dalam memutuskan perkara semakin eksis setelah Peradilan Agama berada pada wadah satu atap dengan lembaga peradilan lainnya yakni pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Persoalan-persoalan atau kasus hukum yang terjadi pada masyarakat Islam dan melibatkan masyarakat non muslim, telah menjawab bahwa masyarakat akan patuh dan tunduk pada hukum yang menjadi subjek dalam penegakan keadilan dalam masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu, kini wujud lembaga Peradilan Agama di Indonesia termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu, eksistensi lembaga Peradilan Agama di Indonesia semakin kuat dan jelas dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka eksistensi Lembaga Peradilan Agama semakin kuat. Semakin eksis lagi dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (revisi/amandemen kedua).

⁵²Lihat, *ibid.* Lihat pula, *Islamic Law Societ* di: [http://www.scribd.com/doc/38116797/tentang Sejarah-Peradilan-Agama](http://www.scribd.com/doc/38116797/tentang-Sejarah-Peradilan-Agama).

BAB IV

PERSPEKTIF DAN PROSPEKTIF PERADILAN AGAMA DI INDONESIA

Eksistensi Peradilan Agama sebagai lembaga yang menekuni materi perkara dalam hukum Islam, dalam penerapannya terus berkembang sejalan dengan perkembangan bangsa Indonesia. Lembaga Peradilan Agama berkembang di Indonesia, karena penduduknya mayoritas beragama Islam dan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai kapasitas ilmu yang berkualitas. Terbukti dengan berhasilnya mengusir bangsa penjajah dari bumi Indonesia, walaupun senjata dan peralatan lainnya sangat sederhana bila dibandingkan dengan kaum penjajah. Tetapi karena bangsa Indonesia cerdas dan bersatu, bangsa Indonesia berhasil mengusir kaum penjajah, penghianat, dan para pemberontak. Karena itu diperlukan suatu komitmen seluruh komponen bangsa Indonesia untuk hidup dalam dunia kemerdekaan, salah satunya adalah dengan melahirkan hukum nasional.

A. Politik Hukum Nasional

Politik hukum nasional dimaksudkan sebagai politik pemerintah dalam berbangsa dan bernegara dalam wadah negara Republik Indonesia. Mengurus negara berarti membangun bangsa, membangun dan menata bangsa dengan jalur yang benar yakni berdasarkan peraturan perundang-undangan, berarti rakyat makmur dan sejahtera sebagai suatu cita-cita bangsa Indonesia.

Cita-cita mulia ini lahir pada suatu bangsa bila pemerintah dan seluruh pengendalinya mempunyai komitmen yang mulia yakni dengan cita-cita makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran. Keadilan dan kemakmuran ini lahir tentu dengan melalui perjuangan di antaranya adalah dengan mengusir kaum penjajah dan termasuk kaum pemberontak yang tumbuh dalam bangsa Indonesia sendiri. Untuk menghilangkan kaum penjajah dan pemberontak dari bumi Indonesia, diperlukan suatu taktik dan strategi yang andal, kendatipun kaum penjajah memiliki peralatan yang modern.

Bangsa Indonesia menggunakan taktik dan strategi untuk mengimbangi musuh-musuh yang memiliki peralatan lengkap. Salah satu taktik dan strategi yang tidak diperhentikan dengan saksama oleh kaum penjajah, penghianat, dan pemberontak adalah umat Islam yang gagah berani dalam menghadapi musuh-musuhnya. Umat Islam tampil di depan untuk mengambil bagian dalam menegakkan kebenaran. Keberanian itu muncul karena keyakinan, antara lain bahwa membela tanah air adalah bagian dari tugas dan tanggung jawab bagi setiap muslim. Tugas dan tanggung jawab tersebut merupakan bagian dari hukum Islam. Hasil-hasil dari perjuangan umat Islam tersebut antara lain hukum Islam sebagai sumber hukum nasional.

Sebelum penjajah Belanda datang ke Indonesia, Belanda mempunyai asumsi bahwa Indonesia yang diberi nama Hindia Belanda merupakan wilayah yang belum dihuni oleh manusia yang mempunyai aturan. Ternyata Indonesia sudah mempunyai aturan dan diberlakukan yakni hukum Islam. Asumsi penjajah Belanda itu sangat jauh dari kenyataan yang ada di Indonesia, sebab hukum Islam sudah lama adanya jauh sebelum datangnya bangsa penjajah.¹

Islam yang merupakan agama wahyu telah diterima oleh bangsa Indonesia jauh sebelum datangnya kaum penjajah. Masuknya Islam ke Indonesia masih mempunyai pendapat yang kontradiksi. Menurut Prof. Dr. H. Muchsin, S.H. dalam bukunya Masa Depan Hukum Islam di Indonesia, bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad I Hijriah, dan ada yang mengatakan bahwa masuknya Islam ke Indonesia pada abad VII Hijriah atau pada abad ke-13 Masehi.² Sedangkan penjajah Belanda datang ke Indonesia pada abad ke-18 M. Dengan masuknya Islam ke Indonesia berarti secara hukum, aturan yang diberlakukan adalah berdasarkan hukum Islam. Hukum Islam dilaksanakan dan dipatuhi bagi pemeluk agama Islam, dan bagi non-muslim hukum Islam tersebut dihormati.

¹Lihat Musyirah Sunanto, *Sejarah Peradaban Islam Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 29-34.

²H. Muchsin, *Masa Depan Hukum Islam di Indonesia* (Surabaya: STIH Iblam, 2004), h. 22.

Pada pertengahan abad ke-14 Masehi, sebuah fakta sejarah menunjukkan bahwa ada seorang ahli agama Islam muncul dan berpengaruh di Indonesia yang berasal dari Samudra Pasai. Tokoh agama itu bernama Sultan Malikul Zahir. Dengan munculnya Sultan Malikul Zahir dari Samudra Pasai itu, berdatanganlah para ahli hukum ke Samudra Pasai terutama dari Kerajaan Malaka dan mereka belajar untuk membahas permasalahan hukum, terutama hukum Islam.³ Kemudian bermunculan kerajaan-kerajaan Islam dan berusaha mengislamkan rakyatnya, sehingga menerapkan hukum Islam kepada para penduduknya. Kerajaan yang datang kemudian itu antara lain Kerajaan Mataram, Kerajaan Banten, dan Kerajaan Cirebon.

Mengenai pemberlakuan hukum Islam di Indonesia dalam lintas sejarah, penulis telah menguraikan terdahulu pada bab II. Namun pemberlakuan hukum Islam sebelum Indonesia merdeka banyak dipengaruhi oleh penjajah Belanda, mempunyai keterkaitan pada pembahasan berikut, terutama yang menyangkut teori pemberlakuan hukum Islam di Indonesia. Penerapan hukum Islam dalam lingkungan peradilan, khususnya pada Lembaga Peradilan Agama di Indonesia adalah sangat dipengaruhi oleh konstalasi politik, politik dalam negeri maupun luar negeri. Karenanya diperlukan suatu komitmen masyarakat muslim yang tinggi terhadap pembangunan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang mayoritas berpenduduk Islam. Bangsa Indonesia khususnya kaum muslim untuk mengambil bagian yang integral dalam pembangunan bangsa ini, terutama dalam penerapan hukum Islam di Peradilan Agama, demikian pulan pada peradilan lainnya agar dijunjung tinggi keadilan dan kebenaran sebagai harapan masyarakat pencari keadilan.

B. Pengaruh Teori Pemberlakuan Hukum Islam

Sebuah teori umum menjelaskan bahwa jika teori dalam pemberlakuan hukum itu mengandung kebenaran dan keadilan, akan dipatuhi oleh lapisan masyarakat, termasuk terori hukum Islam. Teori hukum Islam sebagai sebuah tatanan hukum nasional yang dipegangi dan ditaati oleh mayoritas bangsa Indonesia adalah hukum yang telah

³Lihat Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Universitas Yarsi, 1999), h. 69.

hidup dalam masyarakat, merupakan bagian dari ajaran dan keyakinan umat Islam yang eksis dalam kehidupan hukum nasional Indonesia serta merupakan bahan dalam pembinaan, pemberlakuan, dan pengembangannya.⁴

Untuk menyatakan bahwa hukum Islam sebagai sumber hukum nasional, perlu diketahui beberapa teori yang berkenaan dengan pemberlakuan hukum Islam di Indonesia. Teori-teori tersebut adalah: Teori Syahadat/Kredo, teori *Receptio in Complexu*, teori *Receptie*, teori *Receptie Exit*, teori *Receptio A Contrario*, dan teori *Eksistensi*.

1. Teori syahadat/kredo

Ajaran agama Islam masuk wilayah Indonesia sekaligus proses pelaksanaan Peradilan Islam/Peradilan Agama melalui jalur perdagangan pada daerah-daerah pesisir secara damai tanpa melalui gejolak, sehingga norma-norma agama Islam oleh masyarakat Indonesia bersamaan dengan penyebaran dan penganut agama Islam oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Akhirnya dengan timbulnya komunitas-komunitas atau golongan-golongan masyarakat Islam atau (kini organisasi kemasyarakatan), maka kebutuhan akan lembaga peradilan dalam memutus perkara berdasarkan hukum Islam semakin diperlukan oleh masyarakat muslim.

Lembaga Peradilan Agama di Indonesia mempunyai proses sejarah yang cukup panjang dan melelahkan bahkan penuh dengan pengorbanan. Karena itu, jauh sebelum kemerdekaan, sistem peradilan agama sudah lahir di Indonesia. Sebelum Islam datang ke Indonesia telah ada dua macam peradilan, yaitu Peradilan Pradata dan Peradilan Padu. Materi hukum Peradilan Pradata bersumber dari ajaran Hindu dan ditulis dalam Papakem. Sedangkan Peradilan Padu

⁴Lihat Hj. Andi Rasdiyanah, "Problematika dan Kendala yang Dihadapi Hukum Islam dalam Upaya Transformasi ke dalam Hukum Nasional", *Makalah* disajikan pada Seminar Nasional dan Reuni I Ikatan Alumni IAIN (kini UIN) Alauddin Ujung Pandang (kini Makassar) Komisariat Fakultas Syari'ah (kini Syari'ah dan Hukum) tanggal 1-2 Maret 1996, h. 4. Hubungan antara hukum Islam dengan hukum nasional terlihat pada tiga bentuk, yaitu ; a. Hukum Islam yang berlaku khusus bagi umat Islam, b. hukum Islam masuk ke dalam hukum nasional secara umum yang memerlukan pelaksanaan secara khusus, dan c. hukum Islam masuk ke dalam undang-undang yang berlaku secara umum bagi seluruh warga negara Indonesia.

menggunakan hukum materiil tidak tertulis yang berasal dari kebiasaan masyarakat. Pada pratiknya, Peradilan Pradata menangani perkara-perkara yang berhubungan dengan wewenang raja, sedangkan Peradilan Padu menangani perkara-perkara yang tidak berhubungan dengan wewenang raja.⁵

Kedudukan dan keberadaan dua sistem peradilan tersebut berakhir setelah raja Mataram menggantikan dengan sistem Peradilan Serambi yang berasaskan Islam. Penggantian ini bertujuan untuk menjaga integrasi wilayah kerajan Mataram. Peradilan Agama sebagai bagian dari mekanisme penyelenggaraan kenegaraan pernah mengalami pasang surut ketika Sultan Agung meninggal dan digantikan oleh Amangkurat I.⁶ Amangkurat I pernah menutup Peradilan Agama dan menghidupkan kembali Peradilan Pradata, selanjutnya masa ini Peradilan Agama eksis kembali.⁷ Eksisnya peradilan tersebut dikarenakan masyarakat semakin banyak memeluk agama Islam dan sekaligus banyak yang mempelajarinya sehingga mereka menemukan pula banyak hikmahnya.

Kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara seperti kerajaan Pasai, Demak, Cirebon, Buton dan Ternate telah memberlakukan hukum Islam dalam wilayah kekuasaannya. Paham yang dianut (*legal system*) pada umumnya bermazhab Syāfi'ī. Kerajaan tersebut telah menerapkan norma-norma hukum Islam dan masyarakat memberlakukannya. Pemberlakuan hukum Islam oleh kerajaan Islam tersebut tidak parsial. Sesuai dengan teori penerima otoritas hukum Islam yang dijelaskan oleh AR. Gibb dalam bukunya *The Modern Trends in Islam* yang dikutip A. Rahmat Rosyadi dan M. Rais Ahmad,⁸ teori tersebut menegaskan bahwa orang-orang Islam menaati hukum Islam karena diperintahkan oleh Allah dan rasul-Nya. Oleh karena itu, apabila masyarakat kerajaan tersebut telah menerima Islam sebagai

⁵Lihat, Ahmad Mujahidin, *Peradilan Satu Atap di Indonesia* (Cet. I; Bandung: PT Rapika Aditama, 2007), h. 66.

⁶*Ibid.*

⁷Lihat, *ibid.* Lihat pula, R. Tresna, *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1977), h. 18.

⁸A. Rahmat Rosyadi dan M. Rais Ahmad, *Formalisasi Syari'at Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Ghaliah Indonesia, 2006), h. 74.

agamanya, maka secara otomatis akan menerima otoritas hukum Islam terhadap dirinya. Bagi orang Islam, hukum Islam adalah kehendak dan perintah Allah dan tradisi rasul-Nya.⁹ Demikian pula teori *krido* atau teori *syahadat* yaitu teori yang mengharuskan pelaksanaan hukum Islam oleh orang yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai konsekuensi logis dari pengucapan kridonya.¹⁰ Pengucapan syahadat atau membaca dua kalimat syahadat merupakan pengikraran seseorang untuk mengaku dan bersumpah dalam memeluk agama Islam sebagai agama yang diyakini kebenarannya, selanjutnya untuk dipatuhi dan dilaksanakan segala perintah dan larangan Allah swt.

Lahirnya hukum Islam pada Peradilan Agama sebagai hukum yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, melaksanakan syari'at Islam yang dilengkapi dan ditata dengan institusi-institusi kelembagaan keagamaan, seperti Pengadilan Agama merupakan fardu kifayah (kewajiban sosial/kewajiban secara menyeluruh bagi masyarakat muslim). Demikian halnya pada kerajaan-kerajaan dan kesultanan-kesultanan sebelumnya selalu membentuk badan-badan peradilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara berdasarkan hukum acara peradilan Islam (*mukhasamat*). Kewajiban ini merupakan salah satu pendekatan syariat Islam.

Kerajaan dan kesultanan berdasar dari pendekatan syari'at itu untuk menerapkan hukum Islam yang dipandang sebagai hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat sekaligus menjadi budaya hukum Indonesia pada masanya.¹¹ Penerapan hukum Islam tersebut dipandang bahwa Lembaga Peradilan/Pengadilan Agama pada masa kerajaan dan kesultanan di eranya sudah menunjukkan keberhasilannya dalam menyelesaikan perkara kewarisan bagi orang-orang Islam.¹² Penyelesaian sengketa kewarisan terhadap umat Islam masih sangat terbatas, karena masih sangat dikuasai oleh pengaruh penguasa.

⁹Lihat, *ibid*.

¹⁰Imam Syaukani, *loc.cit*.

¹¹A. Rahmat Rosyadi dan M. Rais Ahmad, *op.cit.*, h. 74.

¹²*Ibid*.

Imam Syaukani berpendapat tentang hukum Islam,¹³ biasanya pemberlakuan hukum Islam pada kerajaan-kerajaan Islam itu sangat bergantung pada mazhab yang dianut oleh para Sultan yang berkuasa. Selanjutnya dikatakan walaupun pemberlakuan hukum Islam berdasarkan pada mazhab yang dianut oleh para Sultan, tetapi hukum Islam telah mengubah pola pemikiran dan cara pandang kesadaran masyarakat Indonesia sehingga menjadikannya sebagai adat dan perilaku keseharian bagi masyarakat. Sebagai contoh pada masyarakat Aceh menyatakan, hukum Islam adalah adatnya, adatnya adalah hukum Islam. Masyarakat Minangkabau berlaku kaidah, adat bersendikan syarak, syarak bersendikan Kitabullah.

Demikian juga di Pulau Jawa, pengaruhnya sangat kuat sehingga *al-Qur'an*, *al-Sunnah*, *ijma'*, dan *qiyas* telah dijadikan ukuran kebenaran ilmiah dan pedoman perilaku masyarakat, sehingga kerajaan dan kesultanan Islam saat itu telah berhasil mempengaruhi dalam keberagamaan masyarakat Indonesia untuk menjalankan syari'at Islam.¹⁴

Karenanya menjalankan syari'at Islam merupakan suatu kewajiban bagi masyarakat muslim dan dilaksanakan dengan penuh kesadaran kendatipun berawal dari perintah raja/sultan. Lambat laun masyarakat muslim dengan penuh kesadaran, hukum-hukum agama Islam dilaksanakan dengan baik, selanjutnya turun-temurun kepada keluarga masyarakat muslim lainnya.

2. Teori receptio in complexu, teori receptie, dan teori receptie exit

Zaman pemerintahan VOC, penjajah Belanda mengakui hukum Islam di Indonesia sejak tahun 1855. Penjajah Belanda mempertegas pengakuan terhadap pemberlakuan hukum Islam di Indonesia, yang diperkuat oleh Londewijk Willem Christian van den Berg dengan teori receptio in complexu,¹⁵ yang memberi kebebasan bagi pemeluk agama di Indonesia.

¹³Imam Syaukani, *op.cit.*, h. 68.

¹⁴A. Rahmat Rosyadi dan M. Rais Ahmad, *loc.cit.*

¹⁵H. Muchsin, *Masa Depan Hukum Islam di Indonesia*, *op. cit.*, h. 23.

Teori *receptio in complexu* adalah teori yang mengatakan bahwa setiap penduduk berlaku hukum agamanya masing-masing. Bagi penduduk yang beragama Islam tentu diberlakukan padanya hukum Islam. Demikian juga dengan penduduk yang beragama lain diberikan kepadanya untuk diberlakukan hukum agamanya. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29.

Munculnya teori *receptio in complexu* ini disebabkan kesadaran masyarakat akan taat kepada ajaran agamanya. Teori ini berasal dari pakar hukum Islam asal Belanda yang tokohnya adalah Londewijk Willem Christian van den Berg, selain ahli dalam hukum Islam juga ahli dalam politik. Dengan berlakunya teori *receptio in complexu* ini di Indonesia, dibentuklah lembaga peradilan. Adanya pengakuan lembaga peradilan, maka terbentuklah Pengadilan Negeri (*Landraad*) dan Pengadilan Agama (*Priesterrad*). Hukum Islam berlaku bagi penganutnya di zaman itu, dan juga hukum agama lain berlaku bagi pemeluknya.

Pemberlakuan teori ini mendapat respons yang baik bagi masyarakat Indonesia, karena merasa diperhatikan oleh kaum penjajah Belanda. Dengan adanya teori *receptio in complexu*, maka para penganut agama dalam menjalankan ajarannya tidak ragu-ragu lagi. Di balik teori *receptio in complexu* itu, ada upaya untuk menentang pemberlakuannya, maka muncul teori lain. Teori yang menentang teori *receptio in complexu* adalah teori *receptie*. teori *receptie* adalah teori yang mengatakan bahwa hukum Islam itu tidak mesti otomatis berlaku bagi pemeluknya. Teori ini menegaskan bahwa hukum Islam berlaku bagi pemeluknya apabila sudah diakui dan diterima oleh masyarakat adat serta sudah legal menjadi hukum adat bagi masyarakatnya.

Teori *receptie* ini pertama kali dikemukakan oleh seorang ahli hukum adat Indonesia bernama Cornelis van Vollenhoven dan Christian Snouck Hurgronje. Cornelis van Vollenhoven dinamakan sebagai ahli hukum adat Indonesia karena ia peletak pertama tentang hukum adat di Indonesia, sekaligus digelar sebagai peletak dasar pembuat sistem hukum adat di Indonesia.¹⁶ Dengan berlakunya teori

¹⁶Lihat *ibid.*, h. 24.

receptie ini, maka hukum Islam tidak lagi diberlakukan berdasarkan ajaran agama Islam, tetapi hukum Islam dapat diberlakukan bila telah mendapat legitimasi dari hukum adat. Hukum adat lebih tinggi kedudukannya daripada hukum Islam pada waktu teori *Receptie* berlaku. Umat Islam merasa tertekan oleh pengaruh yang dibawa oleh Cornelis van Vollenhoven dan Christian Snouck Hurgronje dalam teori receptie.

Pengaruh penjajah sangat menentukan aturan yang berlaku di suatu tempat atau wilayah. Siapa yang berkuasa, teorinyalah yang diberlakukan. Hukum pun diberlakukan tergantung pada pembuat kebijakan dan aturan. Meskipun teori itu baik tetapi tidak dikehendaki oleh penguasa dalam hal ini penjajah, maka otomatis teori itu tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan perbuatan hukum. Teori receptie ini sebenarnya tidak mendapat simpatik dari masyarakat Islam di Indonesia.

Karena teori receptie dianggap meremehkan hukum Islam, maka para pemimpin Islam bangkit dan menantang teori receptie tersebut, sehingga muncul teori receptie exit (teori yang menantang teori receptie-nya snouck). Perlawanan umat Islam semakin gencar menentang yang mensyaratkan berlakunya hukum Islam dengan mengikuti hukum adat, artinya hukum Islam berlaku setelah mendapat legitimasi dari hukum adat. Maka pada tanggal 22 Juni 1945 lahirlah Piagam Jakarta (*the Jakarta Charter*).

Ketika lahirnya Piagam Jakarta setelah dibentuk oleh panitia kecil yang disebut panitia sembilan mencapai kesepakatan untuk mengkompromikan antara nasionalis Islam dan nasionalis sekuler. Panitia sembilan itu terdiri atas delapan orang di antaranya beragama Islam dan satu orang beragama Kristen. Mereka adalah: Soekarno, Muhammad Hatta, A. A. Maramis, Abikoesno Tjokrosoedjoso, Abdul Kahar Muzakkir, Haji Agus Salim, Achmad Soebardjo, Abdul Wahid Hasjim, dan Muhammad Yamin.¹⁷ Perbedaan yang menonjol dari

¹⁷H. Endang Syaifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*: “Dan Sejarah Konsensus Nasional antara Nasionalis Islami dan Nasionalis Sekuler tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1945-1959” (Cet. I; Bandung: Pustaka Perpustakaan

sembilan orang tersebut adalah pemikiran dari nasionalis Islam sekuler, nasionalis Kristen sekuler, dan nasionalis Islam.

Perimbangan antara pemikiran Islam dan sekuler adalah empat berbanding lima (4:5). Empat orang yang berpikiran muslim murni dan lima orang yang berpikiran mencampurkan antara agama dan sekuler. Pemikiran yang benuansa agama dan sekuler selalu diperdebatkan. Kesembilan orang tersebut adalah wakil rakyat Indonesia yang representatif dalam pengambilan keputusan tentang kepentingan bangsa Indonesia. Mereka meliputi nasionalis Islam, nasionalis Islam sekuler, dan nasionalis Kristen sekuler, yaitu:¹⁸

Pertama: nasionalis Islam:

- Abikoesno Tjokrosoedjoso (tokoh Partai Syarikat Islam Indonesia);
- Abdul Kahar Muzakkir (pemimpin Muhammadiyah);
- Haji Agus Salim (pendiri Partai Penysadar); dan
- Abdul Wahid Hasjim (tokoh Nahdatul Ulama).

Kedua: nasionalis Islam sekuler:

- Soekarno (Presiden Republik Indonesia).Mohammad Hatta (Wakil Presiden Republik Indonesia);
- Ahmad Soebardjo (dari Partai Masyumi); dan
- Muhammad Yamin (tokoh nasional).

Ketiga: nasionalis Kristen sekuler:

- A. A. Maramis.

Dengan demikian, maka dalam Piagam Jakarta tersebut menguatkan posisi hukum Islam dalam hukum nasional dengan kalimat yang bernuansa islami yaitu “Ke-Tuhan-an, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Panitia pembentukan kemerdekaan pun, yakni delapan dari sembilan orang anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disebut dengan (PPKI) adalah beragama Islam.

Salman ITB Kerjasama dengan Lembaga Studi Islam Bandung, 1401 H – 1981 M), h. 26.

¹⁸*Ibid.*, h. 39.

3. Teori receptio a contrario dan teori eksistensi

Pemberlakuan hukum Islam di Indonesia semakin kuat setelah teori receptie-nya Snouck dibantah dan tidak diberlakukan lagi yang menghasilkan teori receptie exit. Selain teori receptie exit yang menguatkan posisi hukum Islam di Indonesia, muncul lagi teori receptio a contrario. Teori receptio a contrario merupakan kebalikan dari teori receptie, yaitu teori yang mengatakan bahwa hukum adat dapat berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Pemberlakuan teori receptio a contrario ini, semakin meyakinkan umat Islam dalam menjalankan hukum Islam. Teori ini tetap menghargai dan tidak melarang memberlakukan hukum adat, dengan syarat hukum adat tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Dalam tatanan hukum nasional perlu diketahui bahwa produk hukum di Indonesia yang paling mempengaruhinya adalah hukum Islam. Karena itu, muncul teori eksistensi yang menegaskan bahwa ada hukum Islam dalam hukum nasional.¹⁹ Negara Republik Indonesia yang merupakan negara hukum, menghendaki berkembangnya kehidupan umat beragama dan peraturan hukum agama dalam tatanan kehidupan hukum nasional.

Menurut teori Friederich Julius dan Hazairin Tahir Azhary bernama teori “Lingkaran Konsentris” mengemukakan bahwa betapa eratnya hubungan antara agama, hukum, dan negara.²⁰ Teori ini menghendaki agama, hukum, dan negara tidak dapat dipisahkan dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia yang mempunyai dasar negara Pancasila. Negara Pancasila melindungi kebebasan beragama yang pluralis, juga menghendaki memasukan ajaran agama dan hukum agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut Ichitjanto, dalam hukum nasional yang berdasar Pancasila berlaku hukum agama dan toleransi antar umat beragama

¹⁹H. Muchsin, *Masa Depan Hukum Islam di Indonesia*, op. cit., h. 25.

²⁰Ichitjanto SA, *Prospek Peradilan Agama sebagai Peradilan Negara dalam Sistem Politik Hukum di Indonesia*, dalam Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Cet. I; Jakarta: PP-IKAHA, 1994), h. 258.

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yakni menyangkut keyakinan agama, ibadah agama, dan hukum agama.²¹ Hal ini membuktikan bahwa hukum agama telah lama hidup dan berkembang dalam hukum nasional di Indonesia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum agama merupakan sumber ajaran pokok yang merupakan bagian integral terhadap hukum nasional.

Hukum agama (hukum Islam) dan hukum nasional mempunyai hubungan timbal balik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tetapi yang paling tampak adalah bahwa hukum Islam telah lama ada dalam hukum nasional (masuk dalam teori eksistensi). Teori eksistensi merupakan kelanjutan dari teori *receptie exit* dan teori *receptio a contrario* yang lebih mempertegas eksistensi hukum Islam dalam hukum nasional.

Teori eksistensi ini menjadikan hukum Islam semakin eksis ke dalam tata hukum nasional di Indonesia. Hukum Islam mempunyai andil dalam mewujudkan tatanan hukum nasional, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Salah satu inti dari teori eksistensi adalah menjadi filter bagi hukum nasional, sebab dalam teori ini mengharuskan hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional yang tak dapat dipisahkan dengan produk hukum lainnya.

Berdasarkan teori eksistensi, maka eksistensi hukum Islam dalam hukum nasional meliputi empat pokok keberadaan:

- 1) ada dalam arti hukum Islam berada dalam hukum nasional sebagai bagian yang integral darinya;
- 2) ada dalam arti adanya kemandiriannya yang diakui berkekuatan hukum nasional dan sebagai hukum nasional;
- 3) ada dalam arti norma hukum Islam berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia; dan
- 4) ada dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional Indonesia.

Adanya teori eksistensi ini dapat memperkaya khasanah hukum nasional dalam praktik dan teori pemberlakuan hukum terutama pengembangan materi hukum nasional di Indonesia.

²¹Lihat *ibid*.

Hukum agama atau hukum Islam dan hukum nasional merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. Demikian pula dengan sumber hukum lainnya, yakni hukum adat dan hukum Barat.²²

Keempat isi pokok keberadaan dari teori eksistensi tersebut merupakan bukti bahwa hukum Islam selalu dibutuhkan oleh masyarakat terutama bagi pelaku dan pencari keadilan, terkhusus lagi pada lembaga Peradilan Agama di Indonesia.

C. KHI sebagai Produk Hukum Nasional

Istilah Kompilasi Hukum Islam yang disingkat KHI telah menjadi populer di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Islam dan terkhusus lagi dalam lingkungan Peradilan Agama sejak KHI lahir pada tanggal 10 Juni 1991 dengan terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Selain inpres juga kepmen (sekarang permen), yakni berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Keputusan menteri ini tertanggal 22 juli 1991 oleh Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, M.A. Adanya inpres ini, materi hukum Islam terlihat dan jelas dalam melakukan proses peradilan di Pengadilan Agama.²³ Inpres ini merupakan hasil produk hukum umat Islam yang dijadikan sebagai pegangan dalam penerapan hukum Islam di Indonesia secara keperdataan pada lembaga Peradilan Agama.

Nama dari kompilasi tersebut dapat diartikan secara sederhana sebagai kegiatan pengumpulan atau sesuatu yang dihimpun. Kompilasi Hukum Islam berarti pengumpulan atau penghimpunan hukum Islam. Untuk lebih memperjelas pengertian KHI, maka dalam *Ensiklopedi Hukum Islam* dijelaskan bahwa pengertian Kompilasi Hukum Islam adalah:

²²Lihat pula *ibid*.

²³Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama, 1991), h. 5.

Rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh ulama fikih yang biasa digunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan, himpunan tersebut inilah yang dinamakan kompilasi.²⁴

Berbagai pendapat hukum yang dimaksudkan adalah hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis serta pendapat dari berbagai mazhab. Banyaknya pendapat atau mazhab di Indonesia, sehingga dalam melaksanakan hukum Islam terdapat beberapa pendapat pula. Dengan adanya KHI yang dijadikan sebagai produk hukum, maka masyarakat Islam khususnya dalam lembaga Peradilan Agama mempunyai materi hukum yang satu, yakni Kompilasi Hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebut sebagai produk hukum nasional, sebab dalam KHI tercantum berbagai materi hukum yang merupakan kebutuhan masyarakat secara nasional. Misalnya, hal perkawinan tidak dapat disepelekan kerana dalam perkawinan dan kelanjutannya melahirkan perbuatan-perbuatan hukum yang tentunya harus diatur secara nasional yang tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar tertulis tertinggi di Negara Republik Indonesia. Juga UUD 1945 disebut sebagai landasan konstitusional dari segala produk hukum yang berlaku di Indonesia. Pemberlakuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dikenal dan berpedoman kepada hukum dasar, terutama hukum dasar tertulis. Hukum dasar yang berlaku, di samping hukum dasar yang tertulis juga berlaku hukum dasar yang tidak tertulis yang disebut dengan istilah konvensi.

Dalam *Kamus Hukum*, konvensi atau konpensi (*conventie*) berarti perjanjian internasional,²⁵ tetapi dalam *Kamus Besar Bahasa*

²⁴Abdul Aziz Dahlan, et al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 2 (Cet. V; Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), h. 968.

²⁵J.C.T. Simorangkir dkk., *Kamus Hukum* (Cet. V; Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h. 31.

Indonesia, yang dimaksud dengan konvensi adalah permufakatan atau kesepakatan terutama mengenai adat, tradisi, dan sebagainya.²⁶ Pengertian inilah yang dimaksudkan oleh penulis bahwa hukum dasar yang tidak tertulis (konvensi) yang merupakan acuan untuk digunakan KHI sebagai sebuah peraturan perundang-undangan di Indonesia. Apatah lagi KHI diperkuat oleh Kepmen (sekarang Permen) yang merupakan bagian dari herarki perundang-undangan. Hal ini dijadikan dasar untuk menjadi dasar konstitusional dan merupakan sinyal peraturan dalam hukum tidak tertulis terhadap tata hukum nasional.

Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 dijadikan acuan dasar hukum adanya hukum tidak tertulis. Pasal tersebut berbunyi: “Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.”²⁷ Pasal ini menunjukkan bahwa keberadaan tata hukum di Indonesia meliputi empat produk hukum, yaitu: (1) hukum produk legislatif kolonial, (2) hukum adat, (3) hukum Islam, dan (4) hukum produk legislatif nasional.²⁸ Keempat produk hukum tersebut merupakan hasil rekonstruksi dari aspirasi kebutuhan hukum masyarakat atau hasil dari terjemahan normatif hukum yang kemudian terformulasi secara fenomenologi atau disebut dengan istilah hukum positif.

Pendapat Prof. Dr. Rahmat Djatnika (ahli hukum Islam kontemporer Indonesia dan mantan Rektor IAIN Sunan Gunung Jati Bandung), mengemukakan bahwa penerapan konsepsi hukum Islam di Indonesia dalam implementasi kehidupan masyarakat, mengalami penyesuaian dengan budaya Indonesia. Adanya penyesuaian tersebut, hasilnya terkadang berbeda dengan hasil ijtihad penerapan hukum Islam di negara-negara Islam lainnya.²⁹ Perbedaan dalam penerapan hukum Islam di setiap negara yang melaksanakan hukum Islam,

²⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga (Cet. I; Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 592.

²⁷Republik Indonesia, *Amandemen Keempat UUD 1945 Tahun 2002 Pasal II Aturan Peralihan*.

²⁸Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h. 58.

²⁹Abdul Aziz Dahlan, et al., *loc. cit.*

menunjukkan bahwa betapa terbukanya hukum Islam untuk dikembangkan, terutama dalam pengembangan materi hukum Islam di Indonesia, khususnya dalam penerapan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Upaya penerapan Kompilasi Hukum Islam merupakan bahasan masalah berfungsinya hukum Islam dalam masyarakat Indonesia yang tercakup dalam sosiologi hukum Islam di Indonesia.³⁰ Adanya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, akan membuka peluang bagi lembaga Peradilan Agama untuk lebih mengembangkan materi hukumnya. Sehingga dalam penerapan hukum Islam di Indonesia juga membuka tabir dalam mengimplementasikannya.

Suatu sistem hukum efektif jika ditaati atau dipatuhi yang didasari dengan kesadaran hukum. Kesadaran hukum menyangkut faktor-faktor ketentuan hukum tertentu yaitu diketahui, dipahami dan ditaati, jadi menyangkut *legal consciousness*, warga masyarakat akan menaati hukum bila diketahui, dipahami, dihargai manfaatnya.³¹ Masyarakat dikatakan sadar hukum apabila telah menyadari bahwa suatu peraturan itu dikatakan baik apabila telah diketahui/mengerti terutama dilaksanakan dengan baik dan benar.

Hukum Islam dapat berfungsi dalam masyarakat jika telah melalui proses kelembagaan hukum Islam, agar menjadi bagian dari suatu lembaga sosial. Pelembagaan merupakan suatu proses di mana norma-norma hukum Islam dapat diketahui, dipahami, dinilai, dihargai, dijiwai dan ditaati oleh sebagian besar masyarakat, sehingga menjadi budaya dalam masyarakat. Manusia akan menghargai hukum Islam kalau dijamin kemaslahatan hidupnya di dunia dan di akhirat.³² Kalau kepatuhan terhadap hukum telah baik maka hal itu merupakan bagian dari ciri masyarakat yang sadar hukum.

Proses penerapan selanjutnya adalah metode *taqin* (dilembagakan melalui undang-undang) bagi aturan-aturan hukum

³⁰Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia* (Cet. I ; Bandung : Rosda Karya, 1977), h. 27.

³¹Ditbinpera Depag RI., *Mimbar Hukum*, No. 1 Tahun 1990, al-Hikmah, Jakarta, h. 206.

³² *Ibid.*

yang diperlukan. Dalam hal ini hukum diartikan sebagai peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh penguasa, jadi hukum diartikan sebagai suatu jenis *social control* dan *social engineering* yang ditetapkan oleh penguasa.

Dalam melaksanakan kedua proses sosialisasi tersebut, program penyuluhan merupakan langkah yang mendasar dalam menerapkan Kompilasi Hukum Islam.

Penyuluhan dan sosialisasi hukum merupakan jenis bantuan hukum yang bersifat preventif dan termasuk dalam bentuk pendidikan non formal. Dengan tujuan agar masyarakat mengetahui, memahami, menghargai, dan menaati hukum, sehingga kesadaran masyarakat terhadap hukum meningkat dan tercipta masyarakat sadar hukum (kadarkum).

Tujuan penyuluhan dan sosialisasi hukum adalah supaya masyarakat memahami Kompilasi Hukum Islam, sehingga hukum Islam melembaga dan menjiwai masyarakat Indonesia. Di samping itu, masyarakat juga akan taat dan patuh terhadap hukum Islam dan mampu memperlihatkan nilai-nilai hukum Islam yang aktual dan membumi yang sesuai dengan perkembangan zaman dan perubahan kondisi masyarakat.

Keputusan Menteri Kehakiman RI., Nomor 06 Tahun 1989 Tentang Penyuluhan Hukum, menetapkan bahwa tujuan penyuluhan hukum sebagai berikut: *Pertama*, menjadikan masyarakat paham hukum dalam arti memahami ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam peraturan-peraturan hukum yang mengatur kehidupannya sebagai orang perorang; *kedua*, membina dan meningkatkan kesadaran hukum warga masyarakat sehingga setiap warga taat pada hukum secara sukarela tanpa dorongan atau paksaan dari siapapun melaksanakan hak dan kewajiban sebagai mana yang ditentukan oleh hukum.

Pada dasarnya, tujuan pokok penyuluhan hukum adalah mengusahakan agar warga masyarakat mematuhi hukum dengan cara melakukan kegiatan agar masyarakat memahami hukum serta menghayati manfaatnya. Dengan demikian masyarakat akan menjadikannya sebagai suatu kebutuhan dalam kehidupan berbangsa

dan bermasyarakat, khususnya masyarakat muslim yang senantiasa mencari keadilan dan kepastian hukum.

Untuk memahami dengan baik dan benar, ada tiga unsur yang harus diperhatikan dalam menyukseskan penyuluhan hukum, yakni:

1. Materi hukum

Materi yang disuguhkan harus memenuhi tiga aspek, yakni aspek kognitif (pikiran), aspek afektif (perasaan), dan aspek konatif (kecenderungan). Jadi materi-materi hukum dalam Kompilasi Hukum Islam harus memenuhi ketiga unsur tersebut dalam menerapkan ke dalam masyarakat.

Kompilasi Hukum Islam harus disuguhkan secara menarik sehingga bisa membawa masyarakat mematuhi hukum, dan sanksi moral (akhirat) perlu ditonjolkan. Materi hukum dalam Kompilasi Hukum Islam meliputi 3 (tiga) aspek hukum, yakni hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum perwakafan.

Kalau diteliti secara mendalam, maka materi hukum yang terkandung dalam hukum perkawinan tersebut meliputi berbagai proses dalam perkawinan. Menurut Kompilasi Hukum Islam, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yakni akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.³³ Pengertian tersebut mempunyai makna paling tidak tiga hal, yaitu perjanjian antara pihak peng-*ijab* dan pihak peng-*qabul* atau pihak istri dan pihak suami. Makna lainnya merupakan perintah Allah dan sekaligus diyakini sebagai perbuatan ibadah.

Materi perkawinan tersebut dapat dilakukan melalui beberapa tahapan, baik sebelum maupun sesudah melangsungkan akad nikah yaitu peminangan, wali hakim, akad nikah, mahar, taklik talak, harta kekayaan, pemeliharaan anak, perwalian, khuluk, dan mut'ah. Materi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan hukum

³³Republik Indonesia, *Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*, bab II, pasal 2.

perkawinan yang dianut dalam Kompilasi Hukum Islam. Berikut ini penulis menguraikan dalam rangkaian hukum perkawinan.³⁴

Tahap yang pertama dilakukan adalah peminangan yang merupakan upaya melakukan perjodohan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Peminangan ini biasanya dilakukan atau diberi kepercayaan kepada orang-orang yang dituakan dan mempunyai pengalaman.

Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Dalam praktik masyarakat, wali hakim ini biasanya dilaksanakan oleh PPN (pegawai pencatat nikah) atau Kepala Kantor Urusan Agama (KUA). Tetapi yang lebih umum dilaksanakan adalah Imam Desa atau Imam Kelurahan. Namun sekarang hal ini dilaksanakan oleh pejabat yang bernama penghulu.

Akad nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali, dan kabul diucapkan oleh mempelai laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi. Yang menjadi masalah adalah jika ijab-kaumul tidak dilaksanakan dalam satu majelis, dan atau mempelai laki-laki diwakili untuk menerima kabul. Hal ini dapat dilakukan/dilangsungkan pernikahan, karena sekarang dapat ditunjang oleh alat teknologi yang semakin canggih. Suatu hal yang tak dapat dipungkiri, bahwa hal tersebut terjadi dalam kehidupan masyarakat muslim, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Mahar adalah pemberian dari seorang calon mempelai laki-laki kepada seorang calon mempelai perempuan, baik berbentuk uang, barang atau lainnya yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Bentuk mahar ini biasanya telah disepakati oleh kedua belah pihak untuk dijadikan sebagai mahar atau maskawin. Mahar ini sangat bervariasi, tergantung kebiasaan dalam masyarakat di mana pihak perempuan untuk dapat menerimanya.

Taklik talak ialah perjanjian yang diucapkan oleh mempelai laki-laki setelah terjadinya ijab-kaumul yang merupakan janji talak

³⁴Abdul Gani Abdullah, *op.cit*, h. 78.

kepada istri jika terjadi pada masa yang akan datang. Perjanjian tersebut biasanya dibacakan di hadapan orang banyak untuk didengarkan, sehingga hal tersebut merupakan bagian dari ikrar bagi seorang suami untuk menggauli istrinya dengan baik berdasarkan syari'at Islam.

Harta kekayaan dalam perkawinan yang biasa disebut dengan *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendirian maupun bersama antara suami dan istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, selanjutnya disebut harta bersama. Harta bersama ini biasa disebut dengan harta gonogini. Hal ini tanpa dipersiapkan terdaftar atas nama siapa pun. Harta gonogini tersebut tidak diatur dalam fikih mawaris, oleh karenanya merupakan hasil ijtihad dari ulama atau tim penyusun Kompilasi Hukum Islam tersebut.

Pemeliharaan anak atau biasa disebut dengan *badanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara, merawat, dan mendidik anak sampai dewasa dan atau anak tersebut telah mampu untuk hidup mandiri. Dengan demikian kewajiban orang tua telah lepas jika anak tersebut telah dewasa (untuk laki-laki sampai selesai pendidikan/putus sekolah tapi sudah dewasa/kawin, dan untuk anak perempuan hingga ia sudah kawin).

Perwalian ialah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan dan bertindak sesuatu perbuatan hukum, sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, dan atau orang tua anak tersebut tidak mampu dan atau tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Perwalian ini sangat penting, karena begitu banyak anak yang terlantar yang tidak mendapatkan pengasuhan secara wajar, sehingga anak tersebut tidak memenuhi kebutuhan hidup sebagaimana mestinya. Kalau unsur ini diabaikan, berarti masyarakat atau orang yang mestinya berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tersebut, berarti ia juga mengabaikan hukum Islam. Mengabaikan hukum Islam berarti melecehkan syari'at Islam, dan melecehkan syari'at Islam berarti berpaling dari Allah dan rasul-Nya.

Khuluk ialah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau *'imad* kepada suaminya serta

disetujui oleh suami. Perceraian semacam ini dalam pengadilan disebut cerai gugat. Sebaliknya, mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhkan talak berupa benda, uang, dan atau lainnya. Oleh karena itu, jika suami yang mengajukan gugatan ke pengadilan disebut cerai talak. Uraian-uraian tersebut merupakan ketentuan umum dalam materi hukum perkawinan.³⁵

2. Penyuluh hukum

Langkah dalam menerapkan Kompilasi Hukum Islam dengan sukses, seorang penyuluh harus memberikan yang terbaik dan sebagai panutan, tidak tampil hanya karena mengharapkan sesuatu, akan tetapi harus menjiwai dan memahami segala yang disampaikan kepada masyarakat. Seorang penyuluh hukum berpengaruh di tengah masyarakat jika ia mampu menyampaikan materi hukum dan agama dengan baik dan benar.

Menurut Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., adalah dua hal yang berpengaruh pada ketertiban dan atau keguncangan interaksi sosial yaitu hukum dan agama.³⁶ Untuk menuntun interaksi sosial sehingga mampu menghindarkan dampak negatif bagi kehidupan manusia, maka setiap penyuluh hukum mampu memberdayakan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat tersebut tidak terlepas dari pengetahuan di bidang hukum dan agama yang harus bekerja sama secara kumulatif, sehingga pola pikir masyarakat terarah dengan jelas.

Kalau ingin untuk menjadi penyuluh hukum terutama penyuluh hukum Islam, paling tidak ia harus banyak bersentuhan dengan masyarakat dan mengetahui medan masyarakat yang dihadapinya. Sebab terkadang komunitas masyarakat ada yang fanatik agama berdasarkan kebiasaannya dan ada bersifat moderat. Kedua kelompok masyarakat tersebut, penyuluh harus mengetahui kelebihan dan kekurangannya. Sehingga dengan demikian materi hukum untuk disampaikan kepada masyarakat yang bersangkutan tidak terlepas dari proses interaksi sosial. Kalau sudah interaksi sosial berjalan dengan

³⁵Lihat, Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 158-161.

³⁶Abdul Gani Abdullah, *op.cit.*, h. 13.

koridor hukum dan agama, maka dengan mudah masyarakat dapat memahami dan melaksanakannya dengan baik pula.

Untuk mengetahui masyarakat pada tingkat kesadaran hukum dan kesadaran agama, maka komunitas masyarakat tersebut dilihat dari aspek pendidikannya. Kalau aspek pendidikannya maju, kelompok masyarakat tersebut mudah untuk menerima informasi, apatah lagi kalau informasi tersebut berkenaan dengan kebutuhan dalam masyarakatnya.

3. Metode penyuluhan

Penyuluhan hukum merupakan proses komunikasi. Metode penyuluhan adalah suatu rangkaian antara pendekatan, teknik, dan sarana penyuluhan hukum. Untuk menyosialisasikan Kompilasi Hukum Islam, ketiga unsur tersebut mutlak diperhatikan, yang tentunya disesuaikan dengan kondisi dan budaya daerah yang menjadi tujuan penyuluhan hukum tersebut.

Prospek penerapan Kompilasi Hukum Islam akan semakin menuntut perhatian yang ekstra serius, sebab pengetahuan masyarakat semakin meningkat, perubahan kondisi dan situasi pun semakin mengalami perubahan dari hari ke hari. Kesiapan para penyuluh dalam membahasakan Kompilasi Hukum Islam ke dalam masyarakat harus siap.

Tantangan dan kendala berupa ketidaksiapan masyarakat menerima produk fikih Indonesia ini, mampu diatasi sebab harapan dan peluang yang dapat memperlancar penerapannya. Nilai-nilai yang dikembangkan dalam Kompilasi Hukum Islam adalah digali dari nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Perkembangan hukum yang beraneka ragam dan hidup dalam masyarakat Indonesia, menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi lahirnya Kompilasi Hukum Islam. Jadi dapat dikatakan bahwa Kompilasi Hukum Islam lahir dari masyarakat dan dikemas dengan prinsip hukum yang ditujukan kepada masyarakat Indonesia sebagai fikih kontemporer.³⁷ Tetapi tidak menutup

³⁷Ali Yafi, *Menggagas Fiqh Sosial* (Bandung : Mizan, 1994), h. 5.

kemungkinan akan lahir materi hukum Islam yang direkonstruksikan dalam bentuk hukum lainnya. Tetapi yang jelas, dengan adanya undang-undang baru yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama, maka semakin luaslah wilayah pengembangan kompetensi lembaga Peradilan Agama di Indonesia. Pengembangan kompetensi lembaga Peradilan Agama di Indonesia merupakan sebagai suatu perwujudan kemajuan bangsa Indonesia dalam reformasi hukum khususnya hukum Islam sebagai hukum nasional.

D. Pengembangan Kompetensi Peradilan Agama

Sebelum membahas lebih jauh tentang pengembangan kompetensi lembaga Peradilan Agama, terlebih dahulu mengenal dan mengerti apa arti lembaga tersebut (terkhusus peradilan dan pengadilan). Pemahaman tentang peradilan dan pengadilan terkadang disamakan, demikian halnya Peradilan Agama dan Pengadilan Agama.

Peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara pengadilan, sedangkan pengadilan adalah badan atau organisasi yang diadakan oleh negara untuk mengurus dan mengadili perselisihan-perselisihan hukum.³⁸ Jadi peradilan menyangkut tentang kasus dan materi hukumnya, sedangkan pengadilan menyangkut organisasi atau lembaga yang menyelesaikan kasus tersebut termasuk struktur organisasinya.

Peradilan merupakan suatu proses yang berakhir dengan memberi keadilan dalam suatu keputusan yang diatur dalam suatu peraturan hukum acara. Sedangkan pengadilan menunjuk kepada suatu susunan instansi yang memutus perkara. Dengan demikian peradilan tidak bisa terlepas dari hukum acara, dan pengadilan selalu terletak dalam bidang hukum tata negara.

Menyangkut pengertian Peradilan Agama dan Pengadilan Agama juga selalu disamakan. Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang yang beragama Islam.³⁹ Sedangkan Pengadilan Agama

³⁸Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 3.

³⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, pasal 1 ayat 1.

dirumuskan sebagai sebuah lembaga negara dalam struktur pemerintahan Republik Indonesia yang pengaturannya di bawah lingkungan Departemen Agama (kini di bawah Mahkamah Agung) dan bertugas di bidang kekuasaan kehakiman Islam.⁴⁰ Pengadilan Agama biasa disebut dengan *Mahkamah Syari'ah* yang berarti pengadilan yang menyelesaikan perselisihan hukum agama. Dengan menyatunya lembaga-lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung, maka secara struktural dan finansial telah sama dengan peradilan lainnya.

Kompetensi Peradilan Agama dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama umumnya mencakup perkawinan; kewarisan, wasiat, dan hibah; serta perwakafan dan sedekah. Namun dalam pengembangannya dapat meliputi berbagai materi dalam perekonomian Islam. Kompetensi Peradilan Agama mulanya hanya menyangkut hukum keluarga saja, tetapi setelah lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Revisi/Amandemen pertama Undang-Undang Peradilan Agama), maka wilayah kompetensi Peradilan Agama semakin luas, karena termasuk dalam bidang ekonomi syari'ah.

1. Hukum perkawinan

Perkawinan sering disinonimkan dengan pernikahan. Kawin atau nikah dalam bahasa berarti berhimpun atau *wata'*, dan menurut *syara'* berarti suatu *aqad* yang membolehkan seorang pria dan seorang wanita bergaul bebas (*wata'*).⁴¹ Dalam upacara pesta, biasa disebut upacara perkawinan, tetapi dalam *aqad* disebut *aqad nikah*.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia

⁴⁰ Cik Hasan Bisi, *loc. cit.*

⁴¹Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlu al-Sunnah dan Negara-negara Islam* (Cet. I; Jakarta: PT Bulan Bintang, 1988), h. 73.

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa⁴². Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴³ Ditinjau dari sejarah perkembangan umat manusia, pengertian perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang hidup bersama (bersetubuh), dan tujuannya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta mencegah perzinahan dan menjaga ketenteraman jiwa atau batin.⁴⁴

Berdasarkan pengertian perkawinan tersebut, dijumpai paling tidak ada tiga unsur yang terkandung di dalamnya, yaitu unsur sosial, unsur hukum, dan unsur agama. Unsur sosial dalam perkawinan adalah bermanfaat untuk memperjelas status sosial, menjaga dan memelihara kaum perempuan yang umumnya bersifat lemah. Unsur hukum dalam perkawinan bermanfaat untuk memelihara keturunan dan mempertinggi kedudukan sosial. Mengenai unsur agama dalam perkawinan bermanfaat untuk membentuk dan menghindari manusia dari pergaulan bebas sehingga terhindar dari perbuatan asusila dan kutukan perbuatan dosa. Tanpa unsur agama, maka unsur sosial dan hukum tidak berguna, karena agama dapat menjaga ketenteraman lahir dan batin.

2. Hukum kewarisan, wasiat, dan hibah

a. Hukum kewarisan

Secara umum kewarisan merupakan peralihan harta benda atau harta kekayaan berupa *tirkah* dari pewaris kepada ahli waris dengan mengikuti aturan hukum yang berlaku. Pewaris merupakan orang yang telah meninggal dunia, meninggalkan ahli waris dan harta warisan. Ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah dengan si pewaris dengan tidak terhalang oleh hukum untuk menerima warisan. Adapun *tirkah* adalah harta bersih yang akan

⁴²Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, pasal 1.

⁴³Republik Indonesia, *Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*, Buku I, Bab II, pasal 2.

⁴⁴Haji Abdullah Siddik, *Hukum Perkawinan Islam* (Cet. II; Jakarta PT Tintamas, 1983), h. 25.

dibagikan kepada ahli waris yang berhak. Bersih yang dimaksud adalah bersih dari wasiat dan utang si pewaris.

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tiṛkālī*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.⁴⁵ Dalam Pemahaman tentang hukum kewarisan tersebut ada tiga inti yang merupakan syarat mutlak, yaitu adanya ilmu tentang kewarisan, adanya harta warisan, dan adanya pewaris dan ahli waris yang tidak terhalang oleh hukum yang berlaku.

Gagasan reaktualisasi hukum Islam yang dilontarkan oleh Munawir Sjadzali, bermula ketika ia melihat kondisi sosial masyarakat muslim Indonesia yang melaksanakan di luar teks ayat-ayat al-Qur'an. Gagasan ini dilemparkan kepada masyarakat dalam berbagai kesempatan dan forum resmi sejak tahun 1985, sehingga mendapat reaksi pro-kontra yang cukup keras dan tegas, terutama dari kalangan ulama.

Munawir Sjadzali dan pembaru lainnya diingatkan agar dalam menguraikan gagasan tentang reaktualisasi jangan gegabah, terutama yang menyangkut kepastian hukum, misalnya kasus kewarisan 2:1 (dua banding satu) dijadikan 1:1 (satu banding satu). Gagasan inilah yang menggemparkan di berbagai kalangan, baik kalangan akademisi maupun kalangan praktisi, termasuk masyarakat secara luas yang mempunyai kepekaan terhadap hukum Islam.

Landasar yuridis dalam pembagian harta warisan dua banding satu (2:1) terdapat dalam Q.S. al-Nisā'/4: 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنْ نِسَاءً فَوْقَ
أُنثَيَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ
مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ

⁴⁵Republik Indonesia, *Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*, Buku II, Bab I, pasal 171.

فَلِأَمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ
 دَيْنٍ ۚ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنْ اللَّهِ ۚ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٦٤﴾

Terjemahnya:

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁴⁶

Kalimat ...الَّذِينَ حَظُّ الْاُنثٰىنِ...⁴⁷ bagian laki-laki lebih besar dua kali lipat dari bagian perempuan. Ketentuan tersebut telah banyak

⁴⁶Khadim al-Haramain asy-Syarifain (Pelayan kedua Tanah Suci) Raja Fahd ibn 'Abd. al-'Aziz al-Sa'ud, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Madinah al-Munawwarah: Kementerian Agama Islam, Wakaf, Da'wah, dan Irsyad Kerajaan Saudi Arabia, yang menaungi Mujamma' Malik Fahd li Thiba'at al-Mush haf Asysyarif Komplek Percetakan al-Qur'anul Karim kepunyaan Raja Fahd, 1418 H), h. 116-117.

⁴⁷Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah. (Lihat Q.S. Al-Nisa: 34). Lebih dari dua maksudnya: dua atau lebih sesuai dengan yang diamalkan Nabi saw. ...الَّذِينَ حَظُّ الْاُنثٰىنِ... Terjemahnya: ...bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan...

ditinggalkan oleh masyarakat Islam Indonesia, masyarakat yang daerahnya terkenal kuat Islamnya atau tidak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu faktornya adalah karena ketidaktahuan tentang sistem pembagian harta warisan berdasarkan hukum kewarisan Islam, sehingga dalam pembagiannya berdasarkan kebiasaan dalam masyarakat yakni dibagi oleh anak-anak pewaris (anak laki-laki tertua yang memimpin pembagiannya sekaligus ia mendapatkan bagian yang banyak).

Sistem pembagian yang berdasarkan kebiasaan pada masyarakat diketahui setelah Munawir Sjadzali menjadi Menteri Agama RI atas laporan para hakim. Mengenai kasus kewarisan di Pengadilan Agama, para hakim memberi fatwa kepada para ahli waris dengan ketentuan hukum faraid, pembagiannya 2:1 (dua banding satu). Akan tetapi para ahli waris yang muslim tersebut lebih memilih Pengadilan Negeri untuk meminta agar diberlakukan sistem pembagian yang rata. Dengan demikian fatwa hakim agama tersebut diabaikan walaupun fatwa yang dilontarkan oleh hakim itu bersumber dari teks ayat al-Qur'an.

Suatu hal yang mendapat perhatian khusus, bahwa orang yang enggan menerima fatwa hakim agama (Pengadilan Agama) dan lebih memilih Pengadilan Negeri tersebut tidak hanya orang awam, melainkan orang yang cukup menguasai ilmu keislaman, termasuk tokoh-tokoh organisasi Islam.⁴⁸ Mayoritas dari mereka menghendaki pembagian secara merata, karena hal itulah yang mereka anggap lebih bersifat adil.

Pandangan Dr. H. Satria Effendi M. Zein, gagasan reaktualisasi ajaran Islam yang Munawir Sjadzali lontarkan memang sempat membuat para ulama dan peminat hukum Islam menjadi ekstra repot. Karena gagasan tersebut merupakan prinsip dalam keyakinan umat Islam. Oleh karenanya, para pencinta hukum Islam harus mengkaji secara serius masalah fikih dan usul fikih sebagai

Penafsiran ayat tersebut adalah bagian laki-laki dua kali bagian perempuan karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah. Lihat Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Eidisi baru revisi terjemah (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h. 116.

⁴⁸Munawir Sjadzali, *op. cit.*, h. 88.

metodologinya,⁴⁹ termasuk pembagian warisan yang menyamakan bagian laki-laki dan perempuan.

Menyangkut masalah warisan, Munawir Sjadzali mempunyai pengalaman pribadi. Sebelum ia melaksanakan gagasannya, terlebih dahulu meminta nasihat ulama terkemuka. Walaupun tidak mendapat jawaban yang pasti dari ulama tersebut, namun ulama itu memberitahukan apa yang ia alami sendiri. Mendengar jawaban tersebut, ia termenung sebentar, lalu bertanya: “apakah dari segi keyakinan Islam kebijaksanaan tersebut tidak lebih berbahaya?”.⁵⁰ Menurut Munawir Sjadzali, membagi rata harta kekayaan kepada putra dan putri selagi masih hidup dianggap sebagai hibah, dan mempunyai keraguan akan keadilan hukum faraid (hukum kewarisan). Sebab kalau seseorang mempunyai keyakinan akan adanya keadilan dalam hukum kewarisan, tidak perlu dilakukan pembagian sebagai hibah. Tetapi kenyataan yang dialaminya adalah sebagai bukti, bahwa sudah banyak masyarakat Islam melaksanakan pembagian harta kekayaan kepada kerabatnya yang dianggap sebagai hibah.

b. Wasiat

Mengenai wasiat ada dua pengertian, yaitu wasiat dan wasiat wajib. Wasiat dalam hukum Islam adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.⁵¹ Tetapi secara umum pengertian wasiat itu meliputi materi dan non materi. Wasiat yang meliputi materi adalah seperti yang disebutkan di atas (masalah harta benda), dan wasiat yang berupa non materi adalah pesan-pesan seseorang ketika dalam keadaan sakit atau sehat untuk seseorang agar berbuat lebih baik dari sebelumnya ketika ia meninggal dunia.

Mengenai wasiat wajib adalah bagian yang diberikan kepada ahli waris yang mahjub hirman (terhalang) atau orang lain yang

⁴⁹Satria Effendi M. Zein, “Munawir Sjadzali dan Reaktualisasi Hukum Islam di Indonesia” dalam *Kontekstualisasi Ajaran Islam* (Cet. I; Jakarta: Kerjasama Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) dengan Yayasan Wakaf Paramadina, 1995), h. 292.

⁵⁰Munawir Sjadzali, *op. cit.*, h. 89.

⁵¹Republik Indonesia, *Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*, Buku II, Bab II, pasal 171 (f).

berjasa kepada si pewaris yang dilakukan oleh hakim dalam sidang majelis berdasarkan pertimbangan hukum yang jelas.

c. Hibah

Hibah dalam Kompilasi Hukum Islam adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.⁵² Hibah dapat dilakukan oleh orang yang telah berumur 21 tahun. Harta yang dapat dihibahkan maksimal 1/3 dari harta benda penghibah kepada orang lain atau kepada lembaga di hadapan minimal dua orang saksi yang bersyarat menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Ada suatu hal istimewa yang berlaku khusus bagi orang tua. Secara umum hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Kemudian, hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai harta warisan.

3. Perwakafan dan sedekah

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.⁵³ Dalam pengembangan materi hukum Islam, maka wakaf diartikan sebagai perbuatan seseorang atau sekelompok orang untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya, untuk dimanfaatkan selamanya. Juga dapat dimanfaatkan untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut hukum Islam.

Sedekah adalah pemberian sesuatu kepada fakir miskin atau yang berhak menerimanya, di luar kewajiban zakat dan zakat fitrah sesuai dengan kemampuan pemberi.⁵⁴ Oleh karena itu sedekah merupakan perbuatan seseorang, memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu karena Allah semata. Sedekah

⁵²KHI, *ibid.*, pasal 171 (g).

⁵³KHI, buku II, bab I, pasal 215 (1).

⁵⁴Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, *opo. Cit.*, h. 1008.

merupakan tabungan ukhrawi bagi orang-orang yang meyakiniinya, artinya banyak bersedekah berarti memperbanyak tabungan.

4. Ekonomi Syari'ah

Materi hukum Islam pada Lembaga Peradilan Agama yang masih memerlukan perhatian khusus ialah ekonomi syari'ah. Yang dimaksud dengan ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syari'ah. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak termasuk ekonomi syari'ah sebagai bagian dari kewenangan Pengadilan Agama. Pada pasal 49 undang-undang ini dijelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; wakaf dan sedekah. Ekonomi syari'ah tidak termasuk dalam bidang perkara di Pengadilan Agama.

Mengenai kekuasaan Peradilan Agama sebagaimana pada (pasal 49) termuat dua bagian hukum merupakan satu kesatuan yang tak dapat terpisahkan yaitu: (1) mengenai subjek hukumnya adalah orang-orang yang beragama Islam sebagai pihak maupun para pihak dalam suatu perkara; (2) mengenai hubungan hukumnya adalah bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; serta wakaf dan sedekah.⁵⁵ Perkara yang tidak termasuk dalam hubungan hukum tersebut, maka tidak termasuk kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan. Betapa banyak perkara yang menyangkut orang Islam yang tidak masuk dalam kewenangan Pengadilan Agama, antara lain yang mengemuka adalah mengenai perbankan syari'ah dan sebagainya.

Sehubungan dengan banyaknya perkara dalam masyarakat Islam yang tidak masuk dalam wilayah Peradilan Agama, ada angin segar untuk lembaga Peradilan Agama. Dalam undang-undang atau Revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

⁵⁵H. Zain Badjeber dan Abdul Rahman Saleh, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Komentar* (Jakarta: Pustaka Amani, 1990), h. 74.

Agama dikembangkan kewenangan Pengadilan Agama terutama pada pasal 49 undang-undang tersebut. Adapun yang merupakan konsep pengembangan kewenangan Pengadilan Agama (pasal 49), penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syari'ah, melainkan juga di bidang ekonomi syari'ah lainnya.

Ekonomi syari'ah tersebut meliputi: bank syari'ah; lembaga keuangan mikro syari'ah; asuransi syari'ah; reasuransi syari'ah; reksa dana syari'ah; obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah; sekuritas syari'ah; pembiayaan syari'ah; pegadaian syari'ah; dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan bisnis syari'ah.

Awal berdirinya bank syari'ah dimulai sejak berdirinya Bank Pembangunan Islami atau *Islamic Development Bank* (IDB) pada sidang Menteri Luar Negeri Organisasi Konferensi Islam (OKI) tahun 1975 di Kota Jeddah - Arab Saudi.⁵⁶ Berdirinya IDB merupakan motivasi bagi negara-negara Islam untuk mendirikan lembaga keuangan syari'ah, termasuk negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam, seperti Indonesia.

Faktor yang menjadi kendala adalah lembaga peradilan yang merupakan kewenangan dalam menyelesaikan sengketa perdata pada lembaga-lembaga keuangan syari'ah. Tetapi setelah diundangkannya Revisi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disahkan menjadi undang-undang hasil amandemennya, maka orang Islam tidak lagi memilih pada kepastian hukum di Pengadilan Negeri tetapi harus berperkara di Pengadilan Agama.⁵⁷ Ketentuan yang memberi kewenangan kepada Pengadilan

⁵⁶Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Suatu Pengantar* (Cet. I; Jakarta: Tazkia Institute, 1999), h. 231.

⁵⁷Lihat Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, pada penjelesannya tentang ketentuan umum alinea kedua: "Dalam undang-undang ini kewenangan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama diperluas, hal ini sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat, khususnya masyarakat muslim. Perluasan tersebut antara lain meliputi ekonomi syari'ah. Dalam kaitannya dengan perubahan undang-undang ini pula, kalimat yang terdapat dalam *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama* yang menyatakan: Para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum yang akan dipergunakan dalam pembagian warisan dinyatakan dihapus." Artinya mengenai kasus atau perkara kewarisan bagi umat Islam mutlak di Pengadilan Agama.

Agama adalah memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam pasal 49 revisi undang-undang Peradilan Agama.⁵⁸ Objek sengketa yang dimaksud adalah perdata bagi dan/atau antara orang-orang yang beragama Islam.

Oleh karena itu, dalam pandangan atau perspektif dan prospektif rekonstruksi lembaga Peradilan Agama di Indonesia tentang materi perkara telah termaktub dalam undang-undang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyangkut kuasa pengadilan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (undang-undang pertama tentang Peradilan Agama), yang mencakup: *pertama*, Peradilan Agama merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman. *Kedua*, mengenai perkara perdata tertentu. *Ketiga*, materi perkara perdata tertentu meliputi: (a) perkawinan; (b) kewarisan, wasiat, dan hibah; (c) wakaf dan sedekah.

Pengembangan rekonstruksi dalam undang-undang pertama tersebut adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang mencakup: *pertama*, Peradilan Agama adalah pelaku kekuasaan kehakiman. *Kedua*, perkara tertentu. *Ketiga*, materi perkara tertentu meliputi:

⁵⁸Lihat Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal 49 dan 50*. Pasal 49 Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; sedekah; dan i. ekonomi syari'ah. Ketentuan pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 50 (1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. (2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49.

- (a) perkawinan;
- (b) waris;
- (c) wasiat;
- (d) hibah;
- (e) wakaf;
- (f) zakat;
- (g) infak;
- (h) sedekah; dan
- (i) ekonomi syari'ah.

Materi tambahannya adalah zakat, infak, dan ekonomi syari'ah.

Perspektif dan prospektif rekonstruksi lembaga Peradilan Agama di Indonesia adalah: *pertama*, Peadilan Agama merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman, direkonstruksi menjadi pelaku kekuasaan kehakiman (pelaksana menjadi pelaku). *Kedua*, mengenai perkara perdata tertentu, direkonstruksi menjadi perkara tertentu (hilang perdata). Kemudian materi perkara perdata tertentu yang meliputi:

- (a) perkawinan;
- (b) kewarisan, wasiat, dan hibah;
- (c) wakaf dan sedekah.

Materi ini direkonstruksi menjadi materi perkara tertentu meliputi:

- (a) perkawinan;
- (b) waris;
- (c) wasiat;
- (d) hibah;
- (e) wakaf;
- (f) zakat;
- (g) infak;
- (h) sedekah; dan
- (i) ekonomi syari'ah.

Materi pengembangannya adalah zakat, infak, dan ekonomi syari'ah. Adapun pengembangan materi perkara tertentu tersebut akan diuraikan pada bab pembahasan berikutnya yang terfokus pada materi ekonomi syari'ah.

BAB V

PENGEMBANGAN MATERI PERKARA TERTENTU PERADILAN AGAMA DI INDONESIA

Peradilan Agama merupakan lembaga peradilan di Indonesia yang bernaung dalam salah satu lembaga tinggi negara yang bernama Mahkamah Agung Republik Indonesia, telah menyatu dalam atap yang sama dengan peradilan lainnya (Peradilan Umum, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara). Lembaga Peradilan Agama dalam pengembangannya di Indonesia telah melahirkan undang-undang sebagai landasan yuridis formal. Undang-undang tentang Peradilan Agama merupakan sebuah hasil dari tuntutan sekaligus kebutuhan masyarakat Indonesia sebagai masyarakat muslim pencari hukum dan keadilan dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah mengalami perubahan dua kali. Mengingat karena tidak sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga diubah sebagaimana dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pengembangan undang-undang ini semakin menuntut masyarakat agar lebih disesuaikan lagi dengan kemajuan zaman, sehingga berubah untuk kedua kalinya, sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-undang mengenai Peradilan Agama ini telah mengalami perubahan dua kali selama kurun waktu dua puluh tahun, mulai tahun 1989 sampai 2009. Namun demikian, seharusnya undang-undang ini diamandemen lagi dengan khusus melahirkan produk yang membahas tentang materi perkara tertentu dengan Pengadilan Khusus yang mengadili perkara pidana khusus akibat yang ditimbulkan oleh perkara tertentu tersebut, seperti yang disebutkan pada amandemen pertama undang-undang ini.

Hadirnya perubahan kedua ini, akan membawa lembaga Peradilan Agama pada materi dan kewenangannya yang lebih baik, seperti pada perkara tertentu, bukan lagi perkara perdata tertentu. Oleh karena itu, perlu ditelusuri materi perkara dan kewenangannya pada lembaga Peradilan Agama di Indonesia.

A. Menelusuri Materi Perkara Tertentu

Istilah perkara tertentu dalam lembaga Peradilan Agama muncul setelah diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada tanggal 20 Maret 2006 atau dikenal perubahan/amandemen pertama. Perkara tertentu sebelumnya disebut dengan istilah perkara perdata tertentu.

Menelusuri perkara tertentu pada lembaga Peradilan Agama di Indonesia, berarti menelusuri yuridis formal dalam perundang-undangan lembaga Peradilan Agama. Penelusuran ini dapat ditinjau pada aspek yuridis formal undang-undang tentang Peradilan Agama hingga kini telah tiga kali disahkan dan diundangkannya. Oleh karena itu, pada pembahasan ini sangat terkait dengan undang-undangnya terutama menyangkut kewenangan materi perkaranya, yang terbagi ke dalam tiga penelusuran, yakni: pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Kendatipun telah mengalami perubahan dua kali, namun belum secara spesifik membahas dan menyelesaikan apa yang diharapkan pada pengembangan materi perkara tertentu tersebut. Istilah dari perkara tertentu tersebut hanya termuat pada amendemen pertama undang-undang ini. Oleh karena itu, pada pembahasan berikut ini akan diuraikan materi perkara pada ketiga undang-undang mengenai Peradilan Agama di Indonesia.

1. Materi Perkara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-undang pertama tentang Peradilan Agama ini lahir dan diundangkan serta disahkan oleh Presiden Republik Indonesia (Soeharto) pada tanggal 29 Desember 1989. Undang-undang ini memuat 7 (tujuh) bab, 108 pasal, dan 170 ayat, disertai dan dilengkapi dengan beberapa ayat yang dibagi dalam sub ayat (poin)/bagian dengan jumlah 96.

Materi perkara dan kekuasaan/kewenangan lembaga Peradilan Agama berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dapat dilihat pada pasal 49: ayat (1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; serta
- c. wakaf dan sedekah.¹

Pada ayat (2) bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku. Ayat (3) bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan/harta keawarisan dan atau *tirkah* (harta yang bersih dari utang dan wasiat), serta penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan/harta warisan tersebut.

Analisis pada pasal 50 menjelaskan bahwa dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau menangani keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49 tersebut. Ada pun mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan

¹Lihat Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, pasal 49, 50, dan 51.

Umum atau Pengadilan Negeri pada wilayah hukumnya masing-masing lingkungan peradilan.

Mengenai kewenangan Pengadilan Tinggi Agama dapat dilihat pada pasal 51 yang memberi tugas dan kewenangannya, yakni:

- (1) Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding.
- (2) Pengadilan Tinggi Agama juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar-Pengadilan Agama di daerah hukumnya masing-masing.

Lingkungan Peradilan Agama dapat memberikan pertimbangan hukum baik kepada masyarakat maupun kepada instansi pemerintah. Hal ini ditegaskan dalam pasal 52 yaitu:

- (1) Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
- (2) Selain tugas dan kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49 dan pasal 51, pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang.

Tugas dan kewenangan pengadilan tersebut dapat diawasi oleh Ketua Pengadilan berdasarkan wilayah hukumnya termasuk hakim, panitera, sekretaris, dan juru sita. Selain tugas sebagaimana yang dimaksudkan, Ketua Pengadilan Tinggi Agama di daerah hukumnya melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Agama dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya. Pengawasan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku secara patut, adil, dan bertanggung jawab. Untuk melaksanakan pengawasan yang melekat, pejabat yang berwenang dalam hal ini Ketua Pengadilan dapat memberikan petunjuk, teguran, dan peringatan, yang dipandang perlu dengan catatan, tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang dipertanggungjawabkannya.

2. Materi Perkara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-undang kedua ini merupakan amandemen pertama atau revisi pertama yang diundangkan dan disahkan oleh Presiden Republik Indonesia (Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono) pada tanggal 20 Maret 2006.

Amandemen pertama undang-undang ini, menyangkut materi perkara dan kewenangan yang diamankan oleh undang-undang terkhusus ketentuan pasal 49 mengalami perubahan, yakni Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infak;
- h. sedekah; dan
- i. ekonomi syari'ah.²

Penegasan dalam materi dan kewenangan Lembaga Peradilan Agama termuat pada penjelasan pasal 49 undang-undang tersebut. Terutama menyangkut penyelesaian sengketa perkara tertentu, tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syari'ah, melainkan juga di bidang ekonomi syari'ah lainnya. Sengketa tersebut adalah antara orang-orang yang beragama Islam yakni termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi objek dari kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal 49 undang-undang amandemen pertama tentang Peradilan Agama ini.

²Lihat Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, pasal 49.

Perubahan lain yang terkandung dalam undang-undang kedua ini adalah menyangkut perkawinan yakni hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain meliputi:

- 1) izin beristri lebih dari seorang;
- 2) izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua/wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
- 3) dispensasi kawin;
- 4) pencegahan perkawinan;
- 5) penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN);
- 6) pembatalan perkawinan;
- 7) gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan isteri;
- 8) perceraian karena talak;
- 9) gugatan perceraian;
- 10) penyelesaian harta bersama;
- 11) penguasaan anak-anak;
- 12) ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi;
- 13) penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
- 14) putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
- 15) putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
- 16) pencabutan kekuasaan wali;
- 17) penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
- 18) penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
- 19) pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
- 20) penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
- 21) putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran; dan

- 22) pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Menyangkut materi kedua tentang kewarisan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan waris atau kewarisan adalah menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, menentukan masalah harta peninggalan/harta warisan atau tirkah, menentukan bagian-bagian dari masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris. Tidak lagi harus mendapat persetujuan/penetapan dari Peradilan Umum. Ketentuan inilah yang menjadikan kemandirian Peradilan Agama dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara kewarisan, maupun perkara lainnya.

Materi tentang wasiat merupakan perbuatan seseorang dalam memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi atau pewasiat tersebut meninggal dunia. Perihal wasiat ini dapat ditunaikan setelah utang pewasiat telah bersih dan maksimal dapat ditunaikan sepertiga dari harta warisan. Menyangkut hibah merupakan pembaguan suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.

Perbedaan dengan wakaf⁷ adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selama-lamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah. Tentunya berdasarkan hukum yang berlaku secara sah dan meyakinkan tidak meninggalkan persengketaan, baik antar ahli waris maupun antara ahli waris dan penerima wakaf.

Menyangkut tentang zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang

muslim sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya tanpa direkayasa. Ada pun menyangkut infak merupakan perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, serta mendermakan dan memberikan rezki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas, dan karena Allah semata tanpa ingin dipuji oleh orang lain. Sedangkan sedekah merupakan perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap rahmat dan *rida* Allah swt. Mengeluarkan zakat dan sedekah merupakan kemampuan untuk membuat si pelaku menjadi orang yang pemurah dan sekaligus memberikan perhatian terhadap diri dan lingkungan sekitarnya.

Orang yang mengeluarkan zakat dan sedekah dilakukan dengan tidak hanya untuk terlepas dari suatu kewajiban untuk menaatinya, melainkan ditunaikan dengan penuh kesadaran bahwa membayar zakat dan mengeluarkan sedekah tersebut harus memenuhi fungsinya sebagai salah satu sarana kesejahteraan umat manusia. Untuk itu, zakat tersebut harus dikelola dan dimonitor dengan baik demi kesejahteraan bersama. Zakat dan sedekah merupakan bagian dari materi rekonstruksi kewenangan Lembaga Peradilan Agama.

Penegasan pada penjelasan terhadap rekonstruksi materi dan kewenangan Lembaga Peradilan Agama dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu bukan perkara perdata tertentu adalah menyangkut ekonomi syari'ah. Ekonomi syari'ah merupakan perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, yang antara lain meliputi:

- 1) bank syari'ah;
- 2) lembaga keuangan mikro syari'ah;
- 3) asuransi syari'ah;
- 4) reasuransi syari'ah;
- 5) reksa dana syari'ah;
- 6) obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah;
- 7) sekuritas syari'ah;

- 8) pembiayaan syari'ah;
- 9) pegadaian syari'ah;
- 10) dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan
- 11) bisnis syari'ah; serta dapat memungkinkan pengembangan perkara-perkara tertentu lainnya.

Oleh karena itu, amandemen pertama undang-undang Peradilan Agama ini memberi wewenang kepada Pengadilan Agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain. Pengembangan kewenangan Peradilan Agama tersebut adalah yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam.

Tujuan dari pengembangan objek tersebut adalah untuk menghindari upaya memperlambat atau mengulur-ulur waktu penyelesaian sengketa karena alasan adanya sengketa milik atau keperdataan lainnya tersebut sering dibuat oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya gugatan di pengadilan agama. Akan tetapi bila subjek yang mengajukan sengketa hak milik atau keperdataan lain tersebut bukan yang menjadi subjek bersengketa di Pengadilan Agama, dan sengketa di Pengadilan Agama ditunda untuk menunggu putusan gugatan yang diajukan ke pengadilan di lingkungan Peradilan Umum/Pengadilan Negeri.

Proses penangguhan dimaksud menurut penjelasan pasal tersebut hanya dapat dilakukan apabila pihak yang berkeberatan telah mengajukan bukti ke Pengadilan Agama bahwa telah didaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri terhadap objek sengketa yang sama dengan sengketa di Pengadilan Agama. Dalam hal objek sengketa lebih dari satu objek dan yang tidak terkait dengan objek sengketa yang diajukan keberatannya, Pengadilan Agama tidak perlu menangguhkan putusannya, terhadap objek sengketa yang tidak terkait masalahnya.

Kewenangan selama ini Pengadilan Agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan (*išbat*) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal bulan pada setiap memasuki bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal tahun Hijriyah. Hal ini merupakan kewenangan Menteri Agama dalam

mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan 1 (satu) Ramadhan dan 1 (satu) Syawal. Kemudian Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu salat, termasuk pengembangan wewenang ke depan dalam menentukan arah kiblat.

Apabila terjadi sengketa mengenai hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 tersebut, terutama menyangkut objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Bila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara tersebut.

Berdasarkan pertimbangan mengenai objek perkara tertentu dan perkara-perkara tertentu lainnya, pengadilan yang paling tepat untuk menyelesaikan sengketa tersebut adalah Pengadilan Khusus yang berada dalam naungan Lembaga Peradilan Agama, seperti yang berlaku di Peradilan Umum, misalnya Pengadilan Tipikor.

3. Materi Perkara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-undang ketiga ini merupakan amandemen kedua undang-undang tentang Peradilan Agama yang diundangkan dan disahkan oleh Presiden Republik Indonesia (Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono) pada tanggal 29 Oktober 2009, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Materi perkara pada amandemen kedua undang-undang tentang Peradilan Agama tersebut adalah hampir sama dengan amandemen pertama. Namun letak perbedaan dan pengembangannya adalah mengenai pengawasan ketua pengadilan serta hak prerogatif hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Pengawasan yang dilakukan oleh ketua pengadilan adalah mengenai pelaksanaan tugas dan perilaku hakim, panitera, sekretaris, dan juru sita di daerah hukumnya masing-masing. Demikian pula pengawasan terhadap jalannya peradilan supaya berjalan dengan seksama berdasarkan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu ketua pengadilan dapat memberikan petunjuk, teguran, dan peringatan jika hal tersebut dipandang perlu dan sangat dibutuhkan. Namun demikian, pengawasan yang dilakukan oleh ketua pengadilan adalah tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang. Karena itu hakim harus bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya dengan dasar pertimbangan hukum yang benar.

Pengembangan perkara dalam perubahan kedua ini adalah setiap orang yang mempunyai perkara berhak memperoleh bantuan hukum. Karena pentingnya bantuan hukum tersebut, negara dapat menanggung biaya perkara bagi orang pencari keadilan yang tidak mampu. Demikian pula pengadilan wajib memberi akses kepada masyarakat dalam memperoleh informasi yang bertalian dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan. Semua amanat undang-undang harus dilaksanakan, dan apabila tidak diindahkan maka akan dikenakan sanksi berdasarkan pelanggaranannya.

B. Analisis Pengembangan Perkara Tertentu

Adanya kepastian hukum pada kewenangan Pengadilan Agama tentang pengembangan materi perkara tertentu, bertujuan untuk menghindari upaya memperlambat dan mengulur-ulur waktu dalam penyelesaian sengketa keperdataan orang Islam. Tidak lagi memilih pengadilan yang ia kehendaki atau pengadilan yang lebih menguntungkannya, tetapi undang-undang telah memberikan kepastian hukum kepada pencari keadilan pada lembaga Peradilan Agama di seluruh Indonesia.

Perkara yang banyak terjadi dalam masyarakat Islam adalah menyangkut ekonomi syari'ah yang kini sedang menjamur di Indonesia. Ekonomi syari'ah telah berkembang dan banyak diminati oleh investor, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Materi

ekonomi syari'ah ini merupakan objek yang baru bagi Pengadilan Agama di Indonesia. Dalam materi ekonomi syari'ah tersebut meliputi berbagai istilah yang kesemuanya adalah bagian-bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan objek hukum lainnya seperti hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum perwakafan. Istilah-istilah ekonomi syari'ah tersebut adalah:³

- a. Perbankan, adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
- b. Bank, adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
- c. Bank Umum, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syari'ah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- d. Bank Perkreditan Rakyat, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syari'ah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- e. Simpanan, adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- f. Giro, adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.
- g. Deposito, adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

³Pengurus Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat, *Kumpulan Tulisan tentang Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: PPHIM, 2006), h. 71.

- h. Sertifikat Deposito, adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan.
- i. Tabungan, adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- j. Surat Berharga, adalah surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang.
- k. Kredit, adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
- l. Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syari'ah, adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.
- m. Prinsip Syari'ah, adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syari'ah, antara lain: pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudārabah*); pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*); prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*); atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*); atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).
- n. Penitipan, adalah penyimpanan harta berdasarkan perjanjian atau kontrak antara bank umum dengan penitip, dengan

ketentuan bank umum yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut.

- o. Wali Amanat, adalah kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank umum dengan penitip, dengan ketentuan bank umum yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut.
- p. Nasabah, adalah pihak yang menggunakan jasa bank.
- q. Nasabah Penyimpan, adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- r. Pihak Terafiliasi, adalah terdiri atas:
 - 1) Anggota dewan komisaris, pengawas, direksi atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank.
 - 2) Anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 3) Pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya.
 - 4) Pihak yang menurut penilaian bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, keluarga pengurus.
 - 5) Agunan, adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syaria'ah.
 - 6) Lembaga Penjamin Simpanan, adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan nasabah penyimpan melalui skim asuransi, dan penyangga, atau skim lainnya.
 - 7) Merger, adalah penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya dengan atau tanpa melikuidasi.

- 8) Konsolidasi, adalah penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara mendirikan bank baru dan membubarkan bank-bank tersebut dengan atau tanpa likuidasi.
- 9) Akuisisi, adalah pengambilalihan kepemilikan suatu bank.
- 10) Rahasia Bank, adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.
- 11) Muḍarabah, adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha guna memperoleh keuntungan, dan keuntungan tersebut akan dibagikan kepada kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah dinisbahkan.
- 12) Sertifikasi Investasi *Muḍarabah* Antar Bank (IMA), adalah sertifikat yang digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan dana dengan prinsip muḍarabah.
- 13) Bank Syari'ah, adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah, termasuk unit usaha syari'ah dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah.
- 14) Unit Usaha Syari'ah (UUS), adalah unit kerja di kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syari'ah, dan atau unit syari'ah.
- 15) Unit Syari'ah, adalah satuan kerja khusus dari kantor cabang atau kantor cabang pembantu bank umum konvensional yang kegiatan usahanya melakukan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pemberian jasa perbankan lainnya berdasarkan prinsip syari'ah dalam rangka persiapan perubahan menjadi kantor cabang syari'ah.
- 16) Aktiva Produktif, adalah penanaman dana bank syari'ah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk

pembiayaan, piutang, *qard*, surat berharga syari'ah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada transaksi rekening administratif serta sertifikat wadiah bank Indonesia.

- 17) Pembiayaan, adalah penyediaan dana dan atau tagihan berdasarkan akad *mudārabah* dan atau *musyarakah* dan atau pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip syari'ah bagi hasil.
- 18) *Mudārabah*, adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.
- 19) *Musyarakah*, adalah perjanjian di antara para pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan di antara pemilik dana/modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.
- 20) Piutang, adalah tagihan yang timbul dari transaksi jual beli dan atau sewa berdasarkan akad *murabahah*, salam, *istiṣna* dan atau ijarah.
- 21) *Murabahah*, adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah, di mana bank syari'ah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin/keuntungan yang disepakati antara bank syari'ah dan nasabah.
- 22) *Salam*, adalah perjanjian jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga terlebih dahulu.
- 23) *Istiṣna*, adalah perjanjian jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual.
- 24) *Ijarah*, adalah perjanjian sewa-menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa.

- 25) *Qard*, adalah penyediaan dana atau tagihan antara bank syari'ah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu.
- 26) Surat Berharga Syari'ah, adalah surat bukti berinvestasi berdasarkan prinsip syari'ah yang lazim diperdagangkan di pasar uang dan atau pasar modal antara lain wesel, obligasi syari'ah, sertifikat reksadana syari'ah dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syari'ah.
- 27) Penempatan, adalah penanaman dana bank syari'ah pada bank syari'ah lainnya dan atau bank perkreditan rakyat berdasarkan prinsip syari'ah antara lain dalam bentuk giro dan atau tabungan wadiah, deposito berjangka dan atau tabungan *mudharabah*, pembiayaan yang diberikan, sertifikat investasi *mudharabah* antar bank (sertifikat IMA) dan atau bentuk-bentuk penempatan lainnya berdasarkan prinsip syari'ah.
- 28) Penyertaan Modal, adalah penanaman dana bank syari'ah dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syari'ah, termasuk penanaman dalam bentuk surat utang konversi (*convertible bonds*) dengan opsi saham (*equity options*) atau jenis transaksi tertentu berdasarkan prinsip syari'ah yang berakibat bank syari'ah memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syari'ah.
- 29) Perusahaan yang Bergerak di Bidang Keuangan Syari'ah, adalah bank syari'ah bank perkreditan rakyat berdasarkan prinsip syari'ah, dan perusahaan di bidang keuangan lain berdasarkan prinsip syari'ah sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku antara lain sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan.
- 30) Penyertaan Modal Sementara, adalah penyertaan modal bank syari'ah dalam perusahaan nasabah untuk mengatasi kegagalan pembiayaan dan atau piutang (*debt to equity swap*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan bank Indonesia yang berlaku, termasuk dalam bentuk surat

utang konversi (*convertible bonds*) dengan opsi saham (*equity options*) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat bank syari'ah memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan nasabah.

- 31) Proyeksi Pendapatan (PP), adalah perkiraan pendapatan yang akan diterima bank syari'ah dari nasabah atas pembiayaan yang diberikan dengan jumlah dan tanggal jatuh tempo yang disepakati antara bank syari'ah dan nasabah.
- 32) Realisasi Pendapatan (RP), adalah pendapatan yang diterima bank syari'ah dari nasabah atas pembiayaan yang diberikan.
- 33) Transaksi Rekening Administratif, adalah komitmen dan kontinjensi (*off balance sheet*) berdasarkan prinsip syari'ah yang terdiri atas bank garansi, akseptasi/endosemen, *irrevocable letter of credit* (L/C) yang masih berjalan, akseptasi wesel impor atas dasar L/C berjangka, *standby L/C* dan garansi lain berdasarkan prinsip syari'ah.
- 34) Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), adalah sertifikat yang diterbitkan oleh bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan wadiah.
- 35) Wadiah, adalah perjanjian penitipan dana antara pemilik dana dengan pihak yang dipercaya untuk menjaga dana titipan tersebut.

Istilah-istilah ekonomi syari'ah tersebut merupakan perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syari'ah pada lembaga Peradilan Agama di Indonesia, sekaligus merupakan kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan kasus-kasus yang diperkarakan bagi orang-orang Islam. Dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka orang-orang yang beragama Islam tidak lagi melakukan pilihan hukum pada Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) menyangkut perkara tertentu.⁴ Apabila

⁴Perkara tertentu yang dimaksudkan dalam revisi undang-undang tersebut adalah menyangkut perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak,

terjadi sengketa hak milik yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, maka objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama.

Adanya revisi undang-undang tersebut, maka pengembangan materi hukum Islam di Indonesia semakin luas dan kompleks, sehingga memerlukan sarjana-sarjana muslim yang andal dalam bidang ekonomi syari'ah. Oleh karena itu, eksistensi hukum Islam dalam hukum nasional semakin kuat, dan para pencari keadilan dalam perkara tertentu bagi umat Islam tidak lagi seandainya memilih kepastian hukum. Hukum Islam dalam hukum nasional di Indonesia bagaikan satu mata rantai yang tidak dapat dipisahkan, dan hukum Islam tetap eksis dalam hukum nasional sepanjang zaman di Indonesia. Perkembangan kewenangan lembaga Peradilan Agama di Indonesia semakin meluas, bahkan mengarah pada pengembangan dan penerapan pidana Islam adalah suatu hal yang tidak mustahil terjadi, tergantung pada pemegang kekuasaan eksekutif dan legislatif di negara Republik Indonesia ini. Kalau pemegang kendali kekuasaan dalam hal ini pemerintah yang kecenderungannya memperhatikan kemaslahatan umat Islam, itulah yang akan muncul dan dipatuhi oleh masyarakat secara umum, dan dipatuhi oleh masyarakat muslim secara khusus.

C. Pengembangan Materi Perkara Tertentu pada Pendekatan Yuridis Formal

Perkara tertentu mempunyai prospek dalam pengembangannya terhadap materi perkara pada lembaga Peradilan Agama di Indonesia. Oleh karena itu dalam melihat prospek pengembangan materi perkara tertentu, perlu memperhatikan tiga pendekatan yuridis formal lembaga Peradilan Agama di Indonesia. Pendekatan yuridis formal tersebut terdiri atas pendekatan yuridis formal lembaga Peradilan Agama prapenyatuan atap (tahun 1987-2006) dan pascapenyatuan atap (tahun 2006-2009 hingga sekarang). Pendekatan yuridis formal pascapenyatuan atap tersebut meliputi dua analisis pendekatan yuridis formal.

sedekah dan ekonomi syari'ah (meliputi 11 bidang seperti yang telah disebutkan terdahulu).

1. Pendekatan Yuridis Formal Prapenyatuan Atap⁵

Prospek pengembangan materi perkara tertentu diawali dengan perkara perdata tertentu yang merupakan dasar hukum pertama secara formal pada lembaga Peradilan Agama di Indonesia. Lahirnya undang-undang ini membawa angin segar bagi Peradilan Agama saat itu. Seiring dengan berjalannya waktu, undang-undang ini menadapat respons yang sangat positif bagi masyarakat yang bernaung di bawah Peradilan Agama, ketika itu berada di bawah Departemen Agama Republik Indonesia.

a. Dasar hukum pertama lembaga Peradilan Agama secara yuridis formal

Lembaga Peradilan Agama mendapat pengakuan hukum secara yuridis formal pada tanggal 29 Desember 1989, lahirilah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara 1989/49; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400). Berdasarkan Lembaran Negara tersebut maka Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengambil keputusan bahwa:⁶ *pertama*, Negara Republik Indonesia, sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, dan tertib.

Kedua, bahwa untuk mewujudkan tata kehidupan tersebut dan menjamin persamaan kedudukan warga negara dalam hukum diperlukan upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat.

Ketiga, bahwa salah satu upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum tersebut adalah melalui Peradilan Agama sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang

⁵Lihat, Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*.

⁶Lihat, *ibid*.

Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Keempat, bahwa pengaturan tentang susunan, kekuasaan, dan hukum acara pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama yang selama ini masih beraneka karena didasarkan pada peraturan-peraturan berikut:

- 1) Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura (Staatsblad Tahun 1882 Nomor 152 dihubungkan dengan Staatsblad Tahun 1937 Nomor 116 dan 610);
- 2) Peraturan tentang Kerapatan Qadi dan Kerapatan Qadi Besar untuk sebagian Residensi Kalimantan Selatan dan Timur (Staatsblad Tahun 1937 Nomor 638 dan 639);
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'ah di Luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 99), perlu segera diakhiri demi terciptanya kesatuan hukum yang mengatur Peradilan Agama dalam kerangka sistem dan tata hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kelima, bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut, dan untuk melaksanakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dipandang perlu menetapkan undang-undang yang mengatur susunan, kekuasaan, dan hukum acara pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama sebagai dasar konstitusinya adalah: pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) pasal 24, dan pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316).

Sebagai Negara Hukum Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum dalam sistem dan penyelenggaraan hukum merupakan hal pokok yang sangat penting dalam usaha mewujudkan suasana kehidupan yang aman, tenteram, dan, tertib seperti yang diamanatkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara. Oleh karena itu, untuk mewujudkan hal-hal tersebut dibutuhkan adanya lembaga yang bertugas untuk menyelenggarakan kekuasaan kehakiman guna menegakkan hukum dan keadilan dengan baik. Salah satu lembaga untuk menegakkan hukum dalam mencapai keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum adalah badan-badan peradilan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang masing-masing mempunyai lingkup kewenangan mengadili perkara atau sengketa di bidang tertentu dan salah satunya adalah Lembaga Peradilan Agama.⁷

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum Lembaga Peradilan Agama sebelum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ini adalah:

- a) Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura (Staatsblad 1882 Nomor 152 dan Staatsblad 1937 Nomor 116 dan Nomor 610);
- b) Peraturan tentang Kerapatan Qadi dan Kerapatan Qadi Besar untuk sebagian Residensi Kalimantan Selatan dan Timur (Staatsblad 1937 Nomor 638 dan Nomor 639);
- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 99).

Keragaman dasar hukum Peradilan Agama tersebut mengakibatkan beragamnya pula susunan, kekuasaan, dan hukum acara Peradilan Agama. Dalam rangka penerapan Wawasan Nusantara

⁷H. Muhammad Amin Summa, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia* (Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 273.

di bidang hukum yang merupakan pengejawantahan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, maka keragaman tersebut perlu segera diakhiri demi terciptanya kesatuan hukum yang mengatur Peradilan Agama dalam kerangka sistem dan tata hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman diperlukan adanya perombakan yang bersifat mendasar terhadap segala peraturan perundang-undangan yang mengatur Lembaga Peradilan Agama tersebut di atas dan menyesuaikannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang merupakan induk dan kerangka umum serta merupakan asas dan pedoman bagi semua lingkungan peradilan.⁸

Undang-undang yang mengatur susunan, kekuasaan, dan hukum acara pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Agama ini merupakan pelaksanaan ketentuan-ketentuan dan asas yang tercantum dalam Undang-Undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970, Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951).

Kekuasaan Kehakiman di Lingkungan Peradilan Agama, dalam Undang-undang ini dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung, sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditentukan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam undang-undang ini diatur susunan, kekuasaan, hukum acara, kedudukan para Hakim, dan segi-segi administrasi lain pada Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

⁸Lihat, Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*, pasal 10.

Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah berdasarkan hukum Islam. Sedangkan bidang perkawinan yang dimaksud adalah hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019). Bidang kewarisan adalah mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut, bilamana pewarisan tersebut dilakukan berdasarkan hukum Islam. Sehubungan dengan hal tersebut, para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan dipergunakan dalam pembagian warisan.

Untuk mewujudkan keseragaman kekuasaan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama di seluruh wilayah Nusantara, maka oleh undang-undang ini kewenangan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura serta sebagian Residensi Kalimantan Selatan dan Timur mengenai perkara kewarisan yang dicabut pada tahun 1937, dikembalikan dan disamakan dengan kewenangan Pengadilan Agama di daerah-daerah yang lain. Pengadilan Tinggi Agama merupakan pengadilan tingkat banding terhadap perkara-perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama dan merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya.

Memperhatikan luasnya lingkup tugas dan beratnya beban yang harus dilaksanakan oleh pengadilan, maka perlu adanya perhatian yang besar terhadap tata cara dan pengelolaan administrasi pengadilan. Hal ini sangat penting, karena bukan saja menyangkut aspek ketertiban dalam menyelenggarakan administrasi, baik di bidang perkara maupun kepegawaian, gaji, kepangkatan, peralatan kantor, dan lain-lain, tetapi juga akan mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan Peradilan itu sendiri.

Oleh karena itu, penyelenggaraan administrasi peradilan dalam undang-undang ini dibedakan menurut jenisnya dan dipisahkan

penanganannya, walaupun dalam rangka koordinasi pertanggungjawaban tetap dibebankan kepada seorang pejabat, yaitu panitera yang merangkap sebagai sekretaris. Selaku panitera, ia menangani administrasi perkara dan hal-hal administrasi lain yang bersifat teknis peradilan (yustisial). Dalam pelaksanaan tugas ini panitera dibantu oleh seorang wakil panitera dan beberapa orang panitera muda. Selaku sekretaris, ia menangani administrasi umum seperti administrasi kepegawaian dan sebagainya. Dalam pelaksanaan tugasnya ia dibantu oleh seorang wakil sekretaris. Dengan demikian, staf kepaniteraan dapat memusatkan perhatian terhadap tugas dan fungsinya membantu hakim dalam bidang peradilan, sedangkan tugas administrasi yang lain dapat dilaksanakan oleh staf sekretariat.

Apabila semua staf yang bertugas secara profesional berdasarkan tugasnya masing-masing, hakim tentunya dalam melaksanakan tugasnya dapat berjalan sebagaimana mestinya. Hakim adalah termasuk unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan peradilan. Oleh karena itu, maka syarat-syarat pengangkatan dan pemberhentian serta tata cara pengangkatan dan pemberhentiannya diatur dalam undang-undang ini. Hakim diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Menteri Agama berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.⁹

Pengadilan sebagai penyelenggara Kekuasaan Kehakiman bebas dalam memberikan keputusan, perlu adanya jaminan bahwa, baik pengadilan maupun hakim dalam melaksanakan tugas terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh yang lain. Agar tugas penegakan hukum dan keadilan itu dapat dilaksanakan oleh pengadilan, maka dalam undang-undang ini dicantumkan persyaratan yang senantiasa harus dipenuhi oleh seorang hakim, seperti bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela. Untuk memperoleh hal tersebut di atas maka dalam setiap pengangkatan, pemberhentian, mutasi, kenaikan pangkat, tindakan atau hukuman administrasi terhadap hakim Pengadilan Agama perlu adanya kerjasama, konsultasi, dan koordinasi

⁹Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, pasal 15.

antara Mahkamah Agung dan Departemen Agama (Kementerian Agama).

Usaha dan kiat para pejabat peradilan agar tidak mudah dipengaruhi baik moril maupun materiil, maka perlu adanya pengaturan tersendiri mengenai tunjangan dan ketentuan lain bagi para pejabat peradilan, khususnya para hakim; demikian pula mengenai kepangkatan dan gajinya. Upaya untuk lebih mengukuhkan kehormatan dan kewibawaan hakim serta pengadilan, maka perlu juga dijaga mutu (keahlian/profesionalisme) para hakim dengan diadakannya syarat-syarat tertentu untuk menjadi hakim yang diatur dalam undang-undang ini. Selain itu, diadakan juga larangan-larangan bagi para hakim untuk merangkap jabatan penasihat hukum, pelaksana putusan pengadilan, wali, pengampu, dan setiap jabatan yang bersangkutan dengan suatu perkara yang akan atau sedang diadili olehnya. Adanya keahlian dan profesionalisme serta sifat kejujuran yang dimiliki oleh setiap aparatur negara, tentunya akan menghasilkan kebenaran dan keadilan dalam setiap pengambilan keputusan.

Sebuah fenomena bahwa tidaklah cukup hanya dengan memerinci larangan-larangan seperti tersebut di atas. Agar Peradilan dapat berjalan dengan efektif, maka Pengadilan Tinggi Agama diberi tugas pengawasan terhadap Pengadilan Agama di dalam daerah hukumnya. Hal ini akan meningkatkan koordinasi antar-Pengadilan Agama dalam daerah hukum suatu Pengadilan Tinggi Agama, yang pasti akan bermanfaat dalam kesatuan putusan yang dijatuhkan, karena Pengadilan Tinggi Agama dalam melakukan pengawasan tersebut dapat memberikan teguran, peringatan, dan petunjuk.

Perbuatan dan kegiatan hakim secara langsung dapat diawasi sehingga jalannya peradilan yang sederhana, cepat, dan dengan biaya ringan akan terjamin. Petunjuk-petunjuk yang menimbulkan sangkaan keras, bahwa hakim melakukan perbuatan tercela, melakukan kejahatan dan kelalaian yang terus menerus dalam menjalankan tugas pekerjaannya, dapat mengakibatkan bahwa ia diberhentikan tidak dengan hormat oleh Presiden selaku Kepala Negara setelah diberi kesempatan membela diri. Hal itu dicantumkan dengan tegas dalam undang-undang ini, mengingat luhur dan mulianya tugas hakim, sedangkan dalam kedudukannya sebagai pegawai negeri, baginya tetap

berlaku ancaman-ancaman terhadap perbuatan tercela sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50).

Tujuan dilahirkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ini selain mengatur susunan dan kekuasaan juga mengatur Hukum Acara Peradilan Agama. Bagaimanapun sempurnanya lembaga peradilan itu dengan penataan susunan organisasinya dan penegasan kekuasaannya, namun apabila alat untuk dapat menegakkan dan mempertahankan kekuasaannya itu belum jelas, maka lembaga peradilan tersebut tidak akan dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik. Oleh karena itu maka pengaturan Hukum Acara Peradilan Agama itu sangat penting dan karenanya pula maka sekaligus diatur dalam undang-undang peradilan ini.

Hukum Acara Peradilan Agama selama ini masih terdapat dalam berbagai peraturan dan surat edaran, baik dalam Staatsblad, Peraturan Pemerintah, Surat Edaran Mahkamah Agung dan Departemen Agama (Kementerian Agama) maupun dalam undang-undang perkawinan dan segala peraturan pelaksanaannya. Prinsip-prinsip pokok peradilan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, antara lain ketentuan bahwa sidang pengadilan harus terbuka untuk umum, setiap keputusan dimulai dengan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan serta ketentuan-ketentuan yang lain, dalam undang-undang ini lebih ditegaskan dan dicantumkan kembali. Tujuh kata tersebut (Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) biasa diistilahkan dengan Kepala Putusan pada sidang di pengadilan. Inilah salah satu kalimat yang dianggap sakral dalam persidangan dikarenakan pada kalimat tersebut ada asma Allah, yakni Tuhan Yang Maha Esa. Lembaga Peradilan Agama merupakan peradilan khusus dengan kewenangan mengadili perkara-perkara tertentu dan untuk golongan rakyat tertentu sebagaimana yang ditegaskan dalam penjelasan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun

1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu mengenai perkara perdata tertentu antara orang-orang yang beragama Islam, maka hukum acara perdata pada Peradilan Umum oleh undang-undang ini dinyatakan berlaku pada pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Agama, kecuali mengenai hal-hal yang secara khusus diatur oleh undang-undang ini.

Kemerdekaan Lembaga Peradilan Agama adalah salah satu dari empat lingkungan peradilan negara yang dijamin kemerdekaannya dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang diatur dalam undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Peradilan Agama yang kewenangannya mengadili perkara-perkara tertentu dan mengenai golongan rakyat tertentu, yaitu mereka yang beragama Islam, sejajar dengan peradilan yang lain. Oleh karena itu, hal-hal yang dapat mengurangi kedudukan Peradilan Agama oleh undang-undang ini dihapus, seperti pengukuhan keputusan Pengadilan Agama oleh Pengadilan Negeri. Sebaliknya untuk memantapkan kemandirian Peradilan Agama oleh undang-undang ini diadakan juru sita, sehingga Pengadilan Agama dapat melaksanakan keputusannya sendiri, dan tugas-tugas kepaniteraan dan kesekretariatan tidak terganggu oleh tugas-tugas kejurusitan, semua berjalan berdasarkan fungsinya masing-masing terhadap perkara-perkara yang sedang ditanganinya.

Perkara-perkara di bidang perkawinan merupakan sengketa keluarga yang memerlukan penanganan secara khusus sesuai dengan amanat undang-undang perkawinan. Oleh karena itu, maka dalam undang-undang ini diatur secara khusus hal-hal yang berkenaan dengan sengketa perkawinan tersebut dan sekaligus untuk meningkatkan pengaturan hukum acara sengketa perkawinan yang sampai saat diundangkannya undang-undang ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan.

Undang-undang perkawinan bertujuan antara lain melindungi kaum wanita pada umumnya dan pihak istri pada khususnya, namun dalam hal gugatan perceraian yang diajukan oleh istri, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan tersebut menentukan bahwa gugatan harus diajukan ke

pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat sesuai dengan prinsip hukum acara perdata umum. Untuk melindungi pihak istri, maka gugatan perceraian dalam undang-undang ini diadakan perubahan, tidak diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat tetapi ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat.¹⁰

Berkat Rahmat Allah swt. presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), memutuskan dan menetapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai undang-undang baru dan pertama tentang Peradilan Agama. Hadirnya undang-undang ini memberikan nuansa baru dan kelegahan bagi segenap unsur pada lembaga Peradilan Agama dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara.

b. Pemahaman Peradilan pada lembaga Peradilan Agama

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa yang dimaksud dengan Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.¹¹ Pengadilan adalah Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama di lingkungan Peradilan Agama. Kemudian yang dimaksud dengan hakim adalah hakim pada Pengadilan Agama dan Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama. Pegawai Pencatat Nikah adalah Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama. Juru Sita dan atau Juru Sita Pengganti adalah Juru Sita dan atau Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Agama.

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini. Penegasan dari undang-undang ini adalah masalah perkara perdata tertentu, yang lebih tegas lagi adalah perdata tertentu tidak bersifat umum. Perdata tertentu tersebut dilaksanakan oleh badan kekuasaan

¹⁰Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan*, pasal 21-22.

¹¹Lihat pasal 1 UU RI No. 7 Tbn 1989 tentang Peradilan Agama.

kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama adalah bertitik dan berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi di negara Republik Indonesia. Pengadilan Agama berkedudukan di kotamadya (kota) atau di ibu kota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya (kota) atau kabupaten. Sedangkan Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibu kota provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi yang bersangkutan. Pada dasarnya tempat kedudukan Pengadilan Agama ada di kotamadya (kota) atau di ibu kota kabupaten, yang daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya (kota) atau kabupaten, tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian.

Pengecualian ini dapat terjadi dan dilaksanakan bila ada hal-hal kejadian yang sangat luar biasa. Adapun pembinaan teknis peradilan bagi pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung. Sedangkan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan pengadilan dilakukan oleh Menteri Agama dan tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.¹² Hakim mempunyai hak otoritas dalam memutus perkara tidak boleh dipengaruhi apatah lagi terpengaruh dari pihak apa pun dan dari mana pun juga. Hakim dalam memutuskan perkara senantiasa dibarengi dengan pengetahuan yang cukup dan dilandasi dengan iman yang kuat agar tidak terpengaruh dan tidak dipengaruhi baik dari dalam diri sendiri maupun dari pihak luar.

c. Susunan Pengadilan pada lembaga Peradilan Agama

Pengadilan yang dimaksud terdiri dari Pengadilan Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Banding.. Pengadilan Agama dibentuk dengan Keputusan Presiden, sedangkan Pengadilan Tinggi Agama dibentuk dengan undang-undang. Mengenai susunan Pengadilan Agama terdiri dari pimpinan, hakim, anggota, panitera, sekretaris, dan juru sita. Sedangkan susunan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari pimpinan, hakim, anggota, panitera, dan sekretaris.

¹²*Ibid.*, pasal 5.

Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang ketua dan seorang wakil ketua; dan pimpinan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari seorang ketua dan seorang wakil ketua. Usul penyusunan dan pembentukan Pengadilan Agama diajukan oleh Menteri Agama berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Bagian terpenting dalam pengadilan di antaranya hakim yang merupakan pejabat dan melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Adapun syarat dan tata cara pengangkatan, pemberhentian serta pelaksanaan tugas hakim ditetapkan dalam undang-undang Peradilan Agama ini. Mengenai pembinaan dan pengawasan umum terhadap hakim sebagai pegawai negeri dilakukan oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana yang dimaksud tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Oleh karena itu, untuk dapat diangkat menjadi hakim pada Pengadilan Agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) warga negara Indonesia;
- b) beragama Islam;
- c) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d) setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- e) bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya atau bukan seseorang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam "Gerakan Kontra Revolusi G.30.S/PKI", atau organisasi terlarang yang lain;
- f) pegawai negeri;
- g) sarjana syaria'ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;
- h) berumur serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun;
- i) berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.¹³

Hakim yang dimaksudkan adalah pegawai negeri sehingga baginya berlaku Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Oleh karena itu, Menteri Agama wajib melakukan pembinaan dan pengawasan

¹³Lihat, *ibid.* pasal 13.

terhadap hakim dalam rangka mencapai daya guna dan hasil guna sebagaimana lazimnya bagi pegawai negeri. Pemberhentian dengan hormat hakim atas permintaan sendiri, mencakup pengertian pengunduran diri dengan alasan hakim yang bersangkutan tidak berhasil menegakkan hukum dalam lingkungan rumah tangganya sendiri. Pada hakikatnya situasi, kondisi, suasana, dan keteraturan hidup di rumah tangga setiap hakim pengadilan merupakan salah satu faktor yang penting peranannya dalam usaha membantu meningkatkan citra dan wibawa seorang hakim itu sendiri. Pengertian dengan "sakit jasmani atau rohani terus menerus" ialah yang menyebabkan sipenderita ternyata tidak mampu lagi melakukan tugas kewajibannya dengan baik. Istilah "tidak cakap" ialah misalnya yang bersangkutan banyak melakukan kesalahan besar dalam menjalankan tugasnya.

Sebuah lembaga pasti memerlukan pemimpin, dan pemimpin pada pengadilan disebut ketua. Untuk dapat diangkat menjadi ketua dan wakil ketua pada Pengadilan Agama diperlukan pengalaman sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebagai hakim Pengadilan Agama, dan untuk dapat diangkat menjadi hakim pada Pengadilan Tinggi Agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, dan i pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- b) berumur serendah-rendahnya 40 (empat puluh) tahun;
- c) berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai ketua atau wakil ketua Pengadilan Agama atau 15 (lima belas) tahun sebagai hakim Pengadilan Agama.

Jabatan yang lebih tinggi disebut Ketua Pengadilan Tinggi Agama yang biasanya berkedudukan di Ibukota Provinsi. Untuk dapat diangkat menjadi ketua Pengadilan Tinggi Agama diperlukan pengalaman sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebagai hakim Pengadilan Tinggi Agama atau sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun bagi hakim Pengadilan Tinggi Agama yang pernah menjabat ketua Pengadilan Agama. Sedang untuk dapat diangkat menjadi wakil ketua Pengadilan Tinggi Agama diperlukan pengalaman sekurang-

kurangnya 8 (delapan) tahun sebagai hakim Pengadilan Tinggi Agama atau, sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun bagi hakim Pengadilan Tinggi Agama yang pernah menjabat ketua Pengadilan Agama.¹⁴ Hakim dapat diangkat dan diberhentikan oleh presiden selaku Kepala Negara atas usul Menteri Agama (Dahulu Departemen Agama, kini Kementerian Agama) berdasarkan persetujuan ketua Mahkamah Agung RI. Sedangkan ketua dan wakil ketua pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama berdasarkan persetujuan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Suatu ketentuan bahwa sebelum memangku jabatannya, ketua, wakil ketua, dan hakim mereka wajib mengucapkan sumpah menurut agama Islam yang berbunyi sebagai berikut:

"Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya, untuk memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apa pun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapa pun juga".

"Saya bersumpah bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga suatu janji atau pemberian".

"Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala undang-undang serta peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia".

"Saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama, dan dengan tidak membedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang ketua, wakil ketua, hakim pengadilan yang berbudi baik dan jujur dalam menegakan hukum dan keadilan".¹⁵

¹⁴H. Muhammad Amin Summa, *op.cit.*, h. 276.

¹⁵Lihat, *UURI No. 7 Thn 1989 tentang Peradilan Agama, op.cit.*, pasal 16.

Persyaratan dalam memangku jabatan sebagai wakil ketua dan hakim Pengadilan Agama diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Agama. Wakil ketua dan hakim Pengadilan Tinggi Agama serta ketua Pengadilan Agama diambil sumpahnya oleh ketua Pengadilan Tinggi Agama. Kemudian ketua Pengadilan Tinggi Agama diambil sumpahnya oleh ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.¹⁶

Sebagai abdi negara, hakim tidak boleh merangkap jabatan/tugas menjadi pelaksana putusan pengadilan; tidak boleh menjadi wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang diperiksa olehnya; tidak boleh menjadi pengusaha. Demikian juga hakim tidak boleh merangkap menjadi penasihat hukum dan termasuk juga pada peraturan pemerintah yang melarangnya selain larangan yang disebutkan di atas. Jabatan tentang pemberhentian, ketua, wakil ketua, dan hakim diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena hal-hal berikut ini:

- a) permintaan sendiri;
- b) sakit jasmani atau rohani terus-menerus;
- c) telah berumur 60 (enam puluh) tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim Pengadilan Agama, dan 63 (enam puluh tiga) tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim Pengadilan Tinggi Agama;
- d) ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.¹⁷

Apabila ketua, wakil ketua, dan hakim yang meninggal dunia dengan sendirinya diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh presiden selaku Kepala Negara. Ketua, wakil ketua, dan hakim akan diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan yang bersangkutan terbukti secara sah dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan; melakukan perbuatan tercela; terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya; melanggar sumpah jabatan; melanggar larangan sebagai pejabat negara.

Pengertian tentang istilah "dipidana" ialah dipidana dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan, dan yang dimaksud

¹⁶ Lihat, *ibid*.

¹⁷ *Ibid*, pasal 18.

dengan "melakukan perbuatan tercela" ialah apabila hakim yang bersangkutan karena sikap, perbuatan, dan tindakannya, baik di dalam maupun di luar pengadilan merendahkan martabat hakim. Kemudian istilah dengan "tugas pekerjaan" ialah semua tugas yang dibebankan kepada yang bersangkutan. Dalam hal pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan, yang bersangkutan tidak diberi kesempatan untuk membela diri, kecuali apabila pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya itu kurang dari 3 (tiga) bulan. Seorang hakim tidak boleh diberhentikan dari kedudukannya sebagai pegawai negeri sebelum diberhentikan dari jabatannya sebagai hakim. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, hakim bukan jabatan dalam eksekutif. Oleh sebab itu, pemberhentiannya harus tidak sama dengan pegawai negeri yang lain.¹⁸ Pejabat diusulkan pemberhentiannya tidak dengan hormat dengan alasan melanggar larangan yang telah diucapkan melalui sumpah tersebut di atas setelah yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim. Pembentukan, susunan, dan tata kerja Majelis Kehormatan Hakim serta tata cara pembelaan diri ditetapkan oleh ketua Mahkamah Agung bersama-sama dengan Menteri Agama Republik Indonesia.

Hakim sebagai pejabat atau pejabat sebagai seorang hakim yang diberhentikan dari jabatannya, tidak dengan sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri karena melalui proses pada instansi lainnya seperti Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara. Sebagai ketua, wakil ketua, dan hakim sebelum diberhentikan tidak dengan hormat dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh presiden selaku Kepala Negara atas usul Menteri Agama berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Terhadap pengusulan pemberhentian sementara, berlaku juga ketentuan seperti ketentuan pemberhentian tersebut di atas. Apabila terhadap seorang hakim ada perintah penangkapan yang diikuti dengan penahanan, dengan sendirinya hakim tersebut diberhentikan sementara dari jabatannya.

¹⁸Lihat, Penjelasan pasal 19-20, UURI No. 7 Thn 1989 tentang Peradilan Agama.

Apabila seorang hakim dituntut di muka Pengadilan dalam perkara pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana tanpa ditahan, maka ia dapat diberhentikan sementara dari jabatannya. Pengadilan dalam perkara pidana tersebut adalah Pengadilan Negeri dan/atau Pengadilan Militer. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak dengan hormat, dan pemberhentian sementara serta hak-hak pejabat yang dikenakan pemberhentian, diatur dengan Peraturan Pemerintah. Demikian juga hakim dalam menjalankan tugasnya melalui sebuah protokoler berdasarkan peraturan yang berlaku.

Kedudukan protokol hakim diatur dengan Keputusan Presiden. Tunjangan dan ketentuan-ketentuan lainnya bagi ketua, wakil ketua, dan hakim diatur dengan Keputusan Presiden. Demikian halnya pangkat dan gaji hakim diatur tersendiri berdasarkan peraturan yang berlaku. Ketentuan lain yang dimaksudkan adalah hal-hal yang antara lain menyangkut kesejahteraan seperti rumah dinas, dan kendaraan dinas.

Kemudian mengenai pelanggaran bagi ketua, wakil ketua, dan hakim dapat ditangkap atau ditahan hanya atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama, kecuali dalam hal-hal berikut:

- a) tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau
- b) disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati; atau
- c) disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.

Tata cara atau proses penangkapan dan penahanan pun diatur secara rinci dan tidak boleh serta merta ada pelanggaran seorang hakim langsung ditangkap, tetapi harus sesuai prosedural yang berlaku. Karenanya seorang hakim harus didampingi panitera yang baik dan profesional dalam menjalankan tugasnya, agar tidak terjebak dalam kesalahan administratif.

Setiap pengadilan ditetapkan adanya kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang panitera. Dalam melaksanakan tugasnya panitera Pengadilan Agama dibantu oleh seorang wakil panitera, beberapa orang panitera muda, beberapa orang panitera pengganti, dan beberapa orang juru sita. Demikian juga dalam melaksanakan tugasnya panitera Pengadilan Tinggi Agama dibantu oleh seorang wakil panitera, beberapa orang panitera muda, dan beberapa orang panitera pengganti, sebagaimana pada Pengadilan Agama. Karena itu proses pengangkatan panitera pun melalui seleksi yang cukup ketat.

Setiap pegawai untuk dapat diangkat menjadi panitera Pengadilan Agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) warga negara Indonesia;
- b) beragama Islam;
- c) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d) setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- e) berijazah serendah-rendahnya sarjana muda syari'ah atau sarjana muda hukum yang menguasai hukum Islam;
- f) berpengalaman sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sebagai wakil panitera atau 7 (tujuh) tahun sebagai panitera muda Pengadilan Agama, atau menjabat wakil panitera Pengadilan Tinggi Agama.¹⁹

Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam huruf d pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tersebut adalah setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, harus diartikan mencakup juga syarat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf e undang-undang ini. Sedangkan istilah dengan "sarjana muda syari'ah atau sarjana muda hukum" termasuk mereka yang telah mencapai tingkat pendidikan hukum sederajat dengan sarjana muda syari'ah atau sarjana muda hukum, dan dianggap cakap untuk jabatan itu. Masa pengalaman disesuaikan dengan eselon, pangkat, dan syarat-syarat lain yang berkaitan. Alih jabatan dari Pengadilan Tinggi Agama ke Pengadilan Agama atau sebaliknya

¹⁹Lihat, *ibid.*, pasal 27.

dimungkinkan dalam eselon yang sama. Untuk dapat diangkat menjadi panitera Pengadilan Tinggi Agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) warga negara Indonesia;
- b) beragama Islam;
- c) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d) setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- e) berijazah sarjana syari'ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;
- f) berpengalaman sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sebagai wakil panitera atau 8 (delapan) tahun sebagai panitera muda Pengadilan Tinggi Agama, atau 4 (empat) tahun sebagai panitera Pengadilan Agama.²⁰

Untuk dapat diangkat menjadi wakil panitera Pengadilan Agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat seperti tersebut di atas ditambah dengan berpengalaman sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sebagai panitera muda atau 6 (enam) tahun sebagai panitera pengganti Pengadilan Agama. Demikian juga untuk dapat diangkat menjadi wakil panitera Pengadilan Tinggi Agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat seperti yang tersebut di atas, ditambah dengan berijazah sarjana syari'ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam, berpengalaman sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sebagai panitera muda atau 7 (tujuh) tahun sebagai panitera pengganti Pengadilan Tinggi Agama, atau 4 (empat) tahun sebagai wakil Panitera Pengadilan Agama, atau menjabat panitera Pengadilan Agama.

Ketentuan untuk dapat diangkat menjadi panitera muda Pengadilan Agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat yang disebutkan sebelumnya ditambah dengan telah berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai panitera pengganti Pengadilan Agama. Sedangkan untuk dapat diangkat menjadi panitera muda Pengadilan Tinggi Agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat seperti tersebut di atas ditambah dengan berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai panitera Pengganti

²⁰*Ibid.*, pasal 28.

Pengadilan Tinggi Agama, atau 4 (empat) tahun sebagai panitera muda atau 8 (delapan) tahun sebagai panitera pengganti Pengadilan Agama, atau menjabat wakil panitera Pengadilan Agama. Untuk dapat diangkat menjadi panitera pengganti Pengadilan Agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sama dengan di atas ditambah dengan berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai pegawai negeri pada Pengadilan Agama. Untuk dapat diangkat menjadi panitera pengganti Pengadilan Tinggi Agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana di atas dan ditambah dengan syarat berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai panitera pengganti Pengadilan Agama atau 10 (sepuluh) tahun sebagai pegawai negeri pada Pengadilan Tinggi Agama.

Ada kriteria sebagai pengecualian yang ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, yakni panitera tidak boleh merangkap menjadi wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan perkara yang di dalamnya ia bertindak sebagai panitera. Panitera tidak boleh merangkap menjadi penasihat hukum. Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh panitera selain jabatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) tersebut,²¹ demikian halnya diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

Panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan diangkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh Menteri Agama. Pengangkatan atau pemberhentian panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti dapat juga dilakukan berdasarkan usul ketua pengadilan yang bersangkutan. Sebelum memangku jabatannya, panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti diambil sumpahnya menurut agama Islam oleh ketua pengadilan yang bersangkutan, dengan sumpah adalah sebagai berikut:

²¹Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*. Pasal 35 ayat (1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, panitera tidak boleh merangkap menjadi wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan perkara yang di dalamnya ia bertindak sebagai panitera.

"Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya, untuk memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apa pun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapa pun juga".

"Saya bersumpah bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga suatu janji atau pemberian".

"Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala undang-undang serta peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia".

"Saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama, dan dengan tidak membedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan".²²

Setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya juru sita dan juru sita pengganti. Untuk dapat diangkat menjadi juru sita, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) warga negara Indonesia;
- b) beragama Islam;
- c) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d) setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- e) berijazah serendah-rendahnya sekolah lanjutan tingkat atas;
- f) berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Juru Sita Pengganti.

Sedangkan untuk dapat diangkat menjadi juru sita pengganti, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

²²*Ibid.*, pasal 37.

- a) syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, b, c, d, dan e di atas;
- b) berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai pegawai negeri pada Pengadilan Agama.²³

Juru sita dapat diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama atas usul ketua Pengadilan Agama. Juru sita pengganti diangkat dan diberhentikan oleh ketua Pengadilan Agama.

Sebelum memegang jabatannya, juru sita dan juru sita pengganti diambil sumpahnya menurut agama Islam oleh ketua Pengadilan Agama, dengan bunyi sumpah adalah sebagai berikut:

"Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya, untuk memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apa pun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapa pun juga".

"Saya bersumpah bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian".

"Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala undang-undang serta peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia".

"Saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama, dan dengan tidak membedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang juru sita, juru sita pengganti yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan".²⁴

Juru sita tidak boleh merangkap menjadi wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan perkara yang di dalamnya ia sendiri

²³*Ibid.*, pasal 39.

²⁴*Ibid.*, pasal 41.

berkepentingan. Juru sita tidak boleh merangkap menjadi penasihat hukum. Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh juru sita selain jabatannya dan lebih lengkapnya diatur oleh Menteri Agama berdasarkan persetujuan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Adapun mengenai sekretaris pada setiap pengadilan ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris dan dibantu oleh seorang wakil sekretaris. Demikian halnya panitera pengadilan merangkap sekretaris pengadilan. Untuk dapat diangkat menjadi wakil sekretaris Pengadilan Agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) warga negara Indonesia;
- b) beragama Islam;
- c) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d) setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- e) berijazah serendah-rendahnya sarjana muda syari'ah, atau sarjana muda hukum yang menguasai hukum Islam atau sarjana muda administrasi;
- f) berpengalaman di bidang administrasi peradilan.

Untuk dapat diangkat menjadi wakil sekretaris Pengadilan Tinggi Agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) warga negara Indonesia;
- b) beragama Islam;
- c) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d) setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- e) berpengalaman di bidang administrasi peradilan;
- f) berijazah sarjana syari'ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam.

Pejabat yang bernama wakil sekretaris pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama (UU pertama). Pengangkatan atau pemberhentian wakil sekretaris pengadilan dapat juga dilakukan berdasarkan usul ketua pengadilan. Sebelum memangku jabatannya wakil sekretaris diambil sumpahnya menurut agama Islam oleh ketua pengadilan yang bersangkutan. Adapun bunyi sumpahnya adalah sebagai berikut:

"Demi Allah, saya bersumpah: bahwa saya, untuk diangkat menjadi wakil sekretaris, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah;

bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;

bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat wakil sekretaris serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;

bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;

bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara".²⁵

d. Kekuasaan pengadilan pada lembaga Peradilan Agama

Lembaga Peradilan Agama dalam melaksanakan tugasnya pada prinsipnya adalah sama, yakni menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menetapkan serta menyelesaikan perkara-perkara, baik di Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama maupun Mahkamah Agung. Pada Pengadilan Agama dinamakan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Agama dinamakan tingkat banding, dan Mahkamah Agung, dinamakan tingkat kasasi, dan selanjutnya ke tingkat peninjauan kembali.

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a) perkawinan;
- b) kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
- c) wakaf dan sedekah.

Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf (a) ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang

²⁵Pasal 48.

mengenai perkawinan yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf (b) di atas ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut. Mengenai hal terjadi sengketa tentang hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara, maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Penyelesaian terhadap objek yang menjadi sengketa dimaksud tidak berarti menghentikan proses peradilan di Pengadilan Agama atas objek yang menjadi sengketa itu. Sedangkan Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding. Pengadilan Tinggi Agama juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya.²⁶

Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. Selain tugas dan kewenangannya, pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang. Pemberian keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam dikecualikan dalam hal-hal yang berhubungan dengan perkara yang sedang atau akan diperiksa di pengadilan. Undang-undang yang dimaksudkan adalah ditetapkan atau diatur dalam undang-undang tersendiri, sedangkan yang dimaksud "berdasarkan undang-undang" adalah ditetapkan atau diatur dalam Peraturan Pemerintah berdasarkan undang-undang peradilan (undang-undang pertama) ini.

Perihal pengawasan dan pelaksanaan tugas, ketua pengadilan mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris, dan juru sita di daerah hukumnya. Selain tugas tersebut, ketua Pengadilan Tinggi Agama di daerah hukumnya melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat

²⁶Pasal 51.

Pengadilan Agama dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya. Yang dimaksud dengan "seksama dan sewajarnya" ialah antara lain bahwa penyelenggaraan peradilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu yang dilakukan dengan azas sederhana, cepat, dan biaya ringan.²⁷ Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana yang dimaksud di atas, ketua pengadilan dapat memberikan petunjuk, teguran, dan peringatan, yang dipandang perlu. Pengawasan sebagaimana yang dimaksudkan, tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Ketua pengadilan dan pihak lain tidak boleh mengintervensi seorang hakim dalam menjalankan tugas, kecuali jika hakim tersebut tidak melaksanakan tugasnya yang tidak berdasar atas peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Hakim dalam melaksanakan hukum acara harus betul-betul menguasainya dan senantiasa dilandasi dengan iman dan takwanya kepada Allah swt., agar ia selamat dunia dan akhirat. Memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara seorang hakim harus memiliki iman dan takwa kepada Tuhan, selain ilmu yang dimiliki tentang peradilan.

e. Hukum acara Peradilan Agama

Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Tiap pemeriksaan perkara di pengadilan dimulai sesudah diajukannya suatu permohonan atau gugatan dan pihak-pihak yang berperkara telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya. Ketentuan sebagaimana yang dimaksudkan tidak menutup kemungkinan usaha penyelesaian

²⁷Pasal 57.

perkara secara damai. Perdamaian dapat dilakukan di luar pengadilan atau di luar sidang.

Pelaksanaan sidang di pengadilan, peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (disebut sebagai kepala putusan), dan setiap penetapan dan putusan dimulai dengan kalimat “Bismillahirrahmanirrahim” diikuti dengan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²⁸ Yang dimaksud dengan penetapan dan putusan ini adalah penetapan dan putusan Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama, dan Mahkamah Agung. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang, tanpa memandang bulu termasuk strata sosial seseorang. Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sidang pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum, kecuali apabila undang-undang menentukan lain atau jika hakim dengan alasan-alasan penting yang dicatat dalam berita acara sidang, memerintahkan bahwa pemeriksaan secara keseluruhan atau sebagian akan dilakukan dengan sidang tertutup. Tidak terpenuhinya ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan akan mengakibatkan seluruh pemeriksaan beserta penetapan atau putusan hakim batal menurut hukum, dan rapat permusyawaratan hakim bersifat rahasia. Alasan penting yang dijadikan dasar oleh hakim untuk memerintahkan pemeriksaan sidang tertutup harus dicatat dalam berita acara sidang, sekaligus sebagai hasil dari penetapan putusan majelis.

Penetapan dan putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.²⁹ Yang dimaksud dengan penetapan putusan majelis adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan; sedangkan putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Atas penetapan dan putusan Pengadilan Agama dapat dimintakan banding oleh pihak yang berperkara, kecuali apabila undang-undang menentukan lain. Segala

²⁸UURI No.7 Thn 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 57.

²⁹*Ibid.*, pasal 61.

penetapan dan putusan pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Pada setiap penetapan dan putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua dan hakim-hakim yang memutus (hakim majelis yang bersangkutan) serta panitera yang ikut bersidang pada waktu penetapan dan putusan itu diucapkan. Berita acara tentang pemeriksaan ditandatangani oleh ketua dan panitera yang bersidang.

Berdasarkan penetapan dan putusan Pengadilan Tinggi Agama dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia oleh pihak yang berperkara. Penetapan dan putusan pengadilan yang dimintakan banding atau kasasi, pelaksanaannya ditunda demi hukum, kecuali apabila dalam amarnya menyatakan penetapan atau putusan tersebut dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, atau kasasi terhadap sengketa-sengketa yang diperkarakan di pengadilan, termasuk sengketa dalam perkawinan.

Pemeriksaan sengketa perkawinan, termasuk perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Mengenai cerai talak, seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. Permohonan sebagaimana yang dimaksudkan di atas akan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon. Dalam hal termohon bertempat tinggal di luar negeri, permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal pemohon.³⁰

Mengenai domisili pemohon dan termohon bertempat tinggal di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal

³⁰H. Muhammad Amin Summa, *op.cit.*, h. 289.

mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan. Permohonan sebagaimana yang dimaksudkan harus dicantumkan secara jelas berupa nama, umur, dan tempat kediaman pemohon, yaitu suami, dan termohon (istri) yaitu alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak tersebut. Pemeriksaan berkas permohonan cerai talak dilakukan oleh majelis hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat permohonan cerai talak didaftarkan di kepaniteraan. Kemudian pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan dalam sidang tertutup di pengadilan.

Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan. Mengenai penetapan sebagaimana yang dimaksudkan, istri dapat mengajukan banding. Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suami dan istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut. Dalam sidang tersebut suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak, mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh istri atau kuasanya.³¹

Apabila istri telah mendapat panggilan secara sah atau patut, tetapi tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya istri atau wakilnya. Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama. Pada sidang tersebut panitera harus memperhatikan jalannya sidang dan mencatat dengan sebaik-baiknya.

³¹*Ibid.*, h. 290.

Panitera mencatat segala hal ihwal yang terjadi dalam sidang ikrar talak yang telah diputuskan oleh hakim. Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dan penetapan tersebut tidak dapat dimintakan banding atau kasasi. Pencari keadilan menerima putusan atau menyatakan banding, mereka diberikan kebebasan untuk memilih kedua pilihan tersebut.

Persoalan gugat-menggugat (cerai gugat), gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat. Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Akan tetapi, bila penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Untuk melindungi pihak istri gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat. Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan salah satu pihak mendapat pidana penjara, maka untuk memperoleh putusan perceraian, sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan pengadilan yang berwenang yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Tetapi bila gugatan perceraian didasarkan atas alasan bahwa tergugat mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami, maka hakim dapat memerintahkan tergugat untuk memeriksakan diri kepada dokter.

Gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqaq*, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri. Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakam. *Syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus

menerus antara suami dan istri. Hakam ialah orang yang ditetapkan pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap *syiqaq*.

Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah. Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat, pengadilan dapat menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami; menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak; menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri.

Perkara gugatan perceraian gugur apabila suami atau istri meninggal sebelum adanya putusan pengadilan. Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh majelis hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat gugatan perceraian didaftarkan di kepaniteraan. Selanjutnya pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup oleh majelis hakim. Kemudian putusan pengadilan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.³²

Ketentuan waktu pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, hakim berusaha mendamaikan kedua pihak. Dalam sidang perdamaian tersebut, suami istri harus datang secara pribadi, kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman di luar negeri, dan tidak dapat datang menghadap secara pribadi dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu. Apabila kedua pihak bertempat kediaman di luar negeri, maka penggugat pada sidang perdamaian tersebut harus menghadap secara pribadi. Kemudian selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat

³²Lihat, *ibid.*, h. 293.

dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan. Selama perkara belum diputus, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan pada semua tingkat peradilan. Usaha perdamaian merupakan skala prioritas dalam persidangan tersebut. Apabila tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan yang ada dan telah diketahui oleh penggugat sebelum perdamaian tercapai. Putusan tersebut akan dikirimkan kepada pihak yang berperkara, baik penggugat maupun tergugat melalui panitera.

Pejabat panitera pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu. Apabila perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat Nikah tersebut dicatat pada bagian pinggir daftar catatan perkawinan.

Apabila perkawinan dilangsungkan di luar negeri, maka satu helai salinan putusan disampaikan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat didaftarkan perkawinan mereka di Indonesia. Panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung setelah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para kedua belah pihak. Petugas tidak boleh lalai dalam menyampaikan putusan tersebut, karena mengakibatkan kerugian kedua belah pihak.

Terjadinya kelalaian pengiriman salinan putusan sebagaimana yang dimaksudkan, menjadi tanggung jawab panitera yang bersangkutan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk, apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau istri atau keduanya. Atas kelalaiannya itu, panitera atau pejabat pengadilan yang

ditunjuk dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi kepada pejabat yang lalai tersebut boleh ringan dan boleh sedang atau berat, tergantung jenis pelanggarannya. Gugatan menyangkut pemeliharaan dan penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika ada tuntutan pihak ketiga, maka pengadilan menunda terlebih dahulu perkara harta bersama tersebut sampai ada putusan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tentang hal-hal keperdataan termasuk cerai dengan alasan berzina. Hal-hal tersebut dilaksanakan dengan baik adalah demi tercapainya prinsip bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Apabila permohonan atau gugatan cerai diajukan atas alasan salah satu pihak melakukan zina, sedangkan pemohon atau penggugat tidak dapat melengkapi bukti-bukti dan termohon atau tergugat menyanggah alasan tersebut, dan hakim berpendapat bahwa permohonan atau gugatan itu bukan tiada pembuktian sama sekali serta upaya peneguhan alat bukti tidak mungkin lagi diperoleh baik dari pemohon atau penggugat maupun dari termohon atau tergugat, maka hakim karena jabatannya dapat menyuruh pemohon atau penggugat untuk bersumpah. Pihak termohon atau tergugat diberi kesempatan pula untuk meneguhkannya dengan cara yang sama. Apabila sumpah dilakukan oleh suami, maka penyelesaiannya dapat dilaksanakan dengan cara li'an. Tetapi bila sumpah dilakukan oleh istri maka penyelesaiannya dilaksanakan dengan hukum acara yang berlaku, dan semua konsep persidangan dilakukan dengan biaya ringan.

Menyangkut biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon.³³ Biaya penetapan pada perkara di pengadilan yang bukan merupakan penetapan atau putusan akhir akan diperhitungkan dalam penetapan atau putusan akhir dengan biaya ringan. Biaya-biaya perkara tersebut meliputi: biaya

³³*Libat, UURI No. 7 Tbn 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 89 (1).*

kepaniteraan dan biaya meterai yang diperlukan untuk perkara itu; biaya untuk para saksi, saksi ahli, penerjemah, dan biaya pengambilan sumpah yang diperlukan dalam perkara itu; biaya yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan setempat dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan oleh pengadilan dalam perkara itu; biaya pemanggilan, pemberitahuan, dan lain-lain atas perintah pengadilan yang berkenaan dengan perkara itu.

Pengaturan besarnya biaya sidang perkara diatur oleh Menteri Agama dengan persetujuan Mahkamah Agung. Jumlah biaya perkara harus dimuat dalam amar penetapan atau putusan pengadilan. Jumlah biaya yang dibebankan oleh pengadilan kepada salah satu pihak berperkara untuk dibayarkan kepada pihak lawannya dalam perkara itu, harus dicantumkan juga dalam amar penetapan atau putusan pengadilan. Berkaitan dengan pembagian tugas di pengadilan, ketua pengadilan mengatur pembagian tugas para hakim. Ketua pengadilan membagikan semua berkas perkara dan atau surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke pengadilan kepada majelis hakim untuk diselesaikan. Demikian juga ketua pengadilan menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut, tetapi apabila terdapat perkara tertentu yang karena menyangkut kepentingan umum harus segera diadili, maka perkara itu didahulukan. Pihak yang berwenang menentukan bahwa suatu perkara menyangkut kepentingan umum adalah ketua pengadilan. Ketua pengadilan wajib mengawasi kesempurnaan pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan panitera pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi perkara dan mengatur tugas wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti. Pejabat seperti panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti bertugas membantu hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang pengadilan. Berdasarkan catatan panitera, disusun berita acara persidangan.

Pejabat yang berwenang bertugas melaksanakan penetapan atau putusan pengadilan adalah panitera. Panitera wajib membuat daftar semua perkara yang diterima di kepaniteraan. Dalam daftar perkara sebagaimana yang dimaksudkan, tiap perkara diberi nomor

urut dan dibubuhi catatan singkat tentang isinya. Panitera membuat salinan atau turunan penetapan atau putusan pengadilan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Panitera bertanggung jawab atas pengelolaan berkas perkara, penetapan atau putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti, dan surat-surat lain yang disimpan di kepaniteraan. Semua daftar, catatan, risalah, berita acara, serta berkas perkara tidak boleh dibawa keluar dari ruangan kepaniteraan, kecuali atas izin ketua pengadilan berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Kalimat yang dimaksud dengan "dibawa keluar" adalah meliputi segala bentuk dan cara apa pun juga yang memindahkan isi daftar catatan, risalah, agar tidak jatuh ketangan pihak yang tidak berhak. Hal ini merupakan suatu tindakan untuk mencegah terjadinya pemalsuan terhadap pihak-pihak lain yang berkepentingan secara hukum. Tata cara pengeluaran surat asli, salinan atau turunan penetapan atau putusan, risalah, berita acara, akta, dan surat-surat lain diatur oleh Mahkamah Agung. Tugas dan tanggung jawab serta tata kerja kepaniteraan pengadilan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung RI.

Pejabat yang bernama juru sita, ia wajib dan bertugas melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh ketua sidang atau ketua majelis hakim; menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, dan pemberitahuan penetapan atau putusan pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan undang-undang; melakukan penyitaan atas perintah ketua pengadilan; membuat berita acara penyitaan, yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Juru sita juga berwenang melakukan tugasnya di daerah hukum pengadilan yang bersangkutan. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas juru sita diatur oleh Mahkamah Agung. Demikian halnya sekretaris pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi umum pengadilan. Tugas dan tanggung jawab, susunan organisasi, serta tata kerja sekretariat diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama Republik Indonesia (hal ini diatur sebelum terjadinya penyatuan atap lembaga peradilan di Mahkamah Agung RI).

Peraturan dan ketentuan lain yang dapat diberlakukan saat mulai berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, adalah semua Lembaga Peradilan Agama yang telah ada dinyatakan sebagai Badan Peradilan Agama menurut undang-undang tersebut. Semua peraturan pelaksanaan yang telah ada mengenai Peradilan Agama dinyatakan tetap berlaku selama ketentuan baru berdasarkan undang-undang tersebut belum dikeluarkan, sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan undang-undang yang dimaksud. Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ini, maka semua peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura (Staatsblad Tahun 1882 Nomor 152 dan Staatsblad Tahun 1937 Nomor 116 dan Nomor 610); Peraturan tentang Kerapatan Qadi dan Kerapatan Qadi Besar untuk sebagian Residensi Kalimantan Selatan dan Timur (Staatsblad Tahun 1937 Nomor 638 dan Nomor 639); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 99); dan Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019), dinyatakan tidak berlaku. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 236 a Reglemen Indonesia yang diperbaharui (RIB), Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44, mengenai permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, diselesaikan oleh Pengadilan Agama.³⁴ Intinya adalah semua peraturan atau perundang-undangan lama yang bertentangan dengan undang-undang yang baru dinyatakan tidak berlaku lagi.

Materi perkara (disebut perkara perdata tertentu) meliputi: perkawinan; kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan

³⁴Ayat (1) Yang dimaksudkan dengan Pengadilan dalam undang-undang ini ialah: a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam. b. Pengadilan Umum bagi yang lainnya. Ayat (2) Setiap keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum.

hukum Islam; serta wakaf dan sedekah. Materi ini masih sangat sempit dan lembaga Peradilan Agama masih berada pada Departemen Agama RI (kini Kementerian Agama RI). Materi perkara ini direkonstruksi dengan pendekatan yuridis formal kedua pada lembaga Peradilan Agama di Indonesia pada tahun 2006. Materi perkaranya tentunya lebih luas karena sebelumnya merupakan materi perkara perdata tertentu tersebut direkonstruksi menjadi perkara tertentu, tidak lagi menggunakan istilah perdata.

2. Yuridis Formal Penyatuan Atap³⁵

Lembaga Peradilan Agama dalam pengembangan dan perkembangannya mempunyai landasan yuridis formal yang kedua dengan melahirkan perubahan kedua undang-undang Peradilan Agama sebagai dasar hukum rekonstruksi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

³⁵Lihat, SRepublik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2006 oleh Presiden Republik Indonesia, Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono. Dasar Hukum Utama Penyatuan Atap adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Penggantian dan perubahan kedua undang-undang tersebut secara tegas telah mengatur pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial dari semua lingkungan peradilan ke Mahkamah Agung. Dengan demikian, organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan di lingkungan Peradilan Agama yang sebelumnya masih berada di bawah Departemen Agama/Kementerian Agama berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama perlu disesuaikan, karena berada di bawah Mahkamah Agung RI. Ketentuan yang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengalihan ke Mahkamah Agung telah dilakukan. Untuk memenuhi ketentuan dimaksud perlu pula diadakan perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Perubahan tersebut dilaksanakan hingga dua kali sehingga penyatuan atap Lembaga Peradilan Agama secara menyeluruh dapat terpenuhi, sehingga Peradilan Agama dari Departemen Agama/Kementerian Agama pindah ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

a. Dasar hukum kedua lembaga Peradilan Agama

Lembaga Peradilan Agama setelah lahir undang-undang pertama yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, 17 tahun kemudian lahir undang-undang yang mengamandemennya. Undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Amandemen pertama sebagai berkah dari Allah swt. bagi Lembaga Peradilan Agama sebagai negara yang berdaulat. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat yang tertib, bersih, makmur, dan berkeadilan, serta makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran sebagai dambaan bagi bangsa Indonesia.

Peradilan Agama merupakan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka dan berdaulat untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Lembaga Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu perlu membentuk undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sebagai sumber pokok undang-undang ini adalah berdasar pada pasal 20, pasal 21, pasal 24, dan pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya dasar undang-undang peradilan amandemen ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4359). Juga tidak dapat dipungkiri bahwa undang-undang pertama tentang peradilan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400). Kemudian dasar hukum lainnya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4338). Olehnya itu, dengan berkat Allah swt., Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memutuskan dan menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam pasal 24 ayat (2) bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer.³⁶ Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sadaqah, dan ekonomi syari'ah.

Penegasan tentang kewenangan Peradilan Agama tersebut adalah dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum kepada Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara tertentu tersebut, termasuk pelanggaran atas Undang-Undang tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya serta memperkuat landasan hukum Mahkamah Syar'iyah dalam melaksanakan kewenangannya di bidang jinayah berdasarkan qanun. Kewenangan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama diperluas, hal ini sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat, khususnya masyarakat

³⁶Lihat ketentuan umum, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*.

muslim. Perluasan tersebut antara lain meliputi ekonomi syari'ah. Karena itu dalam kaitannya dengan perubahan undang-undang peradilan, kalimat yang terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan: "Para Pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan", dinyatakan dihapus.

Upaya untuk memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka, sesuai dengan tuntutan reformasi di bidang hukum, telah dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana terakhir telah diganti menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Demikian pula halnya telah dilakukan perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan adanya pengadilan khusus yang dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan dengan undang-undang. Oleh karena itu, keberadaan pengadilan khusus³⁷ dalam lingkungan Peradilan Agama perlu diatur pula dalam undang-undang ini. Penggantian dan perubahan kedua undang-undang tersebut secara tegas telah mengatur pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial dari semua lingkungan peradilan ke Mahkamah Agung. Dengan demikian, organisasi, administrasi, dan

³⁷Dikatakan Pengadilan Khusus, karena hanya berlaku bagi orang-orang yang beragama Islam sebagai pencari keadilan pada lembaga Peradilan Agama, atau diferensiasi/spesialisasi di lingkungan lembaga Peradilan Agama, termasuk khusus Pengadilan Syari'ah Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

finansial badan peradilan di lingkungan Peradilan Agama yang sebelumnya masih berada di bawah Departemen Agama/Kementerian Agama berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama perlu disesuaikan.

Ketentuan yang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengalihan ke Mahkamah Agung telah dilakukan. Untuk memenuhi ketentuan dimaksud perlu pula diadakan perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Perubahan tersebut dilaksanakan hingga dua kali sehingga penyatuan atap Lembaga Peradilan Agama secara menyeluruh dapat terpenuhi, sehingga Peradilan Agama dari Departemen Agama/Kementerian Agama pindah ke Mahkamah Agung.

b. Pemahaman tentang peradilan dan pengadilan dalam Lembaga Peradilan Agama

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Di antara pasal 3 dan pasal 4 disisipkan pasal baru yakni pasal 3A, yang berbunyi bahwa di lingkungan Peradilan Agama dapat diadakan pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang.³⁸ Yang dimaksud dengan "rakyat pencari keadilan" adalah setiap orang baik warga negara Indonesia maupun orang asing yang mencari keadilan pada pengadilan di Indonesia.

Pengadilan Khusus dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Pengadilan Syari'at Islam yang diatur dengan undang-undang. Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang

³⁸Lihat Penjelasan, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, pada pasal 3A.

oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 15 ayat (2) disebutkan bahwa: "Peradilan Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan Peradilan Umum".

c. Kedudukan dan kewenangan hakim

Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Pada dasarnya tempat kedudukan pengadilan agama berada di ibukota kabupaten dan kota, yang daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya pengecualian.

Sedangkan ketentuan pasal 5 diubah sehingga berbunyi, pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan finansial pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung. Inilah dasar pertama bahwa Peradilan Agama menyatu dalam wadah Mahkamah Agung Republik Indonesia, tetapi tidak serta merta langsung pindah sekaligus, perlu tahapan yang cukup lama. Pembinaan sebagaimana dimaksudkan tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Adapun pengertian hakim pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman. Syarat dan tata cara pengangkatan, pemberhentian, serta pelaksanaan tugas hakim ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ini.

Mengenai pembinaan dan pengawasan umum terhadap hakim dilakukan oleh ketua Mahkamah Agung. Pembinaan dan pengawasan umum sebagaimana dimaksudkan tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Ketentuan pasal 13 diubah sehingga berbunyi untuk dapat

diangkat sebagai calon hakim pengadilan agama, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) warga negara Indonesia;
- b) beragama Islam;
- c) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d) setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e) sarjana syariah dan/atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;
- f) sehat jasmani dan rohani;
- g) berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan
- h) bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia.³⁹

Untuk dapat diangkat menjadi hakim harus pegawai negeri yang berasal dari calon hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun. Sedangkan untuk dapat diangkat menjadi ketua atau wakil ketua Pengadilan Agama harus berpengalaman paling singkat 10 (sepuluh) tahun sebagai hakim Pengadilan Agama. Ketentuan pasal 14 diubah sehingga berbunyi, untuk dapat diangkat menjadi hakim Pengadilan Tinggi Agama, seorang hakim harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) warga negara Indonesia;
- b) beragama Islam;
- c) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d) setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e) sarjana syariah dan/atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;
- f) sehat jasmani dan rohani;
- g) berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan
- h) bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia termasuk organisasi massanya, atau bukan orang

³⁹*Ibid.*, pasal 13.

yang terlibat langsung dalam Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia;

- i) berumur paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
- j) pengalaman paling singkat 5 (lima) tahun sebagai ketua, wakil ketua, Pengadilan Agama, atau 15 (lima belas) tahun sebagai hakim Pengadilan Agama; dan
- k) lulus eksaminasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Seseorang dapat diangkat menjadi ketua Pengadilan Tinggi Agama harus berpengalaman paling singkat 5 (lima) tahun sebagai hakim Pengadilan Tinggi Agama atau 3 (tiga) tahun bagi hakim Pengadilan Tinggi Agama yang pernah menjabat ketua Pengadilan Agama. Kemudian untuk dapat diangkat menjadi wakil ketua Pengadilan Tinggi Agama harus berpengalaman paling singkat 4 (empat) tahun sebagai hakim Pengadilan Tinggi Agama atau 2 (dua) tahun bagi hakim Pengadilan Tinggi Agama yang pernah menjabat ketua Pengadilan Agama. Kemudian ketentuan pasal 15 diubah sehingga berbunyi hakim pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung. Ketua dan wakil ketua pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh ketua Mahkamah Agung.

Perubahan pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebelum memangku jabatannya, ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan wajib mengucapkan sumpah menurut agama Islam. Sumpah sebagaimana dimaksudkan adalah:

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban hakim dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa".⁴⁰

Pejabat sebagai wakil ketua dan hakim Pengadilan Agama mengucapkan sumpah di hadapan ketua Pengadilan Agama. Wakil

⁴⁰Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, pasal 16.

ketua dan hakim Pengadilan Tinggi Agama beserta ketua Pengadilan Agama mengucapkan sumpah di hadapan ketua Pengadilan Tinggi Agama. Ketua Pengadilan Tinggi Agama mengucapkan sumpah di hadapan Ketua Mahkamah Agung. Adapun pasal 17 berubah menjadi: ayat (1) kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, hakim tidak boleh merangkap menjadi:

- a) pelaksana putusan pengadilan;
- b) wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang diperiksa olehnya; atau
- c) pengusaha; dan hakim tidak boleh merangkap menjadi advokat.

Ketua dan wakil ketua serta hakim pengadilan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena hal berikut:

- a) permintaan sendiri;
- b) sakit jasmani atau rohani terus-menerus;
- c) telah berumur 62 (enam puluh dua) tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan agama, dan 65 (enam puluh lima) tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim Pengadilan Tinggi Agama; atau
- d) ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.

Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan yang meninggal dunia dengan sendirinya diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh presiden.

Pengertian tentang "sakit jasmani atau rohani terus-menerus" adalah sakit yang menyebabkan yang bersangkutan ternyata tidak mampu lagi melakukan tugas kewajibannya dengan baik. Adapun yang dimaksud dengan "tidak cakap" adalah misalnya yang bersangkutan banyak melakukan kesalahan besar dalam menjalankan tugasnya. Ketentuan pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Ketua, wakil ketua, dan hakim diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan salah satunya:

- a) dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan;
- b) melakukan perbuatan tercela;
- c) terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya;
- d) melanggar sumpah jabatan; atau
- e) melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17.

Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf e, huruf d, dan huruf e dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan majelis kehormatan hakim. Ketentuan mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja majelis kehormatan hakim, serta tata cara pembelaan diri diatur lebih lanjut oleh ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Istilah "tindak pidana kejahatan" adalah tindak pidana yang ancaman pidananya paling singkat 1 (satu) tahun. Sedangkan yang dimaksud dengan "melakukan perbuatan tercela" adalah apabila hakim yang bersangkutan karena sikap, perbuatan, dan tindakannya baik di dalam maupun di luar pengadilan merendahkan martabat hakim. Adapun yang dimaksud dengan "tugas pekerjaannya" adalah semua tugas yang dibebankan kepada yang bersangkutan. Dalam hal pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan dipidana karena melakukan tindakan pidana kejahatan, yang bersangkutan tidak diberi kesempatan untuk membela diri.

Pasal 20 undang-undang ini juga diubah sehingga berbunyi: seorang hakim yang diberhentikan dari jabatannya dengan sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri. Sedangkan pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh ketua Mahkamah Agung. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2). Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 6 (enam) bulan. Perubahan lain terjadi pada ketentuan pasal 25 sehingga berbunyi: Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan dapat ditangkap atau ditahan atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan ketua Mahkamah Agung, kecuali dalam hal:

- a) tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
- b) disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati; atau
- c) disangka telah melakukan kejahatan terhadap keamanan negara.

Pejabat untuk dapat diangkat menjadi panitera pengadilan agama, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) warga negara Indonesia;
- b) beragama Islam;
- c) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d) setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e) berijazah serendah-rendahnya sarjana syari'ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;
- f) berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai wakil panitera, 5 (lima) tahun sebagai panitera muda Pengadilan Agama, atau menjabat wakil panitera Pengadilan Tinggi Agama; dan
- g) sehat jasmani dan rohani.

Perubahan pasal 28 ini menjelaskan bahwa untuk dapat diangkat menjadi panitera Pengadilan Tinggi Agama, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:⁴¹

- a) syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf g;
- b) berijazah serendah-rendahnya sarjana syari'ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;
- c) berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai wakil panitera, 5 (lima) tahun sebagai panitera muda pengadilan tinggi agama, atau 3 (tiga) tahun sebagai panitera Pengadilan Agama.

Adapun wakil panitera Pengadilan Agama dapat diangkat dengan kriteria harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) warga negara Indonesia;
- b) beragama Islam;
- c) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d) setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

⁴¹Lihat Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, pada perubahan I pasal 28.

- e) berijazah serendah-rendahnya sarjana syari'ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;
- f) berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai wakil panitera, 5 (lima) tahun sebagai panitera muda pengadilan agama, atau menjabat wakil panitera Pengadilan Tinggi Agama;
- g) sehat jasmani dan rohani; dan
- h) berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai panitera muda atau 4 (empat) tahun sebagai panitera pengganti Pengadilan Agama.

Selanjutnya untuk dapat diangkat menjadi wakil panitera pengadilan tinggi agama, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) warga negara Indonesia;
- b) beragama Islam;
- c) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d) setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e) berijazah serendah-rendahnya sarjana syari'ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;
- f) berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai wakil panitera, 5 (lima) tahun sebagai panitera muda pengadilan agama, atau menjabat wakil panitera Pengadilan Tinggi Agama;
- g) sehat jasmani dan rohani;
- h) berijazah sarjana syari'ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam; dan
- i) berpengalaman paling singkat 2 (dua) tahun sebagai panitera muda Pengadilan Tinggi Agama, 5 (lima) tahun sebagai panitera muda Pengadilan Tinggi Agama, atau 3 (tiga) tahun sebagai wakil panitera Pengadilan Agama, atau menjabat sebagai panitera Pengadilan Agama.

Selanjutnya untuk dapat diangkat menjadi panitera muda Pengadilan Agama, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) warga negara Indonesia;
- b) beragama Islam;
- c) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- d) setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e) berijazah serendah-rendahnya sarjana syari'ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;
- f) berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai wakil panitera, 5 (lima) tahun sebagai panitera muda Pengadilan Agama, atau menjabat wakil panitera Pengadilan Tinggi Agama;
- g) sehat jasmani dan rohani; dan
- h) berpengalaman paling singkat 2 (dua) tahun sebagai panitera pengganti Pengadilan Agama.

Ketentuan syarat yang dipenuhi untuk diangkat menjadi panitera muda Pengadilan Tinggi Agama, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) warga negara Indonesia;
- b) beragama Islam;
- c) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d) setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e) berijazah serendah-rendahnya sarjana syari'ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;
- f) berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai wakil panitera, 5 (lima) tahun sebagai panitera muda Pengadilan Agama, atau menjabat wakil panitera Pengadilan Tinggi Agama;
- g) sehat jasmani dan rohani, dan
- h) berpengalaman paling singkat 2 (dua) tahun sebagai panitera pengganti Pengadilan Tinggi Agama, 3 (tiga) tahun sebagai panitera muda, 5 (lima) tahun sebagai panitera pengganti Pengadilan Agama, atau menjabat sebagai wakil panitera Pengadilan Agama.

Adapun ketentuan untuk dapat diangkat menjadi panitera pengganti Pengadilan Agama, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) warga negara Indonesia;
- b) beragama Islam;

- c) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d) setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e) berijazah serendah-rendahnya sarjana syari'ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;
- f) berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai wakil panitera, 5 (lima) tahun sebagai panitera muda Pengadilan Agama, atau menjabat wakil panitera Pengadilan Tinggi Agama;
- g) sehat jasmani dan rohani; dan
- h) berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai pegawai negeri pada Pengadilan Agama.

Menjadi panitera pengganti, harus mengikuti perubahannya yaitu dengan syarat sebagai berikut:

- a) warga negara Indonesia;
- b) beragama Islam;
- c) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d) setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e) berijazah serendah-rendahnya sarjana syari'ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;
- f) berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai wakil panitera, 5 (lima) tahun sebagai panitera muda Pengadilan Agama, atau menjabat wakil panitera Pengadilan Tinggi Agama;
- g) sehat jasmani dan rohani; dan
- h) berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai panitera pengganti Pengadilan Agama atau 8 (delapan) tahun sebagai pegawai negeri pada Pengadilan Tinggi Agama.⁴²

Adapun perubahan yang terjadi pada pasal 35 yaitu: (1) kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, panitera tidak boleh merangkap menjadi wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan perkara yang di dalamnya bertindak sebagai panitera; (2) panitera tidak boleh merangkap menjadi advokat; (3)

⁴²Lihat *ibid.*, pasal 34 perubahan I.

jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh panitera selain jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung. Ketentuan ini berlaku juga bagi wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti.

Panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan diangkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh Mahkamah Agung. Sebelum memegang jabatannya, panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti mengucapkan sumpah menurut agama Islam di hadapan ketua pengadilan yang bersangkutan. Sumpah sebagaimana dimaksudkan adalah:

"Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya untuk memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan atau cara apa pun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga."

"Saya bersumpah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian."

"Saya bersumpah bahwa saya, akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan segala undang-undang serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia."

"Saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama, dan dengan tidak membedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang panitera, wakil panitera, panitera muda, panitera pengganti, yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan."⁴³

Ketentuan untuk dapat diangkat menjadi jurusita, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) warga negara Indonesia;

⁴³*Ibid.*, pasal 38.

- b) beragama Islam;
- c) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d) setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e) berijazah paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
- f) berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai jurusita pengganti; dan
- g) sehat jasmani dan rohani.

Sedangkan untuk dapat diangkat menjadi jurusita pengganti, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) warga negara Indonesia;
- b) beragama Islam;
- c) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d) setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e) berijazah paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
- f) berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai jurusita pengganti;
- g) sehat jasmani dan rohani; dan
- h) berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai pegawai negeri pada Pengadilan Agama.

Jurusita pada Pengadilan Agama diangkat dan diberhentikan oleh ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan yang bersangkutan, sedangkan jurusita pengganti diangkat dan diberhentikan oleh ketua pengadilan yang bersangkutan. Sebelum memegang jabatannya, jurusita atau jurusita pengganti wajib mengucapkan sumpah menurut agama Islam di hadapan ketua pengadilan yang bersangkutan. Sumpah atau janji yang harus dibaca adalah:

"Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya, untuk memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apa pun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga".

"Saya bersumpah, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian".

"Saya bersumpah bahwa saya, akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan segala undang-undang serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia".

"Saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama, dan dengan tidak membedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang jurusita atau jurusita pengganti yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan".⁴⁴

Berdasarkan perundang-undangan, jurusita tidak boleh merangkap menjadi wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan perkara yang di dalamnya ada kaitannya dengan tugas yang dibebankannya. Jurusita tidak boleh merangkap menjadi advokat. Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh jurusita selain jabatannya, dan lebih lanjut diatur oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Adapun yang berkaitan dengan panitera, panitera pengadilan tidak boleh merangkap sekretaris pengadilan. Sedangkan untuk dapat diangkat menjadi sekretaris, wakil sekretaris Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tinggi Agama seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) warga negara Indonesia;
- b) beragama Islam;
- c) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d) setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e) berijazah paling rendah sarjana syari'ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;

⁴⁴*Ibid.*, pasal 41.

- f) berpengalaman di bidang administrasi peradilan; dan
- g) sehat jasmani dan rohani.

Mengenai sekretaris dan wakil sekretaris pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung. Sebelum memegang jabatannya, sekretaris, dan wakil sekretaris mengucapkan sumpah menurut agama Islam di hadapan ketua pengadilan yang bersangkutan. Sumpah yang dimaksudkan adalah:

"Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya, untuk diangkat menjadi sekretaris/wakil sekretaris akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara, dan pemerintah.

"Saya bersumpah bahwa saya, akan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab".

"Saya bersumpah bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, martabat sekretaris/wakil sekretaris serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan".

"Saya bersumpah bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau perintah harus saya rahasiakan".

"Saya bersumpah bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara".⁴⁵

d. Kekuasaan dan materi Peradilan Agama

Lembaga peradilan/pengadilan sebagai pelaksana dan pelaku kekuasaan kehakiman, tentu mempunyai tugas dan wewenang yang diberikan oleh negara. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a) perkawinan; b)

⁴⁵Pasal 48.

waris; c) wasiat; d) hibah; e) wakaf; f) zakat; g) infak; h) şadaqah; dan i) ekonomi syari'ah.⁴⁶

Penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syari'ah, melainkan juga di bidang ekonomi syari'ah lainnya. Yang dimaksud dengan "antara orang-orang yang beragama Islam" adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan ini.

Pemahaman tentang "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain:

- 1) izin beristri lebih dari seorang;
- 2) izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
- 3) dispensasi kawin;
- 4) pencegahan perkawinan;
- 5) penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- 6) pembatalan perkawinan;
- 7) gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
- 8) perceraian karena talak;
- 9) gugatan perceraian;
- 10) penyelesaian harta bersama;
- 11) penguasaan anak-anak;
- 12) ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi;
- 13) penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
- 14) putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
- 15) putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
- 16) pencabutan kekuasaan wali;

⁴⁶*Ibid.*, pasal 49.

- 17) penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
- 18) penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
- 19) pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
- 20) penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
- 21) putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
- 22) pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Pengertian tentang "waris" dalam undang-undang Peradilan Agama adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris. Selain penentuan-penentuan tersebut yang menjadi bagian dari pengertian waris adalah pemindahan hak dari pewaris ke ahli waris.

Mengenai istilah "wasiat" yang dimaksudkan adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia. Sedangkan yang dimaksud dengan "hibah" adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki. Pengertian tentang "wakaf" adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syaria'h.

Pengertian mengenai "zakat" adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Sedangkan yang dimaksud dengan "infak" adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas, dan karena Allah swt. Sedangkan yang dimaksud dengan "sadaqah" adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah swt dan pahala semata.

Materi hukum yang baru dalam peradilan adalah ekonomi syari'ah. Ekonomi syari'ah yang dimaksudkan adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, meliputi:

- a) bank syari'ah;
- b) lembaga keuangan mikro syari'ah;
- c) asuransi syari'ah;
- d) reasuransi syari'ah;
- e) reksa dana syari'ah;
- f) obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah;
- g) sekuritas syari'ah;
- h) pembiayaan syari'ah;
- i) pegadaian syari'ah;
- j) dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan
- k) bisnis syari'ah.⁴⁷

Materi baru dalam lembaga Peradilan Agama jelang penyatuan atap secara utuh, tentunya para birokrat dalam menyesuaikan antara Peradilan Agama dan kesebelas materi tersebut, memerlukan waktu yang lama dan kelengkapan lainnya, terutama para hakim yang menguasai kesebelas bidang tersebut di atas, termasuk para staf di Pengadilan Agama. Jika terjadi persengketaan tentang

⁴⁷Lihat *ibid*.

materi hukum tersebut di atas, tentunya diperlukan sarana dan prasarana yang memadai termasuk tenaga yang profesional dalam menangani sengketa hak milik atau perkara ekonomi syaria'ah. Kehadiran amandemen pertama undang-undang ini banyak pasal yang mengalami perubahan terhadap undang-undang sebelumnya, termasuk pasal 50 sehingga menjadi:

- (1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 tersebut, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum;
- (2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁴⁸

Penjelasan mengenai sengketa hak milik tersebut adalah memberi wewenang kepada Pengadilan Agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam. Hal ini menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa karena alasan adanya sengketa milik atau keperdataan lainnya tersebut sering dibuat oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya gugatan di Pengadilan Agama.

Sebaliknya apabila subjek yang mengajukan sengketa hak milik atau keperdataan lain tersebut bukan yang menjadi subjek bersengketa di Pengadilan Agama, sengketa di Pengadilan Agama ditunda untuk menunggu putusan gugatan yang diajukan ke

⁴⁸Pasal 50 amandemen pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

pengadilan di lingkungan Peradilan Umum. Penangguhan dimaksud hanya dilakukan jika pihak yang berkeberatan telah mengajukan bukti ke Pengadilan Agama bahwa telah didaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri terhadap objek sengketa yang sama dengan sengketa di Pengadilan Agama. Dalam hal objek sengketa lebih dari satu objek dan yang tidak terkait dengan objek sengketa yang diajukan keberatannya, Pengadilan Agama tidak perlu menangguhkan putusannya, terhadap objek sengketa yang tidak terkait dimaksud. Pengadilan Agama belum sepenuhnya menyelesaikan perkara bagi orang-orang Islam seperti penyelesaian sengketa hak milik, sebab terlebih dahulu harus diputuskan oleh Pengadilan Negeri kemudian Pengadilan Agama. Akan tetapi persoalan baru seperti penentuan awal bulan dan semacamnya diberikan kewenangan dalam kesaksian seseorang melihat hilal. Hilal yang dimaksudkan adalah hari pertama munculnya bulan pada bulan hijriah yang berjalan.

Pengadilan Agama mempunyai kewenangan memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah. Selama ini pengadilan agama diminta oleh Menteri Agama Republik Indonesia untuk memberikan penetapan (iṣbāt) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal bulan pada setiap memasuki bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal tahun Hijriyah dalam rangka Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan tanggal 1 (satu) Ramadhan dan tanggal 1 (satu) Syawal bulan berjalan. Pengadilan Agama dapat juga memberikan keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu salat. Dengan demikian kewenangan Lembaga Peradilan Agama semakin meluas dan bertambah materi hukumnya, bukan hanya persoalan perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, dan sedekah, juga telah diperluas sampai persoalan ekonomi umat yakni ekonomi syari'ah. Perkara-perkara ekonomi umat inilah yang mestinya diprioritaskan oleh para penentu kebijakan dalam meningkatkan kualitas ilmu para pelaku kekuasaan kehakiman. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ini telah mengatur berbagai perkara-perkara bagi umat Islam pencari keadilan, termasuk mengatur biaya perkara.

Biaya perkara dalam pengadilan adalah meliputi: biaya kepaniteraan dan biaya meterai yang diperlukan untuk perkara tersebut; biaya untuk para saksi, saksi ahli, penerjemah, dan biaya pengambilan sumpah yang diperlukan dalam perkara tersebut; biaya yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan setempat dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan pengadilan dalam perkara tersebut; dan biaya pemanggilan, pemberitahuan, dan lain-lain atas perintah pengadilan yang berkenaan dengan perkara tersebut. Adapun besarnya biaya perkara diatur oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Demikian halnya masalah administrasinya dan organisasinya serta staf sekretariat diatur dalam undang-undang ini, dan bertugas sebagaimana fungsinya masing-masing. Sekretaris pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi umum pengadilan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, tanggung jawab, susunan organisasi, dan tata kerja sekretariat diatur oleh Mahkamah Agung berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Ketika Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ini mulai berlaku, maka peraturan perundang-undangan pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ini. Perubahan yang mendasar mengenai materi perkaranya adalah terdapat pada pasal 49.

3. Yuridis Formal Pascapenyatuan Atap⁴⁹

Lembaga Peradilan Agama pascapenyatuan atap telah mengalami perubahan kedua undang-undang Peradilan Agama, sebagai landasan yuridis formal dalam pelaksanaan proses pengadilan pada lembaga Peradilan agama.

a. Dasar hukum lembaga Peradilan Agama pascapenyatuan atap

Konstitusi Negara Republik Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dalam pasal 24 ayat (1) menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pada pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut menentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Landasan yuridis formal ketiga lembaga Peradilan Agama adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (amandemen kedua) sebagai dasar hukum ketiga tentang Peradilan Agama. Dasar hukum pertama dan kedua adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan 17 tahun kemudian lahir undang-undang yang mengamandemennya. Undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

⁴⁹Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2009 oleh Presiden Republik Indonesia, Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono.

(amandemen pertama). Sedangkan amandemen kedua adalah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-undang amandemen kedua ini menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sehingga perlu diwujudkan adanya lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa dalam memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Kemudian untuk mengikuti perkembangan dan tuntutan reformasi, dipandang perlu menyesuaikan undang-undang tersebut. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis.

Perubahan undang-undang ini antara lain dilatarbelakangi dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 tanggal 23 Agustus 2006, yang dalam putusannya tersebut telah menyatakan pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan pasal-pasal yang menyangkut mengenai pengawasan hakim dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sebagai konsekuensi logis yuridis formal dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, telah dilakukan perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia, selain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial itu sendiri yang terhadap beberapa pasalnya telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Berdasarkan pertimbangan dan perkembangan zaman, perlu membentuk undang-undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga pasal 20, pasal 21, pasal 24, dan pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai sumber dasar hukum tertulis pada undang-undang tentang Peradilan Agama. Dasar hukum yang lain adalah:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611);
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Akhirnya atas berkat Allah swt., dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur maka atas persetujuan Dewan Perwakilan

Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia memutuskan dan menetapkan, Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tanggal 29 Oktober 2009.⁵⁰

Perlu pula diperhatikan dasar hukum lainnya adalah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611).

b. Pengertian peradilan dan pengadilan serta pejabat lainnya pada amandemen kedua berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Sedangkan pengadilan adalah Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama di lingkungan Peradilan Agama. Istilah peradilan dan pengadilan adalah memiliki makna dan pengertian yang berbeda, perbedaannya adalah: peradilan dalam istilah Inggris disebut *judiciary*, dan *rechtspraak* dalam bahasa Belanda yang maksudnya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara dalam menegakkan hukum dan keadilan. Istilah pengadilan dalam istilah Inggris disebut *court*, dan *rechtbank* dalam bahasa Belanda yang dimaksud adalah badan yang melakukan peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.

⁵⁰Lihat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal II. Undang-undang ini tercatat pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5078.

Kata pengadilan dan peradilan memiliki kata dasar yang sama yakni “adil” yang memiliki pengertian: proses mengadili, upaya untuk mencari keadilan, penyelesaian sengketa hukum di hadapan badan peradilan, dan berdasar hukum yang berlaku. Pejabat yang paling berperan dan menentukan keadilan dan kebenaran di hadapan pengadilan adalah hakim.

Adapun pengertian hakim yang dimaksudkan adalah hakim pada Pengadilan Agama dan hakim pada Pengadilan Tinggi Agama. Demikian hakim lainnya seperti hakim *ad hoc* adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama merupakan salah satu undang-undang yang mengatur lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, perlu pula dilakukan perubahan sebagai penyesuaian atau sinkronisasi terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah meletakkan dasar kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan agama, pengawasan tertinggi baik menyangkut teknis yudisial maupun non yudisial yaitu urusan organisasi, administrasi, dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sedangkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, pengawasan eksternal dilakukan oleh Komisi Yudisial. Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dimaksudkan untuk memperkuat prinsip dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu agar prinsip kemandirian peradilan dan prinsip

kebebasan hakim dapat berjalan paralel dengan prinsip integritas dan akuntabilitas hakim.

Keputusan tentang perubahan penting lainnya atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama antara lain sebagai berikut:

- 1) Penguatan pengawasan hakim, baik pengawasan internal oleh Mahkamah Agung maupun pengawasan eksternal atas perilaku hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim;
- 2) Memperketat persyaratan pengangkatan hakim, baik hakim pada pengadilan agama maupun hakim pada pengadilan tinggi agama, antara lain melalui proses seleksi hakim yang dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif serta harus melalui proses atau lulus pendidikan hakim;
- 3) Pengaturan mengenai pengadilan khusus dan hakim *ad hoc*;
- 4) Pengaturan mekanisme dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian hakim;
- 5) Keamanan dan kesejahteraan hakim;
- 6) Transparansi putusan dan limitasi pemberian salinan putusan;
- 7) Transparansi biaya perkara serta pemeriksaan pengelolaan dan pertanggung jawaban biaya perkara;
- 8) Bantuan hukum; dan
- 9) Majelis kehormatan hakim dan kewajiban hakim untuk menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Bila diperhatikan secara saksama, maka perubahan secara umum atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama adalah pada dasarnya untuk mewujudkan dan menyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa, yang dilakukan melalui penataan sistem peradilan yang terpadu (*integrated justice system*), terlebih Peradilan Agama secara konstitusional merupakan badan peradilan di bawah

Mahkamah Agung Republik Indonesia yang sama kedudukannya dengan badan peradilan lainnya. Demikian pula sistem dan penataan organisasinya telah disamakan, termasuk pejabat-pejabatnya dalam lingkungan Mahkamah Agung RI. Namun dalam struktur pejabat yang merupakan awal prosesi lahirnya kasus di Pengadilan Agama adalah tidak terlepas dari badan-badan atau instansi lain seperti Kementerian Agama RI yang di bawahnya terdapat pejabat pelaksana seperti Kepala KUA tingkat kecamatan.

Pejabat pelaksana lainnya tersebut, seperti PPN (Pegawai Pencatat Nikah) adalah Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang merupakan pelaksana dalam proses awal mengenai perkawinan dan semacamnya. Demikian halnya pejabat yang lain seperti juru sita dan/atau juru sita pengganti adalah juru sita dan/atau juru sita pengganti pada Pengadilan Agama. Kesemuanya merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan begitu saja. Karenanya diperlukan aparatur negara yang sangat perofesional pada bidangnya masing-masing.

Adapun pelaku dan pelaksana kekuasaan kehakiman lainnya seperti Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial merupakan bagian dari Lembaga Peradilan Agama. Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Demikian pula yang dimaksud dengan Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, keduanya puncak dari Lembaga Peradilan Agama sebagai Pengadilan Tingkat Tinggi setelah tingkat banding khususnya Mahkamah Agung (tingkat kasasi).

Salah satu inti dari analisis materi pengembangan perkara tertentu adalah dengan melahirkan Pengadilan Khusus. Karena itu, Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang. Pengadilan Khusus ini seyogyanya berada di setiap wilayah yang mempunyai Pengadilan Tinggi Agama sebagai wilayah absolutnya. Bahkan di setiap daerah yang berkedudukan Pengadilan

Agama, paling tidak pada daerah yang mempunyai Pengadilan Agama Kelas IA. Menurut ketentuan pasal 3A undang-undang ini (hasil perubahan/amandemen kedua) menegaskan sebagai berikut:

- (1) di lingkungan Peradilan Agama dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang;
- (2) Peradilan Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan Peradilan Agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan Peradilan Umum;
- (3) pada Pengadilan Khusus dapat diangkat hakim *ad hoc* untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, yang membutuhkan keahlian dan pengalaman dalam bidang tertentu dan dalam jangka waktu tertentu;
- (4) ketentuan mengenai syarat, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian serta tunjangan hakim *ad hoc* diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁵¹

Sebagi penegasan dalam undang-undang ini dikenal istilah diadakan pengkhususan pengadilan, yang diatur dengan undang-undang, hakim *ad hoc*, dan jangka waktu tertentu. Kalimat yang dimaksud dengan "diadakan pengkhususan pengadilan" adalah adanya diferensiasi/spesialisasi di lingkungan Peradilan Agama yang dapat dibentuk Pengadilan Khusus, misalnya Pengadilan Arbitrase Syari'ah. Sedangkan yang dimaksud dengan "yang diatur dengan undang-undang" adalah susunan, kekuasaan, dan hukum acaranya. Kesemuanya diperlukan suatu analisis komprehensif serta memerlukan tenaga-tenaga ahli yang profesional dalam bidang ekonomi syari'ah dan ahli dalam bidang perkara-perkara pidana khusus. Pidana khusus yang dimaksudkan adalah munculnya tindak pidana akibat dari perkara tertentu yang muncul dari suatu keluarga muslim.

⁵¹Lihat, *Ibid.*, pasal 3A.

Adapun tujuan diangkatnya “hakim ad hoc” tersebut adalah untuk membantu penyelesaian perkara yang membutuhkan keahlian khusus, misalnya kejahatan perbankan syari’ah, dan yang dimaksud dalam “jangka waktu tertentu” adalah bersifat sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hakim inilah yang membantu dalam proses perkara secara cepat untuk menyelesaikan kasus yang sifatnya diperlukan oleh hakim yang lebih berwewenang dan profesional. Panitera dan/atau bagian administrasi lainnya turut mendukung dalam proses perkara tersebut.

c. Pengawasan pada lembaga Peradilan Agama

Perubahan kedua dalam undang-undang peradilan ini, diperlukan lembaga pengawasan demi terciptanya peradilan yang bersih dan berwibawa. Di antara pasal 12 dan pasal 13 disisipkan 6 (enam) pasal, yakni pasal 12A, pasal 12B, pasal 12C, pasal 12D, pasal 12E, dan pasal 12F.

Pasal 12A meliputi:

- (1) Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung;
- (2) selain pengawasan internal yang menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, juga pengawasan eksternal atas perilaku hakim dilakukan oleh Komisi Yudisial. Pengawasan internal atas tingkah laku hakim masih diperlukan meskipun sudah ada pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Hal ini dimaksudkan agar pengawasan lebih komprehensif sehingga diharapkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim betul-betul dapat terjaga dari intervensi.

Pasal 12B meliputi:

- (1) hakim harus memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, jujur, adil, profesional, bertakwa, dan berakhlak mulia, serta berpengalaman di bidang hukum;
- (2) hakim wajib menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Pasal 12C meliputi:

- (1) dalam melakukan pengawasan hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 (pembinaan dan pengawasan umum terhadap hakim dilakukan oleh ketua Mahkamah Agung, tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara), Komisi Yudisial melakukan koordinasi dengan Mahkamah Agung;
- (2) dalam hal terdapat perbedaan antara hasil pengawasan internal yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan hasil pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Komisi Yudisial, pemeriksaan dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Koordinasi dengan Mahkamah Agung dalam ketentuan ini meliputi pula koordinasi dengan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung.

Pasal 12D meliputi:

- (1) dalam melaksanakan pengawasan eksternal, Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
- (2) dalam melaksanakan pengawasan, Komisi Yudisial berwenang:
 - (a) menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan/atau informasi tentang dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim;
 - (b) memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran atas kode etik dan pedoman perilaku hakim;
 - (c) dapat menghadiri persidangan di pengadilan;
 - (d) menerima dan menindaklanjuti pengaduan Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawah Mahkamah Agung atas dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim;
 - (e) melakukan verifikasi terhadap pengaduan masyarakat dan/atau informasi tentang dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim dan menindaklanjuti pengaduan Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawah Mahkamah Agung atas dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim;
 - (f) meminta keterangan atau data kepada Mahkamah Agung dan/atau pengadilan;
 - (g) melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim untuk kepentingan pemeriksaan; dan/atau
 - (h) menetapkan keputusan berdasarkan

hasil pemeriksaan atas dugaan pelanggaran atas kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Pasal 12E meliputi:

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12A di atas, Komisi Yudisial dan/atau Mahkamah Agung wajib: (a) menaati norma dan peraturan perundang-undangan; (b) menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim; dan (c) menjaga kerahasiaan keterangan atau informasi yang diperoleh;
- (2) kode etik dan pedoman perilaku hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini ditetapkan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung;
- (3) pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara;
- (4) ketentuan mengenai pengawasan eksternal dan pengawasan internal hakim diatur dalam undang-undang. Kode etik dan pedoman perilaku hakim memuat kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi oleh hakim dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Sikap perilaku inilah yang merupakan penilaian seseorang pejabat itu dinilai bersih atau penuh dengan ketidakadilan dan kebenaran terutama para hakim dalam memutuskan dan menetapkan suatu putusan.

Pasal 12F meliputi:

dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim. Mutasi hakim yang dimaksudkan adalah termasuk promosi dan demosi hakim.⁵²

⁵²Lihat, Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 12 F. Demosi hakim yang dimaksudkan adalah pemindahan suatu jabatan hakim ke jabatan yang lebih rendah. Sedangkan promosi hakim adalah mutasi jabatan ke jabatan yang lebih tinggi. Adapun tingkatan-tingkatan

Seseorang diangkat untuk menjadi hakim harus memenuhi syarat-syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk dapat diangkat sebagai hakim Pengadilan Agama, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) warga negara Indonesia;
- b) beragama Islam;
- c) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d) setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e) sarjana syaria'ah, sarjana hukum Islam atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;
- f) lulus pendidikan hakim;
- g) mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;
- h) berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- i) berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun; dan
- j) tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁵³

Khusus poin huruf (f) tentang lulusan pendidikan hakim, diselenggarakan bersama oleh Mahkamah Agung dan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) atau swasta yang terakreditasi A dalam jangka waktu yang ditentukan dan melalui proses seleksi yang ketat. Sedangkan untuk dapat diangkat menjadi ketua atau wakil ketua Pengadilan Agama, hakim harus berpengalaman paling singkat 7 (tujuh) tahun sebagai hakim Pengadilan Agama.⁵⁴ Pengangkatan hakim pada Pengadilan Agama dilakukan melalui proses seleksi yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Proses seleksi pengangkatan

jabatan fungsional hakim adalah: untuk III/a disebut hakim pratama; III/b hakim pratama muda; III/c hakim pratama madya; III/d hakim pratama utama; IV/a hakim madya pratama; IV/b hakim madya muda; IV/c hakim madya utama; IV/d hakim utama muda; IV/e hakim utama.

⁵³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal,13.

⁵⁴*Ibid.*, pasal 13, ayat (2).

hakim Pengadilan Agama dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

Pengangkatan sebagai hakim *ad hoc*, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) warga negara Indonesia;
- b) beragama Islam;
- c) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d) setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e) lulus pendidikan hakim;
- f) mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;
- g) berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- h) berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun; dan
- i) tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁵⁵

Adapun untuk dapat diangkat menjadi hakim Pengadilan Tinggi Agama, seorang hakim harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) warga negara Indonesia;
- b) beragama Islam;
- c) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d) setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e) mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;
- f) tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- g) berumur paling rendah 40 (empat puluh) tahun;

⁵⁵Lihat, *ibid*. Teliti dengan cermat, pasal 13B

- h) berpengalaman paling singkat 5 (lima) tahun sebagai ketua, wakil ketua, pengadilan agama, atau 15 (lima belas) tahun sebagai hakim Pengadilan Agama;
- i) lulus eksaminasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung; dan
- j) tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim.⁵⁶

Kemudian untuk dapat diangkat menjadi ketua Pengadilan Tinggi Agama harus berpengalaman paling singkat 5 (lima) tahun sebagai hakim Pengadilan Tinggi Agama, atau 3 (tiga) tahun bagi hakim Pengadilan Tinggi Agama yang pernah menjabat ketua Pengadilan Agama. Sedangkan untuk dapat diangkat menjadi wakil ketua Pengadilan Tinggi Agama harus berpengalaman paling singkat 4 (empat) tahun sebagai hakim Pengadilan Tinggi Agama atau 2 (dua) tahun bagi hakim Pengadilan Tinggi Agama yang pernah menjabat ketua Pengadilan Agama.

Hakim pengadilan diangkat oleh presiden atas usul ketua Mahkamah Agung, dan hakim pengadilan diberhentikan oleh presiden atas usul ketua Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial melalui ketua Mahkamah Agung. Adapun usul pemberhentian hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial hanya dapat dilakukan apabila hakim yang bersangkutan melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Pengangkatan dan pemberhentian ketua dan wakil ketua pengadilan adalah kewenangan ketua Mahkamah Agung. Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:

- a) atas permintaan sendiri secara tertulis;
- b) sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus;
- c) telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim Pengadilan Agama, dan 67 (enam puluh tujuh) tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim Pengadilan Tinggi Agama; atau
- d) ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.⁵⁷

⁵⁶*Ibid.*, pasal 14.

⁵⁷Lihat pasal 18 amandemen kedua.

Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan yang meninggal dunia dengan sendirinya diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh presiden. Oleh karena itu ketentuan pasal 19 diubah sehingga berbunyi: Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan:

- a) dipidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b) melakukan perbuatan tercela;
- c) melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya terus-menerus selama 3 (tiga) bulan;
- d) melanggar sumpah atau janji jabatan;
- e) melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17;⁵⁸ dan/atau
- f) melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas diajukan oleh ketua Mahkamah Agung kepada Presiden. Usul pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada huruf (b) diajukan oleh Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial. Usul pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada huruf (c), huruf (d), dan huruf (e) diajukan oleh Mahkamah Agung. Usul pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada huruf (f) diajukan oleh Komisi Yudisial.

Sebelum Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial mengajukan usul pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksudkan di atas, hakim pengadilan mempunyai hak untuk membela diri di hadapan majelis kehormatan hakim. Majelis kehormatan hakim sebagaimana dimaksudkan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Republik

⁵⁸Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, hakim tidak boleh merangkap menjadi: a. pelaksana putusan pengadilan; b. wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang diperiksa olehnya; atau c. pengusaha. (2) Hakim tidak boleh merangkap menjadi advokat. (3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh hakim selain jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.⁵⁹

Menyangkut hal ketua atau wakil ketua pengadilan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena atas permintaan sendiri secara tertulis atas dasar: permintaan sendiri secara tertulis; sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus; telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim Pengadilan Agama, dan 67 (enam puluh tujuh) tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim Pengadilan Tinggi Agama; atau ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya, tetapi tidak dengan sendirinya diberhentikan sebagai hakim.

Perihal pemberhentian dengan tidak hormat, ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan sebelum diberhentikan tidak dengan hormat dengan alasan:

- a) melakukan perbuatan tercela;
- b) melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya terus-menerus selama 3 (tiga) bulan;
- c) melanggar sumpah atau janji jabatan;
- d) melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17;⁶⁰ dan/atau
- e) melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Apabila pelanggaran tersebut terbukti, ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Ketua Mahkamah Agung.

Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksudkan dapat diusulkan oleh Komisi Yudisial. Mengenai pemberhentian sementara, berlaku juga ketentuan bila yang bersangkutan dipidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah

⁵⁹Lihat penjelasan pasal 19 ayat (7) amandemen kedua.

⁶⁰Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, hakim tidak boleh merangkap menjadi: a. pelaksana putusan pengadilan; b. wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang diperiksa olehnya; atau c. pengusaha. (2) Hakim tidak boleh merangkap menjadi advokat. (3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh hakim selain jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya diajukan oleh ketua Mahkamah Agung kepada Presiden Republik Indonesia. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksudkan di atas berlaku paling lama 6 (enam) bulan. Pemberhentian sementara dalam ketentuan ini, selain yang dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, adalah hukuman jabatan yang dikenakan kepada seorang hakim untuk tidak memeriksa dan mengadili perkara dalam jangka waktu tertentu (hakim non palu).

Demikian halnya tentang kedudukan protokol hakim diatur sedemikian rupa dengan sebaik-bainya. Menyangkut kedudukan protokol hakim pengadilan diatur pula dengan peraturan perundang-undangan. Selain mempunyai kedudukan protokoler, hakim pengadilan berhak memperoleh gaji pokok, tunjangan, biaya dinas, pensiun dan hak-hak lainnya. Tunjangan yang dimaksudkan berupa tunjangan jabatan dan tunjangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan hak-hak lainnya berupa rumah jabatan milik negara, jaminan kesehatan, dan sarana transportasi milik negara. Yang dimaksud dengan sarana transportasi adalah kendaraan bermotor roda empat beserta pengemudinya atau sarana lain yang memungkinkan seorang hakim menjalankan tugas-tugasnya. Adapun yang dimaksud dengan jaminan keamanan dalam melaksanakan tugasnya adalah hakim diberikan penjagaan keamanan dalam menghadiri dan memimpin persidangan. Hakim harus diberikan perlindungan keamanan oleh aparat terkait yakni aparat kepolisian agar hakim mampu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara secara baik dan benar tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pihak manapun.

Sebagai pejabat negara yang bernama hakim pengadilan diberi jaminan keamanan dalam melaksanakan tugasnya. Sedangkan ketentuan lebih lanjut mengenai gaji pokok, tunjangan, dan hak-hak lainnya beserta jaminan keamanan bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fasilitas yang diberikan kepada para hakim sangat luar biasa, sehingga wajar bila hakim yang melanggar sumpah dan melanggar kode etik diberikan hukuman yang setimpal dan seberat-beratnya atas

pelanggarannya. Demikian halnya mengenai pejabat lainnya seperti panitera mestinya diberikan fasilitas dan perlindungan yang sama dengan hakim kendatipun syarat dalam pengangkatannya berbeda.

Untuk dapat diangkat menjadi panitera Pengadilan Agama, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) warga negara Indonesia;
- b) beragama Islam;
- c) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d) setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e) berijazah sarjana syari'ah, sarjana hukum Islam, atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;
- f) berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai wakil panitera, 5 (lima) tahun sebagai panitera muda Pengadilan Agama, atau menjabat wakil panitera Pengadilan Tinggi Agama; dan
- g) mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban.⁶¹

Adapun pengangkatan untuk menjadi wakil panitera Pengadilan Tinggi Agama, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) warga negara Indonesia;
- b) beragama Islam;
- c) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d) setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e) berijazah sarjana syari'ah, sarjana hukum Islam, atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;
- f) mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban; dan
- g) berpengalaman paling singkat 2 (dua) tahun sebagai panitera muda Pengadilan Tinggi Agama, 5 (lima) tahun sebagai panitera muda Pengadilan Tinggi Agama, atau 3 (tiga) tahun

⁶¹Lihat, *Ibid*, pasal 27, amandemen kedua.

sebagai wakil panitera Pengadilan Agama, atau menjabat sebagai panitera Pengadilan Agama.⁶²

Pejabat yang bernama panitera tidak boleh merangkap menjadi wali, pengampu, advokat, dan/atau pejabat peradilan yang lain. Yang dimaksud dengan pejabat peradilan yang lain adalah sekretaris, wakil sekretaris, wakil panitera, panitera muda, panitera pengganti, juru sita, juru sita pengganti, dan pejabat struktural lainnya. Panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan diberhentikan dengan hormat dengan alasan:

- a) meninggal dunia;
- b) atas permintaan sendiri secara tertulis;
- c) sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus;
- d) telah berumur 60 (enam puluh) tahun bagi panitera; wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti Pengadilan Agama;
- e) telah berumur 62 (enam puluh dua) tahun bagi panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti Pengadilan Tinggi Agama; dan/atau
- f) ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.

Panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan diberhentikan tidak dengan hormat dengan alasan:

- a) dipidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b) melakukan perbuatan tercela;
- c) melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya terus menerus selama 3 (tiga) bulan;
- d) melanggar sumpah atau janji jabatan;
- e) melanggar larangan (tidak boleh merangkap menjadi wali, pengampu, advokat, dan/atau pejabat peradilan yang lain); dan/atau
- f) melanggar kode etik panitera.

⁶²Pasal 30.

Menyangkut juru sita juga diatur sedemikian rupa, termasuk pengangkatan dan pemberhentian. Sehingga untuk dapat diangkat menjadi juru sita, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) warga negara Indonesia;
- b) beragama Islam;
- c) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d) setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e) berijazah pendidikan menengah;
- f) berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai juru sita pengganti; dan
- g) mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban.

Pendidikan menengah yang dimaksudkan pada huruf (e) di atas adalah Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.⁶³

Adapun untuk dapat diangkat menjadi juru sita pengganti, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) warga negara Indonesia;
- b) beragama Islam;
- c) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d) setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e) berijazah pendidikan menengah;
- f) mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban; dan
- g) berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai pegawai negeri pada Pengadilan Agama.

Mengenai sekretaris dan wakil sekretaris pada Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

⁶³Lihat, penjelasan pasal 39 amandemen kedua.

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (amandemen kedua). Untuk dapat diangkat menjadi sekretaris dan wakil sekretaris pada Pengadilan Agama, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) warga negara Indonesia;
- b) beragama Islam;
- c) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d) setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e) berijazah sarjana syari'ah, sarjana hukum Islam, sarjana hukum yang menguasai hukum Islam, atau sarjana administrasi;
- f) berpengalaman paling singkat 2 (dua) tahun di bidang administrasi peradilan; dan
- g) mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban.

Untuk dapat diangkat menjadi sekretaris dan wakil sekretaris pada Pengadilan Tinggi Agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) warga negara Indonesia;
- b) beragama Islam;
- c) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d) setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e) berijazah sarjana syari'ah, sarjana hukum Islam, sarjana hukum yang menguasai hukum Islam, atau sarjana administrasi;
- f) mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;
- g) berpengalaman paling singkat 4 (empat) tahun di bidang administrasi peradilan.⁶⁴

Sehubungan dengan kriteria yang bertalian dengan semua kegiatan pada pengadilan termasuk yang mengawasi secara kelembagaan, telah diberikan kewenangan dan tugas masing-masing, termasuk tugas seorang ketua dalam pengawasannya. Ketua pengadilan melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas hakim.

⁶⁴Lihat, pasal 46 amandemen kedua.

Demikian halnya ketua pengadilan selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksudkan juga mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan perilaku panitera, sekretaris, dan juru sita di daerah hukumnya. Selain tugas melakukan pengawasan tersebut di atas, ketua Pengadilan Tinggi Agama di daerah hukumnya melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Agama dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya, serta bersih dari segala kemudratan.

Dalam melakukan pengawasan, ketua pengadilan dapat memberikan petunjuk, teguran, dan peringatan, yang dipandang perlu. Pengawasan sebagaimana yang dimaksudkan, tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Kedisiplinan dalam menjalankan tugas harus selalu diindahkannya. Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim harus bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. Penetapan dan putusan tersebut harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Pada setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Pihak yang tidak mampu sebagaimana dimaksud harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan tempat domisili yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan kelurahan dalam undang-undang tersebut adalah termasuk desa, *banjar*, *nagari*, dan *gampong*.⁶⁵

Setiap Pengadilan Agama dibentuk pos bantuan hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud diberikan secara cuma-cuma kepada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap. Bantuan hukum dan pos bantuan hukum tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bantuan hukum yang diberikan secara cuma-cuma termasuk biaya eksekusi.

⁶⁵Banjar yang dimaksudkan adalah bagian desa setingkat dengan Rukun Warga (RW); nagari ialah wilayah atau sekumpulan kampung yang dipimpin atau dikepalai oleh seorang penghulu; gampong ialah sejenis kampung.

Instansi pemerintah termasuk lembaga Peradilan Agama wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan. Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan. Apabila pengadilan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksudkan, ketua pengadilan dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal salinan putusan tidak disampaikan, ketua pengadilan yang bersangkutan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dari ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan ialah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.⁶⁶

Dalam menjalankan tugas peradilan, Peradilan Agama dapat menarik biaya perkara. Penarikan biaya perkara sebagaimana dimaksud, wajib disertai dengan tanda bukti pembayaran yang sah. Biaya perkara tersebut meliputi biaya kepaniteraan dan biaya proses penyelesaian perkara. Biaya kepaniteraan merupakan penerimaan negara bukan pajak, yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Biaya kepaniteraan yang masuk penerimaan negara bukan pajak adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pajak.⁶⁷

Biaya proses penyelesaian perkara dibebankan pada pihak atau para pihak yang berperkara yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Adapun sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban atas penarikan biaya perkara, diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menyangkut penarikan biaya perkara, setiap pejabat peradilan dilarang menarik biaya selain biaya perkara. Pelanggaran terhadap

⁶⁶Lihat Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*.

⁶⁷Lihat Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pajak*.

ketentuan ini akan dikenai sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Karena itu setiap pejabat negara dalam lingkungan peradilan harus hati-hati dalam mengambil keputusan, karena akan berdampak fatal jika menyalahi kode etik peradilan. Demikian pula pejabat pada instansi lainnya baik instansi pemerintah maupun instansi swasta, harus bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengembangan materi perkara tertentu pada lembaga Peradilan Agama semakin terbuka dengan hadirnya perubahan kedua undang-undang Peradilan Agama tersebut, karena telah memasuki dunia bisnis, khususnya bisnis syari'ah dalam berbagai aspek. Perangatnyalah yang menjadikan lembaga Peradilan Agama sebagai sebuah tempat yang layak untuk mencari keadilan dan kebenaran terhadap perkara-perkara tertentu sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya.

Rekonstruksi materi perkara pada lembaga Peradilan Agama adalah pertama dari istilah perkara perdata tertentu, yang materinya meliputi: pertama perkawinan; kedua kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; ketiga wakaf dan sedekah. Materi perkara perdata tertentu ini merupakan produk hukum dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ini merupakan produk pertama landasan yuridis formal tentang Peradilan Agama, yang kemudian direkonstruksi menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Istilah perkara perdata tertentu direkonstruksi menjadi perkara tertentu (perdata dihapus), yang materi hukumnya meliputi: perkawinan; waris; wasiat; hibah; wakaf; zakat; infak; sedekah; dan ekonomi syari'ah. Penjelasan tentang ekonomi syari'ah sebagai pengembangan materi dari undang-undang perubahan kedua ini adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, meliputi:

- a) bank syari'ah;
- b) lembaga keuangan mikro syari'ah;

- c) asuransi syari'ah;
- d) reasuransi syari'ah;
- e) reksa dana syari'ah;
- f) obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah;
- g) sekuritas syari'ah;
- h) pembiayaan syari'ah;
- i) pegadaian syari'ah;
- j) dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan
- k) bisnis syari'ah.

Kalau dilihat dari pengembangan materi perkara tersebut membuka peluang terjadinya sengketa yang akan menimbulkan akibat hukum pada perkara tertentu lain, termasuk tindak pidana. Oleh karena itu undang-undang tersebut dikuatkan lagi dengan hadirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Namun demikian, undang-undang amandemen kedua tersebut belum lengkap karena tidak memuat materi baru mengenai perkara tertentu. Mestinya undang-undang tersebut dilengkapi dengan lembaga Peradilan Khusus untuk menangani akibat sengketa yang ditimbulkan oleh perkara tertentu. Akibat hukum yang dapat ditimbulkan adalah adanya tindak pidana kriminal seperti akibat perceraian, sengketa kewarisan, sengketa perwakafan, sengketa ekonomi syari'ah, dan termasuk terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KdRT).

Demikian pula perkara-perkara tentang kasus terorisme yang menurut teroris ingin menegakan dan menjalankan syari'at Islam dengan memilih jalan pintas karena kurang pemahaman agama Islam secara kontekstual. Selain perkara-perkara tersebut, juga persoalan penentuan awal bulan Kamariah terutama penetapan awal bulan Ramadan dan lebaran. Penanganan kasus-kasus tersebut merupakan kewenangan lembaga Peradilan Agama. Oleh karena itu Peradilan Khusus pada lembaga Peradilan Agama dibentuk oleh pemerintah (eksekutif), legislatif, dan yudikatif serta undang-undang yang bertalian dengan kasus-kasus pidana khusus tersebut.

Apabila terjadi sengketa-sengketa seperti yang disebutkan di atas, proses penyelesaian kasus tindak pidana khusus, paling akurat jika Pengadilan Khusus yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan tindak pidananya. Karena substansi perkaranya adalah pada lembaga Peradilan Agama sebagai kompetensi absolutnya.

Demikian pula dalam pengembangan lembaga Peradilan Agama, selain materinya perkara tertentu yang dikembangkan juga seharusnya hukum acaranya diamandemen atau diubah dan direkonstruksi menjadi hukum acara tertentu. Hal ini menjadikan keseimbangan dalam beracara di lembaga Peradilan Agama di Indonesia. Oleh karena itu, seharusnya produk perundang-undangan jaman dahulu seperti *Burgerlijk Wetboek (BW)* yang diterjemahkan dengan “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)” yang merupakan produk hukum Belanda, diamandemen atau direkonstruksi. Kalau perlu KUHPerdata tersebut diubah atau diganti dengan KUHPerdata Indonesia sebagai produk hukum bangsa Indonesia, khususnya produk hukum umat Islam Indonesia yang bersifat *rahmat li al-‘ālamīn*.



BAB VI

PENUTUP

Fikih Peradilan Agama di Indonesia sebagai sebuah pengembangan dan rekonstruksi pada materi perkara tertentu dapat memberikan nuansa dalam dunia akademik dan praktisi di pengadilan, khususnya pada lembaga Peradilan Agama di Indonesia. Oleh karena itu dapat disimpulkan dan implikasinya berikut ini.

A. Kesimpulan

Uraian tentang rekonstruksi lembaga Peradilan Agama di Indonesia dalam pengembangan materi perkara tertentu dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Hukum Islam di Indonesia merupakan istilah yang dikembangkan dan dibakukan di Indonesia. Hukum Islam di Indonesia yang dimaksudkan adalah segala peraturan yang diambil dari wahyu dan diformulasikan ke dalam empat produk pemikiran hukum yaitu: fikih, fatwa ulama, keputusan pengadilan, dan perundang-undangan, serta sebuah teori sosiologi hukum yang dipedomani dan diberlakukan bagi umat Islam di Indonesia.
2. Eksistensi lembaga Peradilan Agama di Indonesia semakin kuat dengan penyatuan atap pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.
3. Perspektif dan prospektif rekonstruksi lembaga Peradilan Agama dalam pengembangan materi perkara tertentu adalah pertama dari istilah perkara perdata tertentu menjadi perkara tertentu. Materinya meliputi: perkawinan; kewarisan, wasiat, dan hibah; wakaf dan sedekah, dan materinya direkonstruksi menjadi: perkawinan; waris; wasiat; hibah; wakaf; zakat; infak; sedekah; dan ekonomi syari'ah yang meliputi: bank syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, reksa dana syari'ah, obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, pegadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah, dan bisnis syari'ah.
4. Pengembangan materi perkara tertentu pada lembaga Peradilan Agama di Indonesia adalah dengan adanya lembaga Peradilan

Khusus untuk menangani akibat sengketa yang ditimbulkan oleh perkara tertentu, seperti akibat perceraian, sengketa kewarisan, sengketa perwakafan, sengketa ekonomi syari'ah, dan termasuk terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KdRT). Demikian pula perkara-perkara tentang kasus terorisme yang menurut teroris ingin menegakan dan menjalankan syari'at Islam dengan memilih jalan pintas karena kurang pemahaman agama Islam secara kontekstual. Selain perkara-perkara tersebut, juga persoalan penentuan awal bulan Kamariah (*Qamariyah*) terutama penetapan awal bulan Ramadan dan lebaran diptuskan oleh Pengadilan Agama. Apabila terjadi sengketa-sengketa seperti yang disebutkan di atas, proses penyelesaian kasus tindak pidana khusus, paling akurat jika Peradilan Khusus yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan tindak pidananya. Karena substansi perkaranya adalah pada lembaga Peradilan Agama sebagai kompetensi absolutnya. Demikian pula dalam pengembangan lembaga Peradilan Agama, selain materinya perkara tertentu yang dikembangkan juga adalah hukum acaranya diamandemen atau diubah dan direkonstruksi menjadi hukum acara tertentu. Hal ini menjadikan keseimbangan dalam beracara di lembaga Peradilan Agama di Indonesia.

B. Implikasi

Sebagai bahan renungan pada buku ini, penulis menengahkan implikasi sebagai berikut:

1. Diharapkan dalam kajian buku ini menghasilkan nuansa baru sekaligus melahirkan karya tulis ilmiah dalam pengembangan rekonstruksi lembaga Peradilan Agama di Indonesia. Tentunya sebagai penulis menyadari akan keterbatasan, sehingga diharapkan kepada para pembaca untuk memberikan sumbangsihnya dalam penyempurnaan lebih lanjut, terutama menyangkut pengembangan materi perkara tertentu pada lembaga Peradilan Agama di Indonesia.
2. Diharapkan kiranya lembaga Peradilan Agama menjembatani untuk melahirkan lembaga Peradilan Khusus mengenai akibat hukum (tindak pidana khusus) yang ditimbulkan oleh perselisihan

dari sengketa perkara tertentu sebagai materi hukum Islam di Indonesia.

3. Kemudian sebagai bahan renungan atau buah pikiran, diharapkan pengembangan materi perkara tertentu pada lembaga Peradilan Agama di Indonesia ke depan lebih luas termasuk yang menyangkut hukum pidana Islam (pidana khusus) yang digodok di lembaga legislatif, mengasikkan undang-undang baru, sehingga menjadi sebuah produk hukum Islam yang baru di Indonesia.
4. Diharapkan kepada institusi birokrasi dan akademisi kiranya menyiapkan tenaga yang andal dalam menangani masalah perkara tertentu pada lembaga Peradilan Agama di Indonesia. Oleh karena itu, seharusnya produk perundang-undangan jaman dahulu seperti: H.I.R. (*Herziene Indonesische Reglement*) atau R.I.B./R.I.D. (*Reglemen Indonesia yang Dibaharu*); R.Bg. (*Rechtsreglement Buitengewesten*); dan B.W. (*Burgerlijk Wetboek*) yang diterjemahkan dengan “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)” yang merupakan produk hukum Belanda, hendaknya diamandemen atau direkonstruksi. Kalau perlu KUHPerdata tersebut diubah atau diganti dengan KUHPerdata Indonesia sebagai produk hukum bangsa Indonesia, khususnya produk hukum umat Islam Indonesia yang bersifat *rahmatli al-‘alamin*.

Akhirnya, dengan memohon ridha Allah swt. semoga buku ini bermanfaat bagi para pembacanya, terkhusus bagi penulis dan akan menjadi amal jariyah kelak, *āmin, yā Rab al-‘alamin*.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an.

Abdullah, Abdul Gani. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1994.

Abdurrahman, Dudung dkk. *Sejarah Peradaban Islam: dari Masa Klasik Hingga Modern*. Cet. I; Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga-Lesfi, 2003.

Ahmad, Amrullah dkk. *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Ahmad, Zainal Abidin. *Piagam Nabi Muhammad Saw.: Konstitusi Negara Tertulis yang Pertama di Dunia*. Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1973.

Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. Cet. I; Jakarta: Chandra Pratama, 1996.

Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Edisi Keenam. Cet. IX; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.

-----, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Cet. I; Jakarta: UI Press, 1988.

Amal, Taufik Adnan. *Rekonstruksi Sejarah al-Qur'an*. Set. I; Yogyakarta: Forum kajian Budaya dan Agama (FkBA), 2001.

Amirin, Tatang M. *Pokok-pokok Teori Sistem*. Cet. IV; Jakarta: Rajawali, 1989.

Anderson, J.N.D. *Islamic Law in the Modern World*. Diterjemahkan oleh Machnum Husein dengan Judul, *Hukum Islam di Dunia Modern*. Cet. I; Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1994.

Anshari, H. Endang Syaifuddin. *Wawasan Islam: Pokok Pikiran tentang Islam dan Umatnya*. Cet. IV; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.

-----, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*. "Dan Sejarah Konsensus Nasional antara Nasionalis Islami dan Nasionalis Sekuler tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1945-1959." Cet. I;

- Bandung: Pustaka Perpustakaan Salman ITB Kerjasama dengan Lembaga Studi Islam Bandung, 1401 H – 1981 M.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia: Eksistensi dan Adaptabilitas*. Cet. I; Yogyakarta: Ekonisia UII, 2005.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Suatu Pengantar Umum*. Cet. I; Jakarta: Tazkia Institute, 1999.
- A. Ubaidillah, et al. *Pendidikan Kewargaan: Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*. Cet. I; Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000.
- Badjeber, Zain dan Abdul Rahman Saleh. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Komentar*. Jakarta: Pustaka Amani, 1990.
- Bisri, Cik Hasan. *Peradilan Islam dalam Tatahan Masyarakat Indonesia*. Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997.
- , *Peradilan Agama di Indonesia*. Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Bowett Q.C.I.L.D., D.W. *The Law of International Institutional*. Diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djajaatmadja dengan Judul, *Hukum Organisasi Internasional*. Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Cet. XIII; Jakarta: PT Gramedia, 1991.
- Chapra, M. Umer. *Sistem Moneter Islam*. Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Dahlan, Abdul Aziz, et al. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid 2, Cet. V; Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2001.
- Dahlan, Zaini dkk. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama Departemen Agama RI, 1987.
- , *Peradilan Agama di Indonesia*. Cet. 2; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Daly, Peunoh. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlu al-Sunnah dan Negara-negara Islam*. Cet. I; Jakarta: PT Bulan Bintang, 1988.

- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Edisi baru revisi terjemah. Semarang: CV Toha Putra, 1989.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga, Cet. I; Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Ditbinpera Depag RI., *Mimbar Hukum*. Jakarta: al-Hikmah, No, 1 Tahun 1990.
- Echols, John M. dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris-Indonesia*. Cet. XX; Jakarta: PT. Gramedia, 1992.
- Fauzan, Achmad. *Perundang-Undangan Lengkap Tentang Peradilan Umum, Peradilan Khusus, dan Mahkamah Konstitusi*, Edisi Revisi. Cet. II; Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Al-Fayūmī, Aḥmad bin Muḥammad al-Makrī. *Al-Miṣḥab al-Munīr*, Juz. II, Beirut: Maktabah 'Ilmiah, t.th.
- Grafika, Redaksi Sinar. *Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama*. Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Habiburrahman. *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011.
- Hafidhuddin, K.H. Didin. *Panduan Praktis tentang Zakat, Infak, dan Sedekah*. Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Hallaq, Wael B. *Sejarah Teori Hukum Islam*. Cet. II; Jakarta: PT Raja Grafindo, 2001.
- Hamid, H.M. Arfin, Pemateri pada: *Orientasi Islam untuk Disiplin Ilmu (IDI)*, di Kampus 2 UIN Alauddin Makassar, Rabu 23 Oktober 2013.
- , *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan (Sebuah Pengantar dalam Memahami Realitasnya di Indonesia)*. Cet. I; Makassar: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, 2011.
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama: Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1989*. Jakarta: Pustaka Kartini, 1993.
- Harman, Benny K. *Konfigurasi Politik & Kekuasaan Kebakiman di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), 1997.

- Hasan, K.N. Sofyan dan Warkum Sumitro, *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*. Cet. I; Surabaya: Karya Anda, 1994.
- Hisyam, Usamah, dkk., *SBY Sang Demokrat*. Jakarta: Dharmapena, 2004.
- Ichtiyanto SA. *Prospek Peradilan Agama sebagai Peradilan Negara dalam Sistem Politik Hukum di Indonesia*, dalam Arullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Cet. I; Jakarta: PP-IKAHA, 1994.
- Ismaya, Sujana. *Kamus Perbankan*. Cet. I; Bandung: Pustaka Grafika, 2006.
- Ja'far, Muhammad Anas Qasim. *Al-Huquq al- Siyasiyyah li al-Mar'ah fi al-Islam wa al-Fikr al-Tasyri'*. Diterjemahkan oleh Muhtaba Hamdi dengan Judul, *Mengembalikan Hak-hak Politik Perempuan Sebuah Perspektif Islam*. Cet. I; Jakarta: Penerbit Azan, 2001.
- Junaedi, Dedi dan Hamidah. *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*. Edisi Pertama, Cet. I; Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1996.
- Ka'bah, Rifyal. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Universitas Yarsi, 1999.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Kartasapoetra, Rien G. *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*. Cet. I; Jakarta: Bina Aksara, 1988.
- Katjasungkana, Nursyahbani dkk. *Potret Perempuan: Tinjauan Politik, Ekonomi, Hukum*. Cet. I; Yogyakarta: Pusat Studi Wanita Universitas Muhammadiyah bekerja sama dengan Pustaka Pelajar, 2001.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Uşul al-Fiqh*. Kuwait: Maṭba'ah al-Nasyr, 1977.
- , *Ilmu Uşul al-Fiqh*. Alih Bahasa Noer Iskandar al-Barsany dan Moh. Tolchah Mansoer dengan judul *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Cet. III; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.

- , *Perkembangan Sejarah Hukum Islam*. Alih Bahasa Ahyar Aminuddin. Cet. I; Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar Mesir. *Hukum Waris*. Cet. I; Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004.
- Lubis, H. Ibrahim. *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*. Jilid II. Cet. I; Jakarta: Kalam Mulia, 1995.
- Mahmood, Tahir. *Personal Law in Islamic Countries (Histori, Text and Comparative Analysis)*. New Delhi: Academy of Law Religion, 1987.
- Maududi, Maulana Abu A'la. *Human Right in Islam*. Diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djajaatmadja dengan Judul, *Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam*. Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Minahjuddin, *Pengembangan Metode Ijtihad dalam Perspektif Fikih Islam*. Makassar: UIN Alauddin Makassar, "Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Fikih/Usul Fikih pada Fakultas Syari'ah dan Hukum", disampaikan pada Rapat Senat Terbuka Luar Biasa UIN Alauddin Makassar, tanggal 31 Mei 2004.
- , *Syari'ah dan Fikih*. Makassar: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, disampaikan pada Rapat Eduksi Fakultas Dirangkaikan dengan Pidato Rekognisi Menjelang Purnabakti Prof. Dr. H. Minhajuddin, M.A., tanggal 27 Februari 2013.
- , Minhajuddin. *Ilkhtilaf Ulama Suni dan Pengaruhnya terhadap Perkembangan Fikih Islam (Abad Dua dan Tiga Hijriah)*. Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Mu'allim, Amir. *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*. Cet. II; Yogyakarta: UII Press (Anggota IKAPI), 2001.
- Muchsin, H. *Masa Depan Hukum Islam di Indonesia*. Surabaya: STIH Iblam, 2004.
- Mujahidin, Ahmad. *Peradilan Satu Atap di Indonesia*. Cet. I; Bandung: PT. Refika Aditama, 2007.

- Al-Munawar, Said Agil Husin. *Hukum Islam & Pluralitas Sosial*. Cet. I; Jakarta: Penamadani, 2004.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Ditelaah dan Dikoreksi oleh K.H. Ali Ma'shum dan K.H. Zainal Abidin Munawwir. Cet. XIV; Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Naqvi, Syed Nawab Haider, *Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesis Islami*. Cet. I; Bandung: Mizan, 1985.
- Parman, Ali. *Kemoderatan dalam Hukum Islam (Telaah terhadap Implementasi Ibadah-Muamalah yang Bervorak Matematis)*. Makassar: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2012.
- Pengurus Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat. *Kumpulan Tulisan tentang Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: PPHIM, 2006.
- Permono, K.H. Sjechul Hadi. *Sumber-sumber Penggalan Zakat*. Cet. II; Jakarta: Pusta Firdaus, 1994.
- Praja, Juhana S. *Hukum Islam di Indonesia*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991.
- Puspa, Yan Pramadya. *Kamus Hukum*. Edisi Lengkap Bahasa Belanda – Indonesia – Inggris, Semarang: CV Aneka, 1977.
- Qadir, Abdurrachman. *Zakat dalam Dimensi Mabdah dan Sosial*. Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Qardhawi, Yusuf. *Umat Islam Menyongsong Abad Ke-21*. Cet. II; Karangasem-Laweyan-Solo: Era Intermedia, 1422 H/ 2001M.
- Al-Qaṭṭān, Manna'. *Al-Tasyrī' wa al-Fiqh fī al-Islāmi Tārīkhā wa Manhajā*. Beirut: Muassasah al-Risālah, 1982.
- Quthub, Sayyid. *Fī Zilālī al-Qur'ān* diterjemahkan oleh Aunur Rafiq Shaleh Tamhid dengan judul *Tafsīr Fī Zilāl al-Qur'ān: Dilengkapi dengan Takhrij Hadis dan Indeks Tematik*. Jilid 2 Juz 3 dan 4 Cet. I; Jakarta: Robbani Press, 2001.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Cet. IV; Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996.

- Rasdiyanah, Andi. "Problematika dan Kendala yang Dihadapi Hukum Islam dalam Upaya Transformasi ke dalam Hukum Nasional", *Makalah* disajikan pada Seminar Nasional dan Reuni I Ikatan Alumni IAIN (kini UIN) Alauddin Ujung Pandang (kini Makassar) Komisariat Fakultas Syari'ah (kini Syari'ah dan Hukum) tanggal 1-2 Maret 1996.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Cet. IV; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Redaksi Sinar Grafika. *Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama*. Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- , *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- , *Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*.
- , *Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*.
- , *Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*.
- , *Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.
- , *Inpres RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*.
- , *Tap MPR RI No. IV/1999 tentang GBHN 1999-2004 Bab II tentang Kondisi Umum*. Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- , *Amandemen Keempat UUD 1945 Tahun 2002*.
- , *Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*.
- , *Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pajak*.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Cet. I; Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 1995.

- Rosyadi, A. Rahmat dan M. Rais Ahmad. *Formalisasi Syari'at Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Ghaliah Indonesia, 2006.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Cet. I; Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987.
- Salmah, Otje, *Sosiologi Hukum Suatu Pengantar*. Bandung: CV Armico, 1984.
- Al-Sa'ud, Khadim al-Haramain asy-Syarifain (Pelayan kedua Tanah Suci) Raja Fahd ibn 'Abd. al-'Aziz. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Madinah al-Munawwarah: Kementerian Agama Islam, Wakaf, Da'wah, dan Irsyad Kerajaan Saudi Arabia, yang menaungi Mujamma' Malik Fahd li Thiba'at al-Mush haf Asysyarif Komplek Percetakan al-Qur'anul Karim Kepunyaan Raja Fahd, 1418 H.
- As-Sayis, Syekh Muhammad Ali. *Târikh al-Fiqh al-Islâmî*. Diterjemahkan oleh Dedi Junaedi dengan Judul, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*. Edisi I, Cet. I; Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1996.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Pengantar Hukum Islam*. Edisi Kedua, Cet. I; Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997.
- , *Pengantar Hukum Islam*. Jilid II, Cet. VI; Jakarta: Bulan Bintang, 1981.
- , *Pengantar Ilmu Fiqhi*. Cet. VII; Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- , *Pedoman Zakat*. Edisi II. Cet. I; Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1996.
- , *Hukum-hukum Fiqhi Islam*. Cet. V; Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Shihab, M. Quraish. *Fatwa-fatwa Seputar Ibadah Ma'adab*. Cet. II; Bandung: Mizan, 2001.
- Siddik, Haji Abdullah. *Hukum Perkawinan Islam*. Cet. II; Jakarta PT Tintamas, 1983.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah. *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*. Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Simorangkir, J.C.T. dkk. *Kamus Hukum*. Cet. V; Jakarta: Bumi Aksara, 1995.

- Sjadzali, Munawir. *Kontekstualisasi Ajaran Islam*. Cet. I; Jakarta: Kerjasama Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) dengan Yayasan Wakaf Paramadina, 1995.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Edisi Baru Kesatu, Cet. V; Jakarta: CV Rajawali, 1985.
- . *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Cet. XIV; Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004.
- . *Bahan Bacaan Perspektif Teoritis dalam Sosiologi Hukum*. Cet. I; Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- . *Mengenai Sosiologi Hukum*. Cet. IV; Bandung: Alumni, 1986.
- Starke, J.G. Starke. *Introduction to Internasional Law*. Diterjemahkan oleh Sumitro L.S. dan Lukas Ginting dengan Judul, *Pengantar Hukum Internasional*. Edisi Kesembilan, Cet. I; Jakarta: PT Aksara Persada Indonesia, 1988.
- Subhan, Zaitunah. *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an*. Cet. I; Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*, Edisi Baru. Cet. II; Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999.
- Sudjana, Nana. *Buku dan Penilaian Pendidikan*. Bandung: CV. Alfabeta, 2008.
- Summa, Muhammad Amin. *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*. Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sunanto, Musyrifah. *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Susanto, Noto. *Organisasi dan Yurisprudensi Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Depag, 1963.
- Syaltūt, Maḥmūd. *Al-Islām 'Aqidah wa Syari'ah*. Cet. III, Al-Qāri'ah: Dār al-Qalam, 1996.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqhi*. Cet. I; Jakarta: Prenada Media, 2003.
- . *Hukum Kewarisan Islam*. Cet. I; Jakarta: Prenada Media, 2004.

- Syaukani, Imam. *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya bagi Pembangunan Hukum Nasional*. Edisi I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Thaba, Abdul Azis. *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru*. Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Tim Redaksi Pustaka Pergaulan. *UUD 1945 Naskah Asli & Perubahannya*. Cet. I; Jakarta: Pustaka Pergaulan, 2007.
- Tim Redaksi. "Seks dan Gender" dalam *Buletin Amal Hayati*. Edisi No. 04/Th.II/V/2002.
- Tresna, R. *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1977.
- Tunggal, Hadi Setia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*. Jakarta: Harvarindo, 2010.
- Umar, Nasaruddin. *Bias Jender dalam Penafsiran al-Qur'an*. Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 2002.
- Wahid, Sugira. "Seputar Gender", *Makalah*. Disampaikan dalam Pelatihan Muballighat se-Indonesia Timur dalam Rangka Pemberdayaan Muballighat Menuju Proses Pembentukan Masyarakat Madani di Makassar tanggal 12 November 1999.
- Yafi, Ali. *Menggagas Fiqhi Sosial*. Bandung : Mizan, 1994.
- Zein, Satria Effendi M. "Munawir Sjadzali dan Reaktualisasi Hukum Islam di Indonesia" dalam *Kontekstualisasi Ajaran Islam*. Cet. I; Jakarta: Kerjasama Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) dengan Yayasan Wakaf Paramadina, 1995.
- Z., A. Wangsawidjaja. *Pembiayaan Bank Syari'ah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama di Indonesia: dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut*. Cet. I; Malang: UIN-Malang, 2008.

BIODATA PENULIS



Supardin, lahir di *Tana Luwu* (tepatnya di Batu Merah-Kota Malili, kini menjadi Ibu Kota Kabupaten Luwu Timur), pada tanggal 2 Maret 1965 adalah alumni Sarjana (S1) Fakultas Syari'ah IAIN Alauddin Ujung Pandang pada bulan Mei 1991 Jurusan Peradilan Agama; lulusan Magister Hukum Islam (S2) pada UIN Alauddin Makassar pada bulan Mei 2006 Konsentrasi Syari'ah/Hukum Islam (Peradilan Agama); Doktor Hukum Islam (S3)

pada UIN Alauddin Makassar pada bulan November 2013 Konsentrasi Syari'ah/Hukum Islam (Peradilan Agama). Kini sebagai dosen pembina mata kuliah fiqhi/fiqhi mawaris/hukum kewarisan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, juga mengajar di Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, dan sebagai dosen agama pada Akademi Kebidanan Pelamonia Kodam VII Wirabuana di Makassar. Beberapa karya telah diterbitkan antara lain: Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu: Studi Kasus (penelitian 1991); Konsep Siri dalam Lontara dan Realisasinya pada Masyarakat Gowa: Studi Kasus Kawin Lari (penelitian 1998); Peluang dan Tantangan Alumni Fakultas Syari'ah (majalah Al-Marhamah Kanwil Kemenag Sulsel 2003); Reaktualisasi Hukum Kewarisan Islam (jurnal 2003); Ilmu Jiwa Sosial (buku 2003); Tasbih dan Jala (buku 2004); Kewarisan Bilateral Beda Agama (jurnal 2004); Syari'ah dan Lingkungan (jurnal 2004); Hukum Islam dan Sistem Hukum Internasional (jurnal 2005); Islam dan Etos Kerja (buku 2006); Hadis-hadis Jender (jurnal, 2010); Konfigurasi Hukum Islam di Indonesia (buku Maret 2011); Materi Hukum Islam (buku 2011); Lembaga Peradilan Agama & Penyatuan Atap (buku Desember 2012); Menelusuri Perkembangan Hukum Islam dalam Lintas Sejarah di Indonesia (penelitian 2013); Analisis Sosiologi Hukum dalam Realitas Fikih Sosial (jurnal 2014); Fikih Peradilan Agama di Indonesia: Rekonstruksi Materi Perkara Tertentu (buku 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020); Produk Pemikiran Hukum Islam di Indonesia (jurnal 2017); Kedudukan Lembaga Fatwa dalam Fikih Kontemporer (jurnal 2018); Fikih Etomologi *Imma wa Akhawātuha* dalam Memahami Ayat-ayat Hukum (jurnal 2019); *The*

Challenges of Islamic Law in the Industrial Revolution = Realitas Fikih Muamalah di Era Revolusi Industri (journal 2020); *The Contestation of Values in Character Education: Political Interest and School Burden* (journal Internasional 2020); dan lain-lain. Penulis juga aktif di sejumlah organisasi intra maupun ekstra kampus, antara lain: Wakil Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Alauddin Ujung Pandang 1988-1989; Instruktur dan Penceramah ke-100 di HMI Cabang Ujung Pandang 1987-2003; Wakil Ketua HMI IAIN Alauddin Makassar dan Gowa (2004-2005); Pendiri IPMIL (Ikatan Pelajar Mahasiswa Indonesia Luwu) Koordinator IAIN Alauddin Ujung Pandang 1989; Penatar P4 1997; Pendiri KKL (Kerukunan Keluarga Luwu) Cabang Kabupaten Gowa 2000; Pengurus KKLIT (Kerukunan Keluarga Luwu Timur), Sekretaris KPN Al-Munawarah IAIN Alauddin 1999-2004; Komite MAN 2 Model Makassar 2011-2006; Wakil Sekjen Badan Pengurus Pusat Ikatan Alumni IAIN/ UIN Alauddin Makassar 2005 – sekarang; Sekjen Seni Bela Diri Ikhlas Indonesia 2000-sekarang; Tim Hisab Rukyat UIN Alauddin Makassar 1994-sekarang; Ketua KMA PBS UIN Alauddin Makassar 2002; Ketua Pembangunan Masjid MAN 2 Model Makassar 2006-2007; Pengurus Dewan Masjid Indonesia Sul-Sel 2010-2015; Pengurus PUI (Persatuan Umat Islam) Sul-Sel 2008-sekarang; Sekretaris MES (Masyarakat Ekonomi Syari'ah) Sul-Sel 2008-sekarang; Sekretaris Jurusan Perbandingan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassa 2001-2006; sebagai Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakutlas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar (2008-2012); Wakil sekretaris Pengurus KPPSI Kota Makassar (2013) dan menjadi Wakil Sekjen KPPSI (2013-2016); Kepala Laboratorium Falak Faklutas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar (2014-2015); Ketua Bidang Dakwah Masjid Kampus II UIN Alauddin Makassar dan sebagai Dewan Pembina Masjid Haji Jamaluddin Muhammad jalan Tun Abdul Razak II Hertasning Baru, Paopao Permai (2010-sekarang); Ketua Jurusan Peradilan Agama/Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan (kini menjadi Prodi Hukum Keluarga Islam); Plt. Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2016-2019); Ketua Umum Kerukunan Keluarga Luwu Raya Cabang Kabupaten Gowa (2018-2023); Kepala Pusat Peradaban Islam Sulawesi Selatan LP2M Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2019-sekarang); dan lain-lain.



DR. H. SUPARDIN, M.H.I.

FIKIH PERADILAN AGAMA DI INDONESIA

Rekonstruksi Materi Perkara Tertentu



ALAUDDIN UNIVERSITY PRESS

ISBN 978-602-237-930-0



9 786022 379300